

bank victoria Syariah





Ayo Sinergi

Menuju Bank yang sehat, kuat, dan *profitable*

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas.

Dalam Sinergi diharapkan para pemangku kepentingan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk pencapaian hasil yang lebih baik ke depan.

Ayo Sinergi diambil sebagai tema *annual report* mengandung makna sebagai berikut :

- Tahun sinergi untuk mencapai kinerja dan hasil yang positif.
- Tahun sinergi untuk saling bekerjasama untuk maju dan tumbuh berkembang.
- Tahun sinergi untuk meningkatkan keefektifan organisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan (*trust*) pada seluruh *Stakeholders*

Dengan Tema “AYO SINERGI” maka semua *stakeholder* dirangkul untuk sama-sama membangun *trust* untuk mewujudkan cita-cita menjadi Bank Victoria Syariah yang sehat, tumbuh berkembang dan *profitable*.

Kesinambungan Tema

The Continuity of the Theme

Kesinambungan tema Laporan Tahunan menjadi penting untuk menunjukkan konsistensi Laporan Tahunan. Berikut ini kami sajikan kesinambungan tema selama 3 (tiga) tahun terakhir :

2017

Ayo Sinergi merupakan tema lanjutan dari tema-tema tahun sebelumnya. Ditahun sebelumnya Bank telah meletakkan pondasi yang kuat serta melakukan transformasi untuk lepas landas.

Dengan Ayo Sinergi maka semua *stakeholders* diajak untuk dapat memberikan energi positif menuju Bank Victoria Syariah yang bertumbuh secara berkualitas dan sehat serta mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan nasional.



2016

Transformasi Menuju Bank yang sehat kuat dan *profitable*

Manajemen pada tahun 2016 berkomitmen menjadikan tahun perubahan dalam berbagai aspek untuk menumbuhkan bisnis secara berkualitas dan *sustain*. Tema ini kelanjutan dari tema tahun 2015 yang telah berkomitmen untuk memperkuat pondasi untuk lepas landas. Bank telah memperkuat pondasi untuk lepas landas.

Bank Victoria Syariah meletakkan dasar dasar transformasi perusahaan berkaitan dengan implementasi *corporate plan* 2016 – 2019.

Transformasi Bank Victoria Syariah dilakukan pada segala aspek bisnis, operasional, SDI maupun tata kelola perusahaan yang baik dan profesional.

Semangat ditahun 2016 adalah semangat perubahan untuk menang secara bersungguh sungguh dalam menghadapi segala tantangan yang ada.

Dengan transformasi untuk menang tersebut maka perusahaan semakin baik dan sehat sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata para *stakeholders*.



2015

Perkuat Pondasi Menuju Pertumbuhan yang Berkualitas

Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang tumbuh sehat dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pondasi semangat, tujuan, dan cita-cita Bank Victoria Syariah menjadi akar dan pondasi yang sangat penting. Dari elemen yang paling dasar tersebut muncul budaya perusahaan yang menjadi ruh dalam bekerja, yang membawa Bank Victoria Syariah secara konsisten menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Bank Victoria Syariah memperkuat pondasi perusahaan untuk lebih memantapkan langkah perusahaan. Bank Victoria Syariah bertujuan untuk bersama membangun Indonesia yang lebih baik dengan berperan serta menjadi lembaga perbankan yang memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan nasional.





Melangkah Menggapai Harapan

Bank Victoria Syariah menutup tahun 2017 dengan suatu prestasi yang membanggakan dengan hasil positif pada kinerja keuangannya, di tengah tantangan perkembangan lingkungan bisnis yang sangat kompetitif.

Kinerja ditahun 2017 merupakan buah dari hasil dedikasi Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah yang akan terus mengembangkan diri guna memberikan karya terbaik pada kualitas layanan dengan memperhatikan prinsip syariah.

Sinergi positif yang dibangun oleh seluruh *stakeholders* sejak awal tahun 2017 telah secara nyata menghasilkan suatu hasil kinerja yang dapat dijadikan pondasi untuk terus maju dan berkembang dimasa depan.

Langkah menggapai harapan terbentang luas ke depan dan bisa diwujudkan dengan sinergi dari seluruh *stakeholders*.

Daftar Isi

Table of Contents

1

BAB 1 Chapter 1

Sejarah Singkat Bank Victoria Syariah	10
<i>History in Brief Bank Victoria Syariah</i>	
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	11
<i>Vision, Mission and Corporate Cultures</i>	
Jejak Langkah	12
<i>Milestone</i>	
Jaringan Kantor	14
<i>Office Network</i>	
Ikhtisar Keuangan	15
<i>Financial Highlight</i>	
Kinerja Utama	16
<i>Key Performance</i>	
Struktur Grup Perusahaan	17
<i>Group Company's Structure</i>	
Struktur Organisasi	18
<i>Organization Structure</i>	
Laporan Dewan Komisaris	20
<i>Board of Commisioner's Report</i>	
Laporan Direksi	24
<i>Board of Director's Report</i>	
Laporan Dewan Pengawas Syariah	28
<i>Syariah Board of Supervisory Chairman Report</i>	

2

BAB 2 Chapter 2

Tinjauan Industri	32
<i>Industry Overview</i>	
Tinjauan Bisnis	34
<i>Business Overview</i>	
Tresuri	38
<i>Treasury</i>	
Sumber Daya Insani	40
<i>Human Resources</i>	
Teknologi Informasi	42
<i>Information Technology</i>	
Operasional	44
<i>Operational</i>	
Tinjauan Keuangan	46
<i>Financial Overview</i>	
Analisis Kinerja	48
<i>Performance Analysis</i>	

3

BAB 3

Chapter 3

Tata Kelola Perusahaan	54
<i>Corporate Governance</i>	
1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	55
<i>Corporate Governance Implementation</i>	
2. Komitmen Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan	55
<i>Commitment of Corporate Governance</i>	
3. Kerangka Kerja Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan	55
<i>Corporate Governance Framework of Bank Victoria Syariah</i>	
4. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) atau Prinsip Mengenal Nasabah	55
<i>Anti-Money Laundering & Terrorism Financing Prevention and Know Your Customer Principles</i>	
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	56
<i>General Meeting of Shareholders</i>	
6. Dewan Komisaris	57
<i>Board of Commissioners</i>	
7. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris	58
<i>Committees Under the Board of Commissioners</i>	
8. Direksi	60
<i>Board of Directors</i>	
9. Komite Eksekutif Direksi	62
<i>Directors Executive Committee</i>	
10. Dewan Pengawas Syariah	64
<i>Boards of Sharia Supervisory</i>	
11. Rencana Strategis Bank Tahun 2017	66
<i>Bank's Strategic Plan 2017</i>	
12. Penerapan Fungsi Kepatuhan	66
<i>Implementation of Compliance Functions</i>	
13. Fungsi Audit Intern	68
<i>Internal Audit Function</i>	
14. Penyimpangan Internal	69
<i>Internal Fraud</i>	
15. Audit Eksternal	69
<i>External Audit</i>	
16. Penerapan Manajemen Risiko	70
<i>Implementation of Risk Management</i>	
17. Pengendalian Internal	71
<i>Internal Control System</i>	
18. Permasalahan Hukum	71
<i>Legal Cases</i>	
19. Transaksi dengan Benturan Kepentingan	71
<i>Transactions with Conflict of Interest</i>	
20. Kode Etik	72
<i>Code of Ethics</i>	
21. Budaya Perusahaan	72
<i>Corporate Culture</i>	
22. Perlindungan Nasabah	72
<i>Protection of Customers</i>	
23. Sekretaris Perusahaan	72
<i>Corporate Secretary</i>	
24. Keterbukaan Informasi	73
<i>Information Transparency</i>	
25. Penilaian GCG	74
<i>GCG Assessment</i>	
26. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2017	75
<i>Self Assessment Report on Risk Management Implementation in 2017</i>	

4

BAB 4

Chapter 4

Profil Dewan Komisaris	82
<i>Profile of the Board of Commissioners</i>	
Profil Direksi	86
<i>Profile of the Board of Directors</i>	
Profil Dewan Pengawas Syariah	90
<i>Profile of the Board of Sharia Supervisory</i>	
Profil Pejabat Eksekutif	92
<i>Profile of the Executive Officers</i>	
Profil Pimpinan Cabang	98
<i>Profile of Branch Managers</i>	
Profil Komite	102
<i>Profile of Committees</i>	
Produk dan Layanan	104
<i>Product and Services</i>	
Pembiayaan	106
<i>Financing</i>	
Jaringan Kantor	108
<i>Office Network</i>	

1 BAB 1

Chapter 1





Sejarah Singkat Bank Victoria Syariah

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Jejak Langkah

Jaringan Kantor

Ikhtisar Keuangan

Kinerja Utama

Struktur Grup Perusahaan

Struktur Organisasi

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sejarah Singkat Bank Victoria Syariah

History in Brief Bank Victoria Syariah

PT Bank Victoria Syariah didirikan pada tanggal 6 Agustus 2009, yang merupakan hasil akuisisi dari PT Bank Swaguna yang telah berdiri sejak tanggal 15 April 1966. Perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah diperoleh ijin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010.

Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, yang mana kepemilikan saham PT Bank Victoria International, Tbk pada Bank Victoria Syariah sebesar 99,99%.

Bank Victoria Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah di Indonesia yang dapat menyediakan produk dan jasa perbankan syariah yang berkualitas serta ditunjang oleh layanan yang prima dengan memperhatikan prinsip syariah.

Sejak tahun 2010, Bank Victoria Syariah mengalami pasang surut yang tercermin dari kondisi keuangan, perubahan arah bisnis dan perubahan manajemen, namun demikian berkat dukungan penuh dari perusahaan induk yaitu PT Bank Victoria International, Tbk, Bank Victoria Syariah dapat keluar dari permasalahan dan berhasil tumbuh dengan lebih baik. Beberapa capaian pada akhir tahun 2017 antara lain mengelola aset sebesar +/- Rp. 2 Triliun dan selama setahun pada 2017 berhasil membukukan laba bersih sebesar +/- Rp 5 Milyar di mana sebelumnya 2 (dua) tahun berturut-turut masih rugi.

Capaian tersebut di atas adalah bukti kerjasama dari Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah yang berkomitmen untuk mewujudkan bank syariah yang sehat dan akan terus berupaya mengembangkan diri untuk lebih baik lagi agar dapat memberikan pelayanan keuangan yang terpercaya dan terpilih untuk memberikan solusi keuangan di masyarakat.

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Culture

VISI Bank Victoria Syariah adalah :

“Menjadi Bank Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah”

Dan untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Bank Victoria Syariah dikaitkan dengan upayanya untuk kepuasan *stakeholders*, yaitu sebagai berikut :

Customer

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi dan memberi layanan yang terbaik kepada para nasabah, kebutuhan nasabah dan berkomitmen untuk membina hubungan yang baik dengan nasabah.

People

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional, berprinsip, dan berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik serta memenuhi kebutuhan Nasabah.

Operation

Menjalankan operasional perbankan syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara efisien dan berkesinambungan.

Risk Management

Melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara *prudent* serta konsisten dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai-nilai Perusahaan yang dapat disingkat H-E-B-A-T, dengan maksud membentuk Sumber Daya Insani bank syariah yang memiliki komitmen untuk menjadi HEBAT, yaitu:

Honest

Selalu menjunjung tinggi kejujuran dan menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis, maka semangat dan jiwa muda diperlukan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya dan maju berkembang sesuai jaman.

Brilliant

Memacu diri untuk mampu memberikan solusi atas kebutuhan *customer*, agar dapat mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan dapat menjaga pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan.

Accurate

Selalu menyajikan data yang akurat agar dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain.

Trust

Saling percaya dalam bekerja sama, sehingga operasional perusahaan dapat lebih cepat dan efisien.

Jejak Langkah

Milestone



1966 - 1997

PT. Bank Swaguna di dirikan di Cirebon pada tahun 1966.

Bank ini memulai kegiatan operasionalnya tanggal 7 Januari 1967



2007

PT Bank Victoria mengakuisisi 99.98% saham Bank Swaguna dan mendapat persetujuan BI tanggal 3 Agustus 2007.

Modal disetor Bank menjadi Rp. 90 Milyar pada bulan September



2008

Pada Bulan Maret 2008, Pemegang saham PT Bank Victoria International Tbk kembali memperkuat modal 110 Milyar



2010

Bank Swaguna di konversi menjadi PT Bank Victoria Syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai bank syariah berdasarkan SK Gubernur Indonesia No. 12/8/KEP GBI/DpG/2010.

Bank beroperasi penuh dengan sistem syariah pada 1 April 2010



2011-2012

Entry Point to be Syariah Retail Bank.

Menambah jumlah jaringan kantor & memperluas pangsa pasar



2013

Memperkokoh pondasi melalui pengembangan produk dan segmen bisnis baru



2014

Penambahan setoran Modal Rp. 50 Milyar sehingga modal menjadi Rp. 160 Milyar.



2015

Penataan Strategi dan penguatan GCG



2016

Tahun Transformasi

Penambahan setoran Modal Rp. 50 Milyar sehingga Modal menjadi Rp. 210 Milyar



2017

Penambahan setoran Modal Rp. 100 Milyar sehingga Modal menjadi Rp. 310 Milyar

TOTAL ASET
Rp. 2,0 Triliun
Pembiayaan
Rp. 1,3 Triliun

DPK Rp. 1,5 Triliun
EKUITAS
Rp. 299 Milyar
Laba Berjalan
Rp. 6,1 Milyar



Jaringan Kantor

Office Network



KANTOR PUSAT & KANTOR CABANG TOMANG

GEDUNG THE VICTORIA

Jalan Tomang Raya Kav. 35-37 Lantai 1-3
Jakarta Barat
Telp : (021) 5600467 (hunting)
Fax : (021) 5664247
Website : www.bankvictoriasyariah.com

KANTOR CABANG

Cabang	Alamat	Telp	Fax
Bekasi	Ruko Bekasi Square No.63 Jl. Jend. Ahmad Yani , Pekayon Bekasi	021-82434874-75	021-82434876
Serang	Jl. Jend Ahmad Yani No. 152 A Serang – Banten	0254-227621	0254-227622
Bandung	Jl. Gatot Subroto No. 3 Bandung – Jawa Barat	022-87340303	022-87340311
Cirebon	Cirebon Super Block, Blok GS/5. Jl Dr Cipto Mangunkusumo No. 26 Cirebon, Jawa Barat	0231-8291051-52	0231-8291053
Tegal	Ruko Nirwana Square Blok A/12B Tegal – Jawa Tengah	0283-351024	0283-351027
Denpasar	Ruko Tuban Plaza No. 44-45 Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai, Tuban. Kuta – Badung- Bali	0361-753531-32	0361-768081
Solo	Ruko Honggowongso Square Blok A/7 Solo – Jawa Tengah	0271-660832	0271-660932

KANTOR CABANG PEMBANTU

Cabang Pembantu	Alamat	Telp	Fax
Tebet	Grand Soepomo Jl, Prof Dr. Soepomo SH Blok A lt. 2 No.73 Tebet – Jakarta Selatan	021-83785567	021-83785569
Pasar Induk Kramat Jati	Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D2/33 Jl. Raya bogor Km. 17 Kramat Jati – Jakarta Timur	021-87797573	021-87797574
Depok	Jl. Kemakmuran Raya No. 25A Kelurahan Mekarjaya Kec. Sukmajaya, Depok Tengah II - Depok	021- 7702882	021- 7703340
Tangerang	Ruko Modern Land Blok AR/23 Jl. Jendral Sudirman Cikokol Tangerang – Banten	021-55747698	021-55747699
Bandung-Braga	Braga Plaza Jl. Braga No. 5-11 Bandung Jawa Barat	022-4204941	022-4260676

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlight

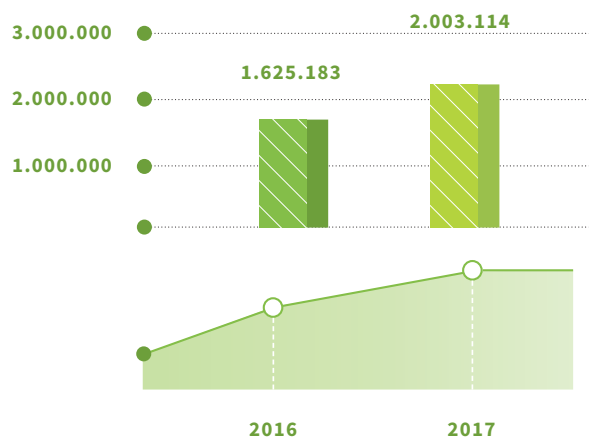
(Dalam jutaan rupiah)	2017	2016	2015	2014	Mutasi 2017-2016	Mutasi 2016-2015
NERACA						
Total Aset	2,003,114	1,625,183	1,379,266	1,439,632	23.25%	17.83%
Total Pembiayaan yang Diberikan	1,262,926	1,212,690	1,075,681	1,076,761	4.14%	12.74%
Penempatan Surat Berharga	320,282	237,032	230,449	188,452	35.12%	2.86%
Dana Pihak Ketiga	1,511,159	1,204,681	1,128,908	1,132,086	25.44%	6.71%
Giro	37,471	37,251	53,761	19,756	0.59%	-30.71%
Tabungan	43,766	40,157	50,319	65,225	8.99%	-20.19%
Deposito	1,429,922	1,127,273	1,024,828	1,047,105	26.85%	10.00%
Total Ekuitas	299,393	194,330	162,652	186,368	54.06%	19.48%
LABA/RUGI						
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	153,695	122,263	144,366	145,071	25.71%	-15.31%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	101,060	84,096	104,381	103,933	20.17%	-19.43%
Net Pengelolaan Dana	52,635	38,166	39,985	41,138	37.91%	-4.55%
Pendapatan Operasional Lainnya	3,332	969	1,231	6,856	244.02%	-21.34%
Beban Operasional	49,712	77,754	73,740	73,269	-36.07%	5.44%
Laba Operasional	6,255	(38,619)	(32,524)	(25,275)	-116.20%	18.74%
Beban Non Operasional Bersih	(156)	10,735	539	226	-101.45%	1892.47%
Laba Sebelum Pajak	6,099	(27,884)	(31,985)	(25,049)	-121.87%	-12.82%
Beban (penghasilan) Pajak	1,506	(9,410)	7,984	5,663	-116.00%	-217.86%
Laba Bersih Setelah Pajak	4,593	(18,474)	(24,001)	(19,386)	-124.86%	-23.03%
RASIO KEUANGAN (%)						
Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)	96.02%	131.34%	119.19%	143.31%	12.15%	-24.12%
Rasio Kecukupan Modal (CAR) memperhitungkan Risiko Pembiayaan	19.29%	15.98%	16.14%	15.27%	-0.16%	0.87%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF Gross)	4.59%	7.21%	9.80%	7.10%	-2.49%	2.70%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF Netto)	4.08%	4.35%	4.82%	4.75%	-0.47%	0.07%
Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	0.36%	-2.19%	-2.36%	-1.87%	0.17%	-0.49%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	2.01%	-17.45%	-15.06%	-17.61%	-2.39%	2.55%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	83.59%	100.67%	95.29%	95.19%	5.38%	0.10%
GWM (Giro Wajib Minimum)	6.49%	5.03%	5.03%	5.01%	0.00%	0.02%

Kinerja Utama

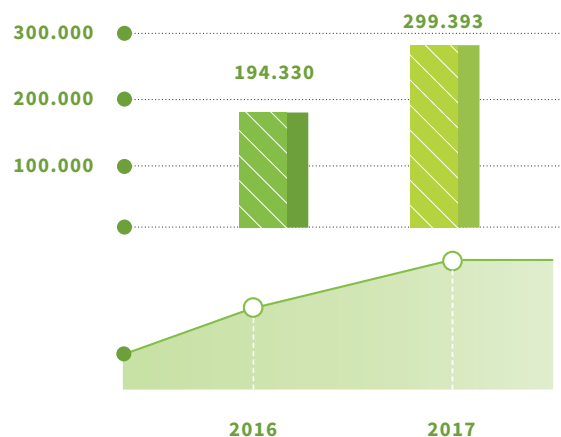
Key Performance

(Dalam Juta Rupiah)

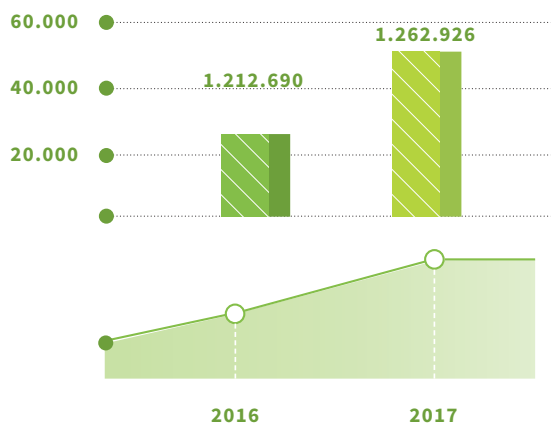
Total Aset



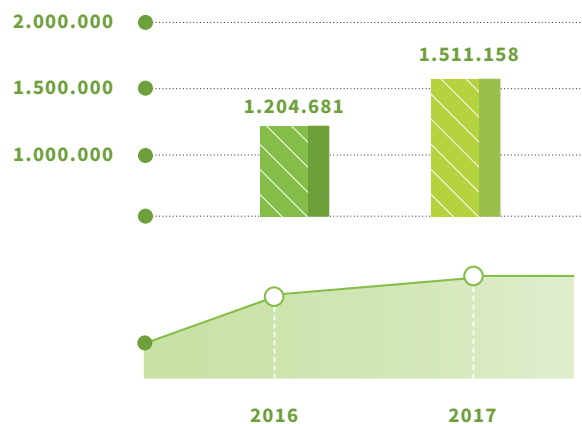
Total Ekuitas



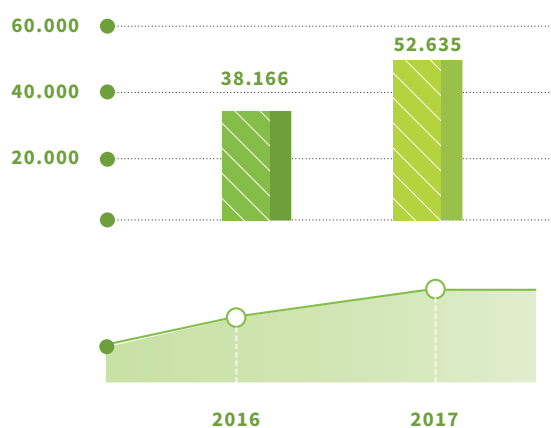
Total Pembiayaan



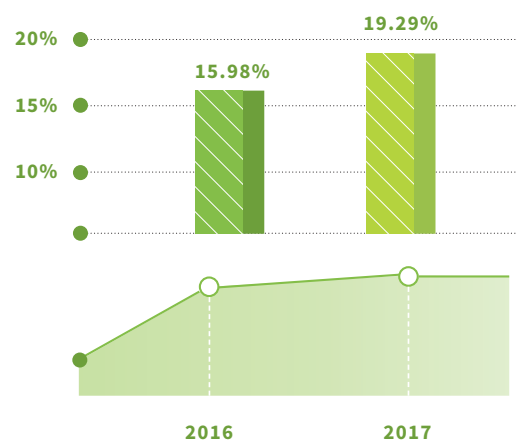
Total DPK



Net Margin

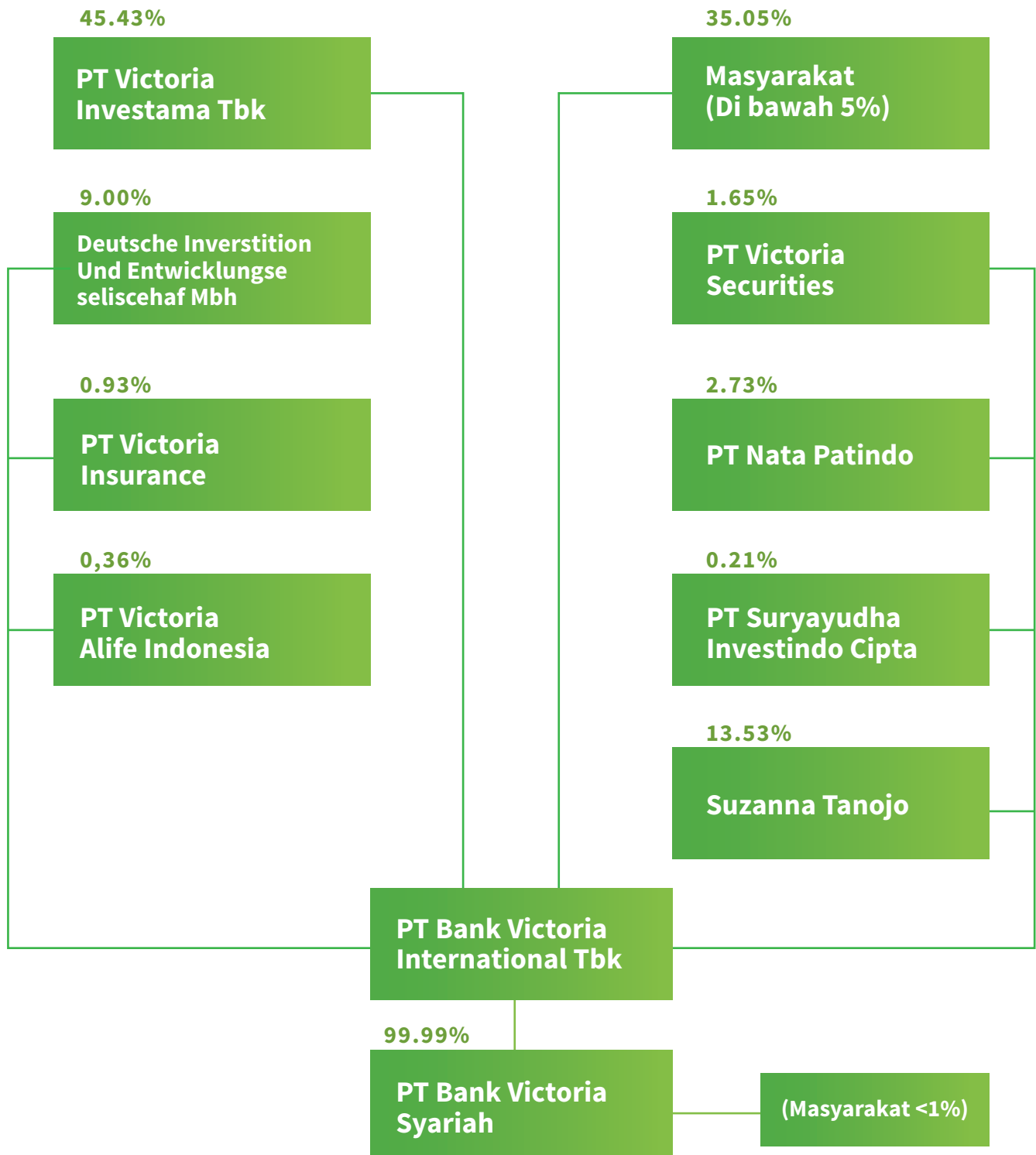


Rasio Kecukupan Modal



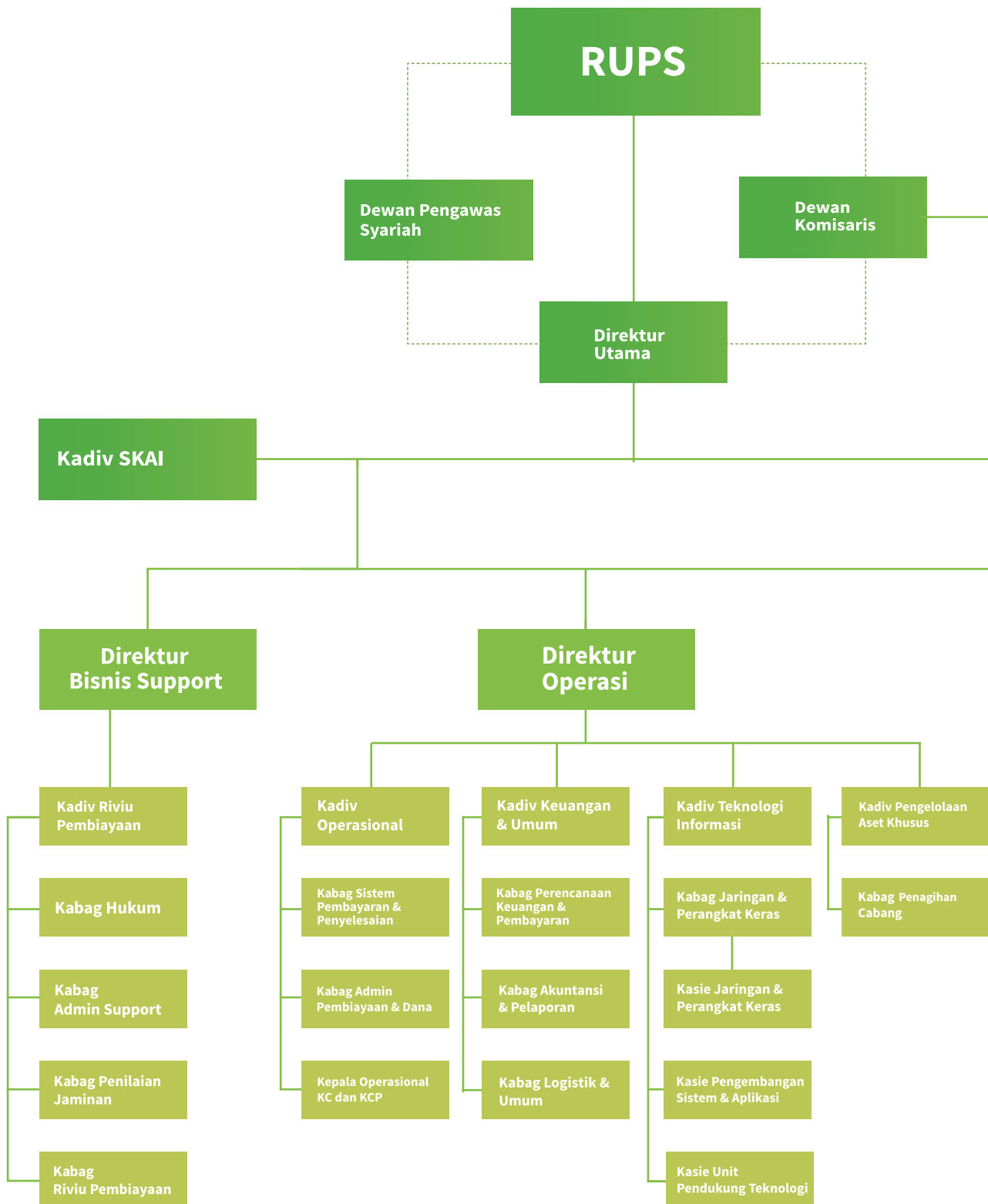
Struktur Grup Perusahaan

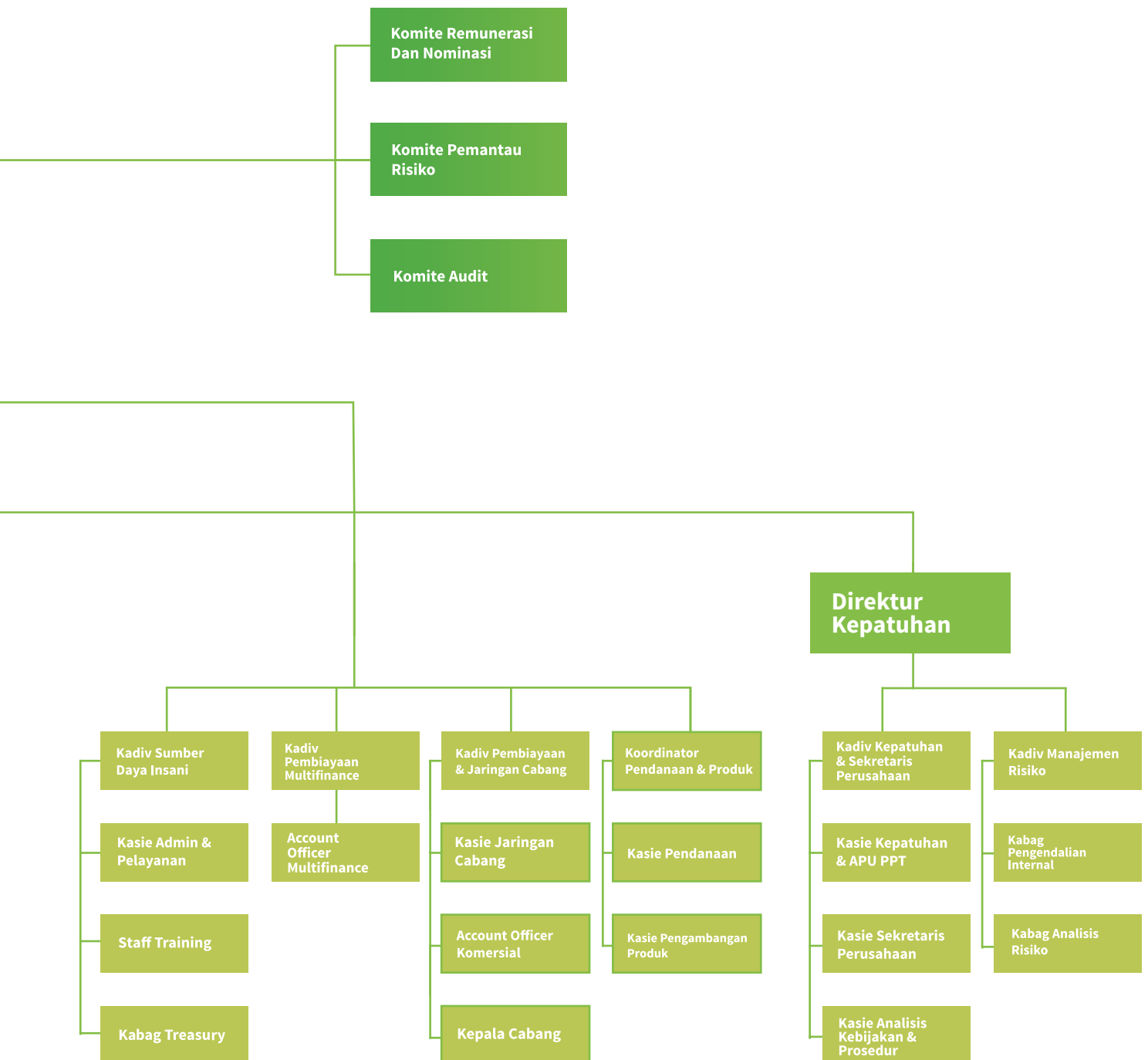
Group Company's Structure



Struktur Organisasi

Organization Structure







Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner's Report

Sugiharto

President Commissioner

Bismillahirrohmahirrohim

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah – Nya kita dapat menjalankan segala aktivitas dalam rangka mencari ridha-Nya.

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris secara aktif telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank dan dapat kami sampaikan bahwa Bank Victoria Syariah pada tahun 2017 Alhamdulillah telah membukukan hasil yang positif. Ditengah kondisi ekonomi yang belum stabil Bank Victoria Syariah mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas dan menjaga posisi likuiditas dan permodalan yang memadai.

Dewan Komisaris menghargai dan percaya bahwa dengan kerjasama dari segenap Sumber Daya Insani (SDI) serta izin dari Allah SWT, Bank Victoria Syariah dapat menghadapi kesulitan yang ada sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Dalam menjalankan strategi bisnis, Bank Victoria Syariah selalu mengutamakan prinsip-prinsip syariah dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, kepatuhan, pengelolaan risiko yang terukur (*Good Corporate Governance, Compliance & Risk Management*).

Pengawasan Komisaris

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan fungsinya dengan baik, dan kami menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Direksi selaras dengan pandangan Dewan Komisaris.

Landasan dasar pengawasan yang digunakan Dewan Komisaris adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan Dewan Komisaris fokus pada tanggung jawab Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan, Direksi telah menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi telah menerapkan beberapa inisiatif yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas dan kualitas aset.

Perkembangan Usaha dan Kinerja Keuangan

Secara umum kinerja Bank Victoria Syariah selama tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang baik dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Total aset sebesar Rp. 2.003 Milyar meningkat 23.25%
2. Realisasi pembiayaan sebesar Rp. 1.263 Milyar, meningkat 4.14% dibandingkan posisi yang sama tahun 2016

3. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.511 Milyar, tumbuh 25.44% dibandingkan posisi yang sama tahun 2016
4. Perolehan Laba tahun berjalan sebelum pajak tercatat sebesar Rp. 6,1 Milyar, jauh membaik dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencatat rugi Rp. 27,9 Milyar.

Good Corporate Governance dan Risk Management

Dewan Komisaris senantiasa memantau terselenggaranya prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada seluruh jenjang organisasi dengan mengevaluasi hasil *self assessment* GCG dan mendorong penyempurnaan pelaksanaan GCG yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis bank. Bank Victoria Syariah percaya bahwa penerapan praktek-praktek GCG merupakan aset penting dalam menciptakan budaya organisasi yang kokoh dan unggul guna meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran staff perusahaan terus berupaya membangun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, sistem dan perangkat yang ada. Secara berkala Bank Victoria Syariah melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG yang menyangkut 11 aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perbankan syariah sesuai dengan hasil *self assessment* Bank Victoria Syariah terhadap pelaksanaan GCG sepanjang tahun 2017 tercatat berpredikat "Baik".

Sedangkan untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional Bank Victoria Syariah, telah dilakukan konsultasi, diskusi dan uji petik oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga semua produk dan layanan yang dikeluarkan oleh Bank Victoria Syariah telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui penerbitan opini.

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran dan potensi risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan.

Rencana dimasa mendatang

Kami melihat bahwa tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia masih akan berlanjut ditahun 2018 dengan masih belum adanya tanda-tanda pemulihan perekonomian global. Tahun 2018 dan 2019 adalah merupakan tahun politik yang akan berpengaruh kepada sektor riil dalam melakukan

setiap rencana bisnis mereka kedepan. Namun demikian kami tetap optimis dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.

Dalam usaha menyelaraskan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris akan terus berusaha untuk meningkatkan aktivitasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Konsisten menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha. Bank Victoria Syariah pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Meningkatkan peran dalam rangka mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Victoria Syariah dan memastikan bahwa perseroan telah menjalankan prinsip-prinsip perbankan syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal, Bank Indonesia dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan dari regulator lainnya.

Akhir kata, marilah kita tingkatkan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin baik selama ini, dan semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua agar Bank Victoria Syariah semakin maju dan berkembang ditahun mendatang... Aamin Ya Robbal Alamiin.

Wabialihi Taufik walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dewan Komisaris



Sugiharto
Komisaris Utama

Jajaran Dewan Komisaris





Laporan Direksi

Board of Director's Report

Firman Ananda Moeis
President Director's

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum Wr Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Bank Victoria Syariah secara garis besar dapat mencapai target sesuai Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan. Pencapaian positif ini merupakan hasil kerjasama Sumber Daya Insani yang sejalan dengan peningkatan layanan kepada nasabah, perbaikan kinerja operasional dan secara proaktif selalu menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan serta berkomitmen untuk menjalankan seluruh aktivitasnya pada kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik.

Bank Victoria Syariah senantiasa mengedepankan pendekatan bisnis dengan prinsip kehati-hatian dan memegang teguh prinsip syariah ditengah naik turunnya kondisi perekonomian secara makro serta mengelola risiko sehingga diperoleh hasil yang optimal.

Oleh karena itu, Bank Victoria Syariah pada tahun 2017 dapat membukukan laba, yang mana pada 2 (dua) tahun sebelumnya masih merugi, pertumbuhan pembiayaan yang positif dengan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* – NPF) yang terkendali, mampu menjaga posisi likuiditas dan hasil *self assessment*-nya menghasilkan profil risiko yang *low to moderate* dan peringkat GCG adalah baik. Berdasarkan hal tersebut, hasil *assesment* untuk nilai tingkat kesehatan bank menghasilkan nilai Peringkat Komposit adalah 2.

Capaian ini merupakan bukti bahwa Bank Victoria Syariah memiliki komitmen untuk melanjutkan transformasi serta didasari keyakinan dengan sinergi dapat mencapai kinerja bank yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Kondisi Makro Ekonomi dan Pertumbuhan Industri Perbankan

Tahun 2017 merupakan momentum yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global tahun 2008, pertumbuhan ekonomi global meningkat yang didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi hampir seluruh negara. Sementara itu risiko geopolitik global maupun kebijakan normalisasi negara-negara maju yang semula dikhawatirkan akan memberikan tekanan pada perekonomian global, selama tahun 2017 relatif tidak signifikan dampaknya.

Dari sisi domestik, reformasi struktural yang konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah mulai memperlihatkan hasilnya, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dikisaran 5 - 5.1%, nilai tukar Rupiah yang relatif stabil, inflasi yang rendah (3.61% YoY), keseimbangan eksternal yang membaik ditandai oleh surplus neraca perdagangan sebesar USD 11.8 miliar, defisit APBN yang terkendali diangka 2.42% terhadap PDB, serta kecenderungan suku bunga yang terus menurun.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian domestik, stabilitas sektor keuangan dan perbankan juga terjaga dengan baik. Capaian ini merupakan modal yang penting bagi industri untuk dapat tumbuh lebih baik dan meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan industri perbankan cukup menggembirakan, per Desember 2017, rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tercatat sebesar 23.36%. Kuatnya permodalan perbankan ini juga diikuti dengan likuiditas yang memadai. Pada Desember 2017 rasio Alat Likuid per *Non-Core Deposit* (AL/NCD) perbankan tercatat sebesar 90.48%, diatas *threshold*, sementara *excess reserve* perbankan tercatat dikisaran Rp. 626 Triliun.

Intermediasi perbankan juga mengalami pertumbuhan yang sejalan dengan kinerja perekonomian domestik. Kredit perbankan pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 4,782 Triliun atau tumbuh sebesar 8.35% yoy, sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 5,289 Triliun atau tumbuh 9.35% yoy. Pertumbuhan intermediasi perbankan juga diikuti dengan trend penurunan suku bunga, yang mana sepanjang tahun 2017, suku bunga deposito turun sebesar 65 bps dan suku bunga kredit turun 77 bps.

Dari sisi risiko, khususnya kredit ditahun 2017 relatif terkendali. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Desember 2017 tercatat masing-masing sebesar 2.59% dan 1.11%.

Kinerja Keuangan Bank Victoria Syariah

Kinerja Bank Victoria Syariah selama tahun 2017 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Total Aset tercatat sebesar Rp. 2,003 Triliun meningkat 23.25% atau Rp. 378 Milyar dibandingkan tahun 2016. Pembiayaan pada akhir tahun 2017 tercatat sebesar Rp.1,26 Triliun meningkat 4.14% dibandingkan tahun 2016.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp. 1,51 Triliun tumbuh 25.44% atau naik Rp. 306 Milyar dibandingkan tahun 2016, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Victoria Syariah.

Dari sisi kualitas pembiayaan, NPF (*gross*) pada akhir Desember 2017 sebesar 4.59%, menurun apabila dibandingkan NPF (*gross*) pada tahun 2016 sebesar 7.21%. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Victoria Syariah untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi *stakeholders*.

Perbandingan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan perbaikan dari 131.34% pada tahun 2016 menjadi 96.02% pada tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa program efisiensi berjalan dengan baik dan BOPO berada dalam koridor batasan yang ditentukan regulator.

Dan hasil dari pertumbuhan portofolio pembiayaan, pengelolaan kualitas aset dan program efisiensi, pada tahun 2017 ini Bank Victoria Syariah membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp. 6,1 Milyar, yang mana hal ini jauh membaik dibandingkan tahun 2016 yang masih mencatat kerugian tahun berjalan sebesar Rp. 27,9 Milyar.

Hasil capaian tahun 2017 mendorong rasio-rasio keuangan Bank Victoria Syariah membaik dibandingkan dengan tahun 2016.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, PT Bank Victoria International, Tbk selaku pemegang saham pengendali selalu berkomitmen dalam memperkuat permodalan, dan pada tahun 2017, menambah setoran modal sebesar Rp. 100 Milyar sehingga total modal Bank Victoria Syariah menjadi Rp. 310 Milyar atau tumbuh 47.61% dibandingkan modal disetor pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 210 Milyar.

Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah merupakan aset penting perusahaan dan kualitas SDI menjadi kunci penting guna terwujudnya perkembangan usaha yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pengembangan SDI menjadi fokus dan pengembangan SDI masih diprioritaskan kepada *frontliner* bank.

Disamping itu penerapan pengelolaan kinerja SDI berdasarkan *key performance indicator* dijalankan dengan baik yang disertai dengan evaluasi penerapan budaya kerja yang peduli pada risiko dan kepatuhan, diharapkan akan mendorong kinerja Bank Victoria Syariah ke arah yang lebih baik sesuai Visi dan Misi Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang memperhatikan prinsip syariah merupakan suatu kerangka kerja yang didorong untuk dijalankan pada setiap aktivitas Bank Victoria Syariah, yang mana tujuannya adalah untuk membangun Bank Umum Syariah yang tangguh dan berdaya saing.

Kerangka kerja dalam pelaksanaan GCG, Bank Victoria Syariah konsisten menggunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan Kewajaran (*fairness*), yang mana hasil *self assessment* atas penilaian GCG Bank Victoria Syariah untuk tahun 2017 adalah 2 (baik).

Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* – CSR)

Bank Victoria Syariah menyadari bahwa proses bisnis tidak semata-mata berpijak pada perolehan keuntungan saja, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selama tahun 2017, Bank Victoria Syariah telah menjalankan program CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya, antara lain pemberian bantuan dana pendidikan, pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan, pemberian santunan kepada anak yatim dan dhuafa, pemberian bantuan untuk biaya kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, penyerahan hewan qurban.

Apresiasi

Menutup laporan ini, perkenankan kami atas nama Direksi Bank Victoria Syariah menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada segenap nasabah, karyawan, Pemegang Saham, dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan Bank Victoria Syariah.

Dengan komitmen dan bersinergi serta dukungan dari pemangku kepentingan, maka Insya Allah Bank Victoria Syariah dapat terus berkiprah memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan kami percaya dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, Bank Victoria Syariah dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi perbankan nasional, khususnya perbankan syariah.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhai upaya kita bersama untuk mengembangkan Bank Victoria Syariah yang berkualitas dan menjadikan Bank Victoria Syariah menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat.

Wabillahi Taufik walhidayah
Wassallamualaikum Wr Wb



Firman Ananda Moeis
Direktur Utama

Jajaran Dewan Direksi





Laporan Dewan Pengawas Syariah

Board of Sharia Supervisory's Report

Prof DR. H. Hasanuddin AF. MA
Chairman of Sharia Supervisory

Bismillahirrohmanirrohim
Assalammualaikum Wr Wb

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan nikmat- Nya sehingga Bank Victoria Syariah ditahun 2017 berhasil mencatat perkembangan dan kinerja usaha yang positif. Ditengah kondisi perekonomian yang masih tertekan kinerja Bank Victoria Syariah berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2017 memperlihatkan adanya pertumbuhan yang sangat positif, baik pada sisi jumlah Aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga serta hasil laba usaha ditahun berjalan.

Keadaan ini tentu tidak terlepas dari usaha, kerja keras dari seluruh pihak di Bank Victoria Syariah dan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat secara umum dan khususnya nasabah terhadap kinerja Bank Victoria Syariah. Amanah yang diberikan oleh masyarakat dan nasabah tentu haruslah dijaga dan dipertahankan dengan baik.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan dan penerapan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak pernah berhenti untuk terus menerus mengawasi memastikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah didalam kegiatan operasional Bank Victoria Syariah, sebagai upaya memperkuat dan mempertahankan agar amanah tersebut terjaga dengan baik.

DPS menyampaikan usulan, pendapat, arahan dan opini serta memberikan persetujuan disetiap pertemuan rutin yang dilaksanakan dalam rangka tetap menjaga, memenuhi dan mematuhi pelaksanaan prinsip syariah didalam kegiatan operasional perbankan Bank Victoria Syariah. Lebih lanjut diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara konsisten dapat terjaga dengan baik.

Selain itu kami juga melakukan kajian pelayanan guna memastikan pelayanan kepada nasabah serta penjelasan produk melalui brosur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari pengawasan kami selama tahun 2017 pada prinsipnya tidak ditemukan masalah fundamental pada layanan yang dijalankan oleh petugas kantor cabang.

DPS juga membuat laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

DPS mengamanatkan kepada Manajemen Bank Victoria Syariah agar selalu istiqomah dalam menjalankan operasional bank dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu DPS juga berpesan agar Manajemen terus melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Insani nya atas

pemahaman tentang perbankan syariah sehingga operasional bank dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan dukungan Direksi berserta seluruh jajarannya dalam upaya menjaga konsistensi dan ketaatan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Semoga segala hal yang kita lakukan untuk memajukan Bank Victoria Syariah diberi keberkahan, serta kita semua selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita dapat meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Aamin YRA

Wassalammualaikum Wr Wb

Dewan Pengawas Syariah



Prof DR. H. Hasanuddin AF. MA



Prof DR. Huzaemah Tahido Yanggo. MA

2 BAB 2

Chapter 2





Tinjauan Industri

Tinjauan Bisnis

Tresuri

Sumber Daya Insani

Teknologi Informasi

Operasional

Tinjauan Keuangan

Analisis Kinerja

Tinjauan Industri

Industry Overview



Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Indonesia Tahun 2017 adalah sebesar 5.05% dan sedikit lebih stabil bila dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 5.02%. Diantara negara *emerging market*, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan trend positif. Hal ini dapat diartikan dalam jangka menengah dan jangka panjang perekonomian Indonesia berada dalam kondisi stabil.

Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah memberikan kontribusi paling besar atas pertumbuhan ekonomi tersebut di disamping membaiknya ekspor akibat meningkatnya permintaan dan harga komoditas global. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, yakni 0,91%, konstruksi sebesar 0,67%, perdagangan 0,59% dan pertanian 0,49%.

Sejumlah sektor menjadi fokus pemerintah seperti infrastruktur, pariwisata dan hilirisasi industri tambang dapat menjadi potensi bisnis baru yang memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 tetap terkendali dan sesuai dengan kisaran sasaran inflasi Pemerintah sebesar 4±1%. Inflasi tahun 2017 tercatat sebesar 3,61% yoy, lebih rendah dari tahun 2016 3,02% yoy. Hal ini seiring dengan semakin kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2017 secara umum menunjukkan adanya kenaikan dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 126,67 pada Desember 2016 menjadi 131,28 pada Desember 2017.

Secara rata-rata, nilai tukar Rupiah menguat, kurs naik dari Rp13.436 (2016) menjadi Rp13.536 (2017). Pergerakan rupiah tersebut didukung oleh aliran modal asing yang cukup signifikan sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif.

Sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia telah mendorong optimisme pada perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat pada inflasi yang diperkirakan terkendali, defisit neraca transaksi berjalan yang aman pada kisaran 2,5%-3,0% di tahun 2017 dan 2,5%-3,0% di tahun 2018, serta keseimbangan fiskal yang dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 5,1%-5,5% di tahun 2018, dan pada kisaran 5,1%-5,5% di tahun 2019.

Industri Perbankan Nasional

Aset perbankan nasional pada akhir tahun 2017 tercatat Rp 7.387 Triliun atau tumbuh 9,77% (yoy) dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp 6.730 Triliun. Aset perbankan konvensional menguasai 94,70% pada 2016 berkurang menjadi 96,11% pada tahun 2017.

Sampai akhir tahun 2017, perbankan nasional telah menghimpun DPK sebesar Rp. 5.289 Triliun yang sebelumnya Rp. 4.837 Triliun (Desember 2016) atau tumbuh 9,34% (yoy). Secara *market share*, DPK perbankan konvensional menguasai 94,22% terhadap DPK perbankan nasional. Sedangkan untuk periode yang sama, total kredit perbankan nasional tercatat Rp. 4.782 Triliun, atau tumbuh 8,36% (yoy). Secara *market share*, kredit perbankan konvensional menguasai 94,33% terhadap total kredit perbankan nasional. Secara umum, rasio kinerja perbankan nasional pada akhir tahun 2017 terhadap tahun 2016 terlihat dari Rasio LDR/FDR menjadi 90,41% dari 91,23%. Rasio pertumbuhan kredit mencapai 8,36% dari 9,34%, dengan Rasio NPL mencapai 2,57% dari 2,93%.

Industri Perbankan Syariah

Hingga akhir tahun 2017, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mencapai 201 bank yang terdiri dari 13 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah serta 166 BPR syariah. Sampai Desember 2017, *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 3,89% atau dengan total aset Rp. 226 Triliun. Secara aset, perbankan syariah mengalami *growth* sebesar 18,03% (yoy).

Pada periode yang sama, DPK perbankan syariah sudah mencapai Rp. 238 Triliun atau tumbuh 15,50% (yoy). Secara *market share*, DPK perbankan syariah menguasai 4,51% terhadap total DPK perbankan nasional.

Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah per Desember 2017 sebesar 6,99%. Secara *market share*, posisi pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp. 189 Triliun atau menguasai 3,97% terhadap total pembiayaan perbankan nasional.

Tinjauan Bisnis

Business Overview



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tercermin juga pada kinerja pertumbuhan sektor perbankan domestik, namun penyaluran kredit tidak terlalu ekspansif. Industri perbankan masih menghadapi masalah dengan masih tumbuhnya kredit atau pun pembiayaan bermasalah di sejumlah sektor ekonomi, seperti properti, perdagangan, retail maupun industri-industri pendukungnya. Perkembangan ini terutama berdampak pada prioritas program kerja maupun kinerja pada segmen Bisnis Komersial pada tahun tersebut.

Bank Victoria Syariah melanjutkan upaya-upaya menata bisnis dan pengelolaan pembiayaannya, terutama untuk mengantisipasi memburuknya kualitas *portofolio* pembiayaan. Bank Victoria Syariah melakukan sejumlah langkah untuk menangani masalah tersebut. *Portofolio* pembiayaan yang bermasalah dialihkan untuk ditangani oleh Divisi *Special Asset Management* secara terpisah dan efektifitas dan optimalisasi kinerjanya terus ditingkatkan. Unit ini berfungsi untuk secara proaktif mengidentifikasi aset-aset pembiayaan yang berpotensi menjadi bermasalah dalam situasi perekonomian saat ini, dan kemudian melakukan pengelolaan atas *portofolio* tersebut, yang mana upayanya termasuk melalui restrukturisasi pembiayaan, agar aset-aset tersebut dapat kembali menjadi produktif.

Mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal Bank Victoria Syariah, maka tahun 2017 Manajemen Bank Victoria Syariah tetap fokus melakukan perbaikan dan mengoptimalkan pertumbuhan bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

Penyaluran pembiayaan dilakukan lebih selektif dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta dalam penyaluran pembiayaan selalu memperhatikan sektor industri mana yang baik dan memperhitungkan tingkat risiko sesuai *risk appetite* Bank.

Selain itu Bank Victoria Syariah selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempercepat proses pelayanan melalui peningkatan peran dan kualitas Sumber Daya Insani, khususnya yang mendukung bidang pembiayaan serta secara konsisten memperbaiki *account management*, agar risiko pembiayaan dapat diminimalkan dalam rangka menciptakan risiko kredit yang rendah.

Bisnis Komersil

Jenis-Jenis Pembiayaan Komersil

Pembiayaan komersial Bank Victoria Syariah terdiri dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, yang bertujuan untuk usaha-usaha yang produktif.

Strategi Pengembangan Bisnis Pembiayaan Komersil

Menghadapi kondisi perekonomian sepanjang tahun 2017, Bank melakukan inisiatif strategis dibidang pembiayaan komersial antara lain sebagai berikut :

- Melakukan ekspansi pembiayaan kepada sektor industri yang masih prospektif dengan lebih selektif, yang diutamakan adalah untuk nasabah *existing* yang mempunyai *track record* baik.
- Melanjutkan model bisnis *value chain* dan program *linkage* guna mendapat prospek bisnis yang dapat dikembangkan.
- Mengoptimalkan peran kantor cabang dan Divisi Komersial Kantor Pusat untuk melakukan penetrasi pasar guna menasar sektor unggulan, sesuai dengan potensi daerah dan segmen nasabah.
- Mempererat sinergi dengan PT Bank Victoria International, Tbk, selaku pemilik PT Bank Victoria Syariah dalam rangka pengembangan bisnis komersial.
- Mendorong aktivitas operasional nasabah pada Bank Victoria Syariah, sehingga dapat meningkatkan *cross selling* dengan pendanaan, khususnya dalam meningkatkan *portofolio* giro dari nasabah dalam rangka peningkatan CASA ratio Bank.

Dengan inisiatif strategis yang telah dilakukan pada tahun 2017, pertumbuhan *outstanding* Pembiayaan Komersial relatif baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Porsi pembiayaan komersial di Bank Victoria Syariah adalah 60,37% dari total *portofolio* pembiayaan.

Pembiayaan Kepada Sektor Industri *Multifinance*

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor industri *multifinance* di tahun 2017 naik cukup signifikan dengan tumbuh 82,73% dari posisi Rp. 227 Miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 415 Miliar di tahun 2017. Upaya yang berkesinambungan membuahkan hasil pertumbuhan tersebut. Dan porsi pembiayaan kepada sektor industri *multifinance* dari keseluruhan *portofolio* pembiayaan Bank Victoria Syariah di tahun 2017 mencapai 32.93%, hal ini meningkat 14.16% dari porsi sebelumnya di tahun 2016 yang sebesar 18.8%.

Bank Victoria Syariah akan tetap mempertahankan pertumbuhan pembiayaan *multifinance* yang telah dicapai di tahun 2017 dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta akan menasar kepada perusahaan *multifinance* yang sehat dengan prospek bisnis yang mendukung.

Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro

Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro di tahun 2017 menurun porsinya dari total pembiayaan Bank Victoria Syariah, yang mana hal ini merupakan strategi Bank yang lebih menguatkan bisnisnya yang ditunjang oleh infrastruktur yang tersedia. Namun demikian Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk

menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM sesuai dengan ketentuan regulator.

Bisnis Ritel

Sejalan dengan strategi Bank Victoria Syariah dalam melakukan *reprofiling* segmentasi bisnisnya, maka segmentasi bisnis ritel difokuskan dalam pendanaan, melakukan evaluasi produk, pengembangan model bisnis dan proses bisnis serta mendorong perolehan pendanaan dan referensi pembiayaan yang disesuaikan dengan potensi daerah dimana kantor cabang berada.

Jenis Pembiayaan Konsumer

Jenis Pembiayaan Konsumer yang dimiliki Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)
PPR merupakan pembiayaan pemilikan rumah untuk perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah membiayai pembelian rumah yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati.
2. Pembiayaan Pemilikan Mobil (PPM)
3. Pembiayaan Multiguna (PMG)

Strategi Bisnis Pembiayaan Konsumer ke depan

Strategi bisnis di tahun 2017 yang akan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis Pembiayaan Konsumer adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan produk pembiayaan PPR yang sesuai dengan kebutuhan pasar, selaras dengan produk yang dikembangkan oleh *developer*.
2. Meningkatkan jumlah kerja sama *developer*, *agent property*, *travel agent* dan *dealer*.
3. Mengembangkan program khusus "*company collective*" untuk pembiayaan kepada karyawan perusahaan/institusi.
4. Menyempurnakan "*Business Process*" dengan mengembangkan sistem untuk meningkatkan *approval service level* kepada nasabah.

Pendanaan Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah mengedepankan pertumbuhan yang berimbang antara pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga pada rasio yang menguntungkan bagi Bank. Di samping itu Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan berusaha menekan DPK berbagi hasil tinggi untuk mengoptimalkan *net imbalan*.

Pencapaian di Tahun 2017

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun Bank tahun 2017 mencapai Rp 1.511 Milyar mengalami pertumbuhan 25.44% bila dibandingkan dengan posisi tahun 2016. Kenaikan Dana Pihak Ketiga tahun 2017 terutama disumbangkan dari deposito berjangka seiring membaiknya produktivitas dari pendanaan jaringan kantor.

Kontributor dari kenaikan DPK pada tahun 2017 bersumber dari Deposito Berjangka yang tercatat

sebesar Rp. 1.430 Milyar naik 26.85% dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun untuk deposito sebesar eq. 6%-7.25% mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar eq. 8%-9%.

Langkah Strategi Bisnis DPK ke depan

Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah akan fokus untuk meningkatkan jumlah dana *retail* dibawah Rp. 2 Milyar dan meningkatkan dana CASA secara proaktif dengan penekanan pada pendanaan dari institusi yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan *marketing communication* dengan industri keuangan lainnya seperti gerakan ekonomi syariah dan *iB Vaganza*
2. Meningkatkan pertumbuhan dana ritel melalui kegiatan *open table*, pameran atau kunjungan langsung ke nasabah yang berada dipusat-pusat perdagangan, perbelanjaan atau perkantoran.
3. Meningkatkan kerjasama strategis (aliansi strategis) dengan cara melakukan pemetaan terhadap komunitas, perusahaan-perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi Pemerintah dan BUMN yang berpotensi, serta secara aktif melakukan pendekatan agar komunitas, perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi Pemerintah dan BUMN mau menggunakan produk Bank Victoria Syariah.

Tresuri

Divisi Tresuri menjalankan fungsi yang penting dalam pengelolaan likuiditas bagi sebuah Bank. Selain itu Divisi Tresuri juga merupakan Unit Bisnis yang memberikan kontribusi pendapatan bagi bank atas aktivitas penempatan aktiva produktif, baik dana antar bank, surat berharga atau investasi lainnya misalnya dalam pasar uang.

Sekalipun margin dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) maupun FasBis terus menurun dalam satu tahun terakhir, Bank Victoria Syariah cukup berhasil mengupayakan alternatif investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang memadai atas penempatan dana tresuri. Divisi Tresuri mengelola likuiditas bank sehingga kegiatan aktivitas bank baik disisi *asset* maupun *liabilities* dapat berjalan lancar sesuai dengan fungsi ALMA, termasuk dalam penentuan dan pengelolaan nisbah bagi hasil untuk meminimalkan biaya serta mengatur posisi pada tingkat risiko yang aman dan terhindar dari risiko likuiditas.

Peningkatan peranan Divisi Tresuri sebagai penghasil laba dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah melalui analisa yang kuat dan komprehensif, sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Untuk mencegah hal tersebut maka tresuri sangat berhati-hati dan selektif dalam melakukan investasi pada surat berharga. Surat berharga yang

dimiliki sebagai portofolio pada umumnya adalah surat berharga pemerintah yang *zero risk* atau surat berharga korporasi yang memiliki *rating investment grade*.

Selama tahun 2017 kebutuhan likuiditas bank masih terkendali dan manajemen risiko likuiditas bank telah dilaksanakan dengan selalu menjaga risiko likuiditas tetap rendah.

Tresuri

Treasury



Unit kerja tresuri menjalankan fungsi yang penting dalam pengelolaan likuiditas, dimana tresuri mengatur dana yang masuk dan keluar dengan hati-hati dan seksama, mengacu pada regulasi OJK dan aturan Internal Bank. Selain itu Unit kerja tresuri juga menghasilkan *income* dari penempatan dana pada instrumen surat berharga ataupun aktivitas tresuri lainnya.

Dalam mengatur dana untuk menjaga likuiditas, Unit kerja tresuri menempatkan dana dalam beberapa instrumen keuangan yang bersifat *short term*, seperti *interbank Over Night (O/N)* dan *FasBis* maupun yang bersifat *long term* seperti *Sukuk Corporate*, *Reksadana Syariah* maupun *Surat Berharga Syariah Negara*.

Tresuri juga mengelola struktur neraca bank secara berkesinambungan untuk menjadi pendapatan dari pasar uang dan nilai pasar seluruh portofolio neraca tetap stabil dan positif. Pendapatan dari tresuri harus dimaksimalkan sehingga dapat menambah penghasilan bagi bank.

Selain itu pada sisi lain Unit kerja tresuri juga harus mengelola risiko dengan baik sehingga risiko kerugian dapat ditekan. Untuk itu Unit kerja Tresuri melakukan semua transaksi melalui analisa yang kuat dan matang serta secara harian melakukan monitoring secara konsisten.

PRIORITAS 2018

Rencana ke depan yang di fokuskan Unit Kerja Tresuri adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target bisnis bank khusus tresuri serta keputusan manajemen dalam bidang tresuri.
2. Optimalisasi akses likuiditas dan melakukan tata kelola menjaga likuiditas.
3. Penyusunan dan evaluasi rencana bisnis tresuri.
4. Penyusunan dan evaluasi sistem operasi prosedur (SOP) dan pedoman tresuri serta pengembangan sistem tresuri.
5. Penyusunan kebijakan dan pengelolaan aspek kepatuhan dan administrasi.
6. Meningkatkan profesionalisme *treasurer*.

Sumber Daya Insani

Human Resources



Pada Tahun 2017 Bank Victoria Syariah terus berupaya mengembangkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Insani untuk dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pengelolaan SDI difokuskan pada evaluasi kebijakan dan peningkatan kompetensi dalam pelayanan yang berprinsip syariah, yang dimulai proses seleksi dan rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja yang diikuti dengan program pengembangan karir hingga program-program retensi.

1. Seleksi dan Rekrutmen

Untuk memperkuat organisasi, setiap tahun Bank Victoria Syariah melakukan seleksi karyawan yang ada dan atau proses rekrutmen melalui *website*, kerjasama dengan grup usaha, atau *experience hire*. Para karyawan baru tersebut akan diberikan pelatihan berupa induksi agar dapat memahami visi dan misi serta nilai perusahaan dengan lebih baik.

Selama tahun 2017, jumlah karyawan yang telah direkrut sebanyak 24 orang, dimana perekrutan tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional maupun administrasi dengan memperhatikan komposisi yang seimbang antara *support* dan bisnis. Jumlah karyawan Bank Victoria Syariah saat ini adalah 221 orang.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2017 program pelatihan karyawan diutamakan pada pengetahuan tentang teknis operasional perbankan syariah, penanganan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), fungsi kepatuhan serta *sharing session* unit kerja.

Pelatihan dilakukan secara *in-house* dengan pembicara/ narasumber dari pihak internal bank dan/atau eksternal sehingga setiap karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dan selama tahun 2017, Bank Victoria Syariah telah melaksanakan pelatihan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Perkreditan / <i>Treasury</i>	2
2.	<i>Customer Relationship Skill</i>	41
3.	<i>Leadership</i>	49
4.	Manajemen Risiko	32
5.	Manajemen Umum	125
6.	Teknologi Informasi	7
7.	Audit	13
8.	Manajemen Perbankan	13
9.	Pelaporan Bank	5
10.	Sosialisasi Ketentuan Perbankan	428

Disamping pelatihan tersebut di atas Bank Victoria Syariah secara konsisten melaksanakan doa bersama, *morning briefing* dan pemberian semangat, agar SDI memiliki kesamaan visi dan misi serta memahami rencana bisnis bank.

3. Program Retensi

Bank Victoria Syariah melaksanakan program *employee engagement* untuk mempertahankan SDI yang berprestasi dan berpotensi dan dikembangkan melalui berbagi kegiatan antara lain:

- Pemberian penghargaan “Bank Victoria Syariah Hebat” kepada karyawan yang berprestasi.
- Program pengembangan karir
- Peningkatan kesejahteraan karyawan.
- Penyelenggaraan kegiatan lain, antara lain olah raga dan musik.

4. Pengelolaan Kinerja

Untuk mendorong karyawan agar senantiasa berupaya mencapai kinerja yang optimal, Bank Victoria Syariah mendorong penerapan dan perbaikan seluruh tahapan dalam proses pengelolaan kinerja yang mencakup penyusunan Indikator Kinerja Utama dan pembinaan periodik dari atasan kepada bawahan dalam memantau pencapaian target kerja.

Untuk pelaksanaan penilaian kinerja karyawan menggunakan parameter yang terukur berupa *key performance indicator* (KPI) yang menjadi dasar obyektif pemberian *rewards*.

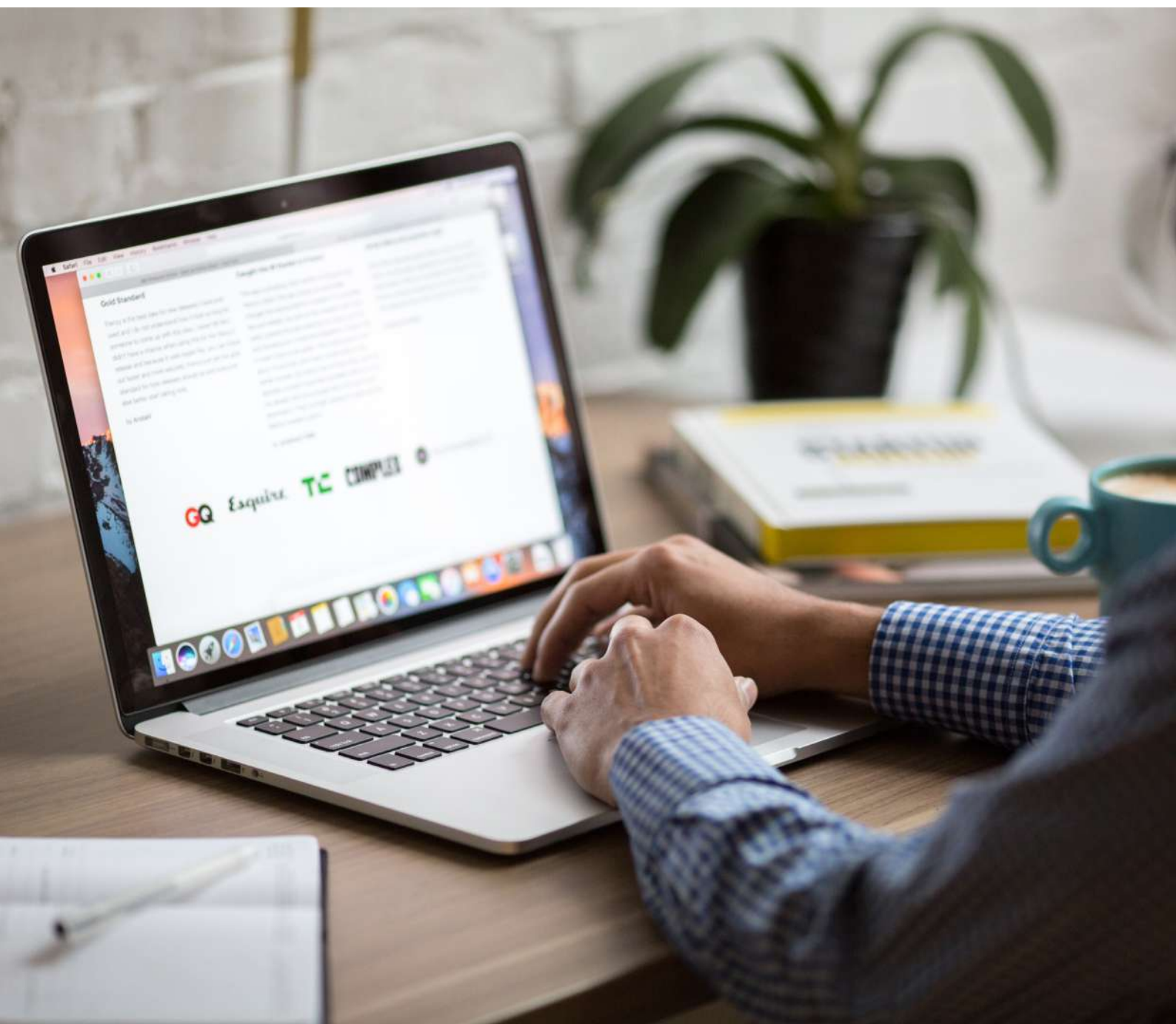
RENCANA KE DEPAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI

Rencana pengembangan sumber daya insani untuk tahun mendatang adalah menyiapkan *performance oriented personnel* sebagai *key driver* pertumbuhan bisnis yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, melalui strategi utama adalah sebagai berikut:

- Membentuk *Performance Oriented Culture*
Menerapkan *Performance Management Process* di seluruh organisasi yang didukung oleh *key performance indicator* yang jelas dan transparan, serta mekanisme *reward* yang kuat dan adil.
- Melengkapi Cabang dengan tim yang cukup dan kompeten
Menempatkan *Branch Manager* yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk memimpin Kantor Cabang dan didukung oleh *sales team* yang cukup, disiplin & agresif dalam melakukan penetrasi pasar.
- Memperkuat *Talent Pool*
Memiliki data terkait *talent pool* di Kantor Pusat dan Cabang dengan profil dan kompetensi yang sesuai (*right number, right people on the right place*) yang didukung oleh organisasi yang baku (sebagai *baseline* untuk *recruitment* dan menciptakan *alignment equality*).
- Menerapkan *Code of Conduct*
Setiap insan Bank Victoria Syariah yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan *Code of Conduct* dalam aktivitas sehari-hari. Dan salah satu tanggung jawabnya adalah melaporkan setiap tindakan karyawan lain yang diyakini merupakan pelanggaran *Code of Conduct* dan menyampaikannya melalui mekanisme *Whistleblowing* kepada Unit Kerja Anti *Fraud*.

Teknologi Informasi

Information Technology



Perkembangan Teknologi Informasi (TI) di industri perbankan saat ini telah mengubah strategi bisnis bank dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Teknologi Informasi (TI) merupakan pilar penting dalam mendukung kegiatan usaha perbankan dalam memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan kompleks.

Bank Victoria Syariah senantiasa memperkuat infrastruktur TI untuk memastikan bank memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam memenuhi pertumbuhan permintaan layanan transaksi perbankan, baik melalui jaringan cabang maupun jaringan elektronik untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan nasabah.

Terkait dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur TI, Bank Victoria Syariah menerapkan kebijakan yang mencakup tiga hal pokok sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola TI yang baik.
2. Pengembangan sistem dan aplikasi.
3. Memperkuat kinerja *hardware* dan infrastruktur TI sesuai dengan kebutuhan.

Penerapan Tata Kelola TI yang Baik

Mengingat bahwa Teknologi Informasi merupakan aset penting dalam operasional, dan dalam penyelenggaraannya mengandung berbagai risiko, maka Bank perlu menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi. Penerapan tata kelola teknologi informasi dilakukan melalui penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan Strategi bisnis bank, optimalisasi Sumber Daya Insani, pemanfaatan Teknologi Informasi (*IT values Delivery*), pengukuran kinerja dan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Dalam pengimplementasian Teknologi Informasinya Bank Victoria Syariah senantiasa memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta memperhatikan rencana pelaksanaan (*road map*) untuk memenuhi kebutuhan saat ini (*current state*), serta kondisi yang ingin dicapai (*future state*), ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan serta manfaat yang akan diperoleh dalam penerapannya.

Pengelolaan Teknologi Informasi di Bank Victoria Syariah dilakukan secara mandiri dan terpisah dari infrastruktur TI induk perusahaan (PT Bank Victoria International Tbk), namun Bank Victoria Syariah selalu bersinergi dengan induk di beberapa area yang dapat meningkatkan efisiensi di sisi operasional TI.

Dalam mengembangkan Teknologi Informasi (TI) Bank Victoria Syariah telah membangun sistem dan prosedur yang secara konsisten diterapkan untuk memastikan setiap tahap pengembangan dapat dilakukan dengan baik. Disamping itu secara periodik dilakukan *Quality Assurance*, baik oleh pihak internal maupun eksternal untuk memastikan pelaksanaan Tata kelola TI telah berjalan sebagaimana mestinya.

Bank Victoria Syariah dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas sumber daya Insani melalui program pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan secara internal maupun bekerjasama dengan PT Bank Victoria International Tbk selaku Bank Induk.

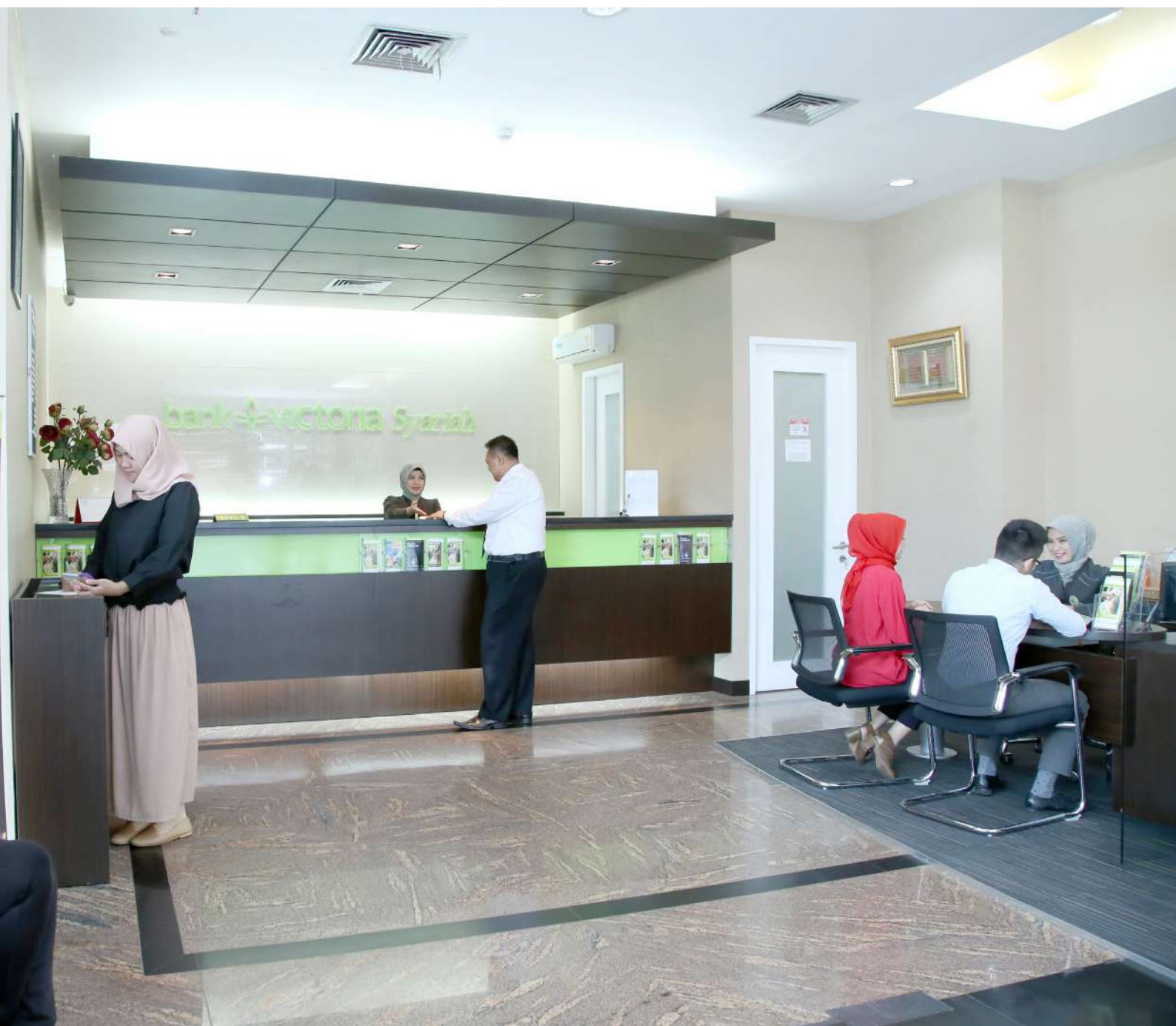
Komite Teknologi Informasi dibentuk untuk *me-review* dan merekomendasikan rencana strategis agar sejalan dengan rencana bisnis bank, melakukan evaluasi secara berkala guna mendukung kegiatan usaha bank dan memastikan investasi yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah kepada bank serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Tahun 2017 beberapa implementasi untuk Teknologi Informasi (TI) yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bank Victoria Syariah terus melakukan penyesuaian Sistem Teknologi Informasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh regulator seperti SLIK, LSMK dan ATM Kartu *Chip*.
2. Penataan ulang pada infrastruktur jaringan dengan titik berat pada *availability* jaringan, *monitoring* dan *management network* agar dapat meningkatkan *Service Level Agreement* (SLA) performansi operasional.
3. Agar lebih optimal dalam mendukung perkembangan bisnis kedepan, Bank Victoria Syariah meninjau ulang topologi jaringannya untuk dapat mendukung operasional *production* dan *Disaster Recovery*
4. Optimalisasi dan meningkatkan *level security* untuk mencegah gangguan keamanan jaringan.
5. Untuk meningkatkan *level security*, Divisi TI juga memperbaharui sistem *anti virus* dengan sistem yang lebih handal dan lebih lengkap untuk mencegah berbagai *threat* seperti *virus*, *spam* dan *worm* di jalur jaringan internet, intranet, surat elektronik (*electronic mail* atau *e-mail*) server serta *PC client*.

Operasional

Operational



Operasional merupakan suatu bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam bisnis perbankan, sehingga operasional dalam sebuah bank harus diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sejalan dengan hal tersebut, peran *Team Operations* semakin ditingkatkan dengan memperkuat *Team Operations* sebagai tim yang kuat (*robust*) yang mampu menyiapkan upaya-upaya terobosan proses operasional dengan mengoptimalkan proses agar lebih efektif dan efisien, sekaligus upaya meminimalisasi potensi risiko operasional.

Guna mendukung tercapainya misi dan visi Bank Victoria Syariah, *Team Operations* meletakkan 4 fungsi dan peranan operasi yang mendasar yaitu :

1. *Service delivery*, memberikan layanan kepada seluruh *stakeholders* secara tepat waktu, akurat, handal dan biaya yang efektif.
2. *Business Partner*, menjadi *partner* yang aktif dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
3. *Compliance Agent*, Melandasi seluruh kegiatan operasional pada ketentuan internal dan eksternal yang ditetapkan.
4. *People Management*, membangun lingkungan kerja yang *challenging & fun* berdasarkan nilai nilai dan budaya perusahaan.

Rencana kedepan, *Team Operations* akan terus melanjutkan upaya-upaya pengembangan operasional guna mendukung pengembangan usaha Bank Victoria Syariah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di industri perbankan syariah.

Prioritas 2018

1. Menyempurnakan berbagai proses dan infrastruktur serta mengoptimalkan perbaikan sistem dan prosedur guna mendukung efisiensi dan efektivitas layanan kepada seluruh *stakeholders*.
2. Meningkatkan produktivitas melalui tinjauan komprehensif terhadap SLA
3. Menyiapkan infrastruktur operasional bekerja sama dengan Bank Induk dalam mempersiapkan Layanan Syariah Bersama (LSB)
4. Melakukan perbaikan proses administrasi pembiayaan dengan mengoptimalkan teknologi guna mendukung program efektivitas dan efisiensi proses, sekaligus meminimalisasi potensi kerugian operasional.
5. Memperkuat dan melengkapi Sumber Daya Insani *unit operations* melalui program internal *development*, *professional hiring* dan secara berkesinambungan membangun kesadaran atas pentingnya pengelolaan risiko.

Tinjauan Keuangan

Financial Overview



Sampai dengan tahun 2017, PT Bank Victoria Syariah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Per akhir 2017, aset PT Bank Victoria Syariah telah mencapai sebesar Rp. 2.003 Milyar, pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 1,263 Milyar, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai sebesar Rp. 1,511 Milyar.

Perkembangan Ekonomi Dan Industri Perbankan

Sampai dengan akhir tahun 2017, Perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, kondisi tersebut masih terdapat berbagai tantangan di tengah pemulihan perekonomian global baik pada negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Mengantisipasi berbagai dampak perkembangan ekonomi global dan regional yang belum stabil, pada aspek kebijakan moneter, Bank Indonesia di tahun 2017 ini telah melakukan reformulasi kebijakan suku bunga acuan, dengan mengubah acuan suku bunga dari *BI Rate* dengan *BI 7-Day Repo Rate*. Langkah ini dilakukan bukan untuk mengubah sikap kebijakan, namun dilakukan untuk menyempurnakan transmisi kebijakan moneter. Bank Indonesia juga telah melakukan pelonggaran kebijakan moneter dan *macroprudensial*. Ke depan, Bank Indonesia melihat masih terdapat peluang untuk melakukan pelonggaran kebijakan, tentunya dengan selalu melihat dinamika perekonomian yang terjadi. Dari sisi perkembangan pembiayaan, walaupun saat ini pertumbuhan pembiayaan masih belum optimal, Bank Indonesia optimis di tahun 2017 masih terdapat potensi peningkatan, seiring dengan mulai terjadinya pemulihan harga komoditas.

Pada tahun 2017, perekonomian Indonesia tumbuh 5,07% (*year on year/yoy*), menguat dibandingkan 2016 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 9,09 persen.

Sedangkan ekonomi Indonesia triwulan IV-2017 bila dibandingkan triwulan IV-2016 (*yoy*) tumbuh 5,19 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,25 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa sebesar 8,50 persen.

Inflasi sampai dengan akhir 2017 tetap terkendali dan sesuai dengan kisaran sasaran inflasi Pemerintah sebesar 4±1%. Inflasi tahun 2017 tercatat sebesar 3,61% *yoy*, lebih rendah dari tahun 2016 3,02% *yoy*. Hal ini seiring dengan semakin kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2017 secara umum menunjukkan adanya kenaikan dengan kenaikan indeks harga konsumen dari 126,67 pada Desember 2016 menjadi 131,28 pada Desember 2017.

Secara rata-rata, nilai tukar Rupiah sudah mengalami

penguatan dari Rp. 13.436 (2016) menjadi Rp. 13.536 (2017). Pergerakan rupiah tersebut didukung oleh aliran modal asing yang cukup signifikan sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif.

Sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia telah mendorong optimisme pada perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat pada inflasi yang diperkirakan terkendali, defisit neraca transaksi berjalan yang aman pada kisaran 2,5%-3,0% di tahun 2017 dan 2,5%-3,0% di tahun 2018, serta keseimbangan fiskal yang dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 5,1%-5,5% di tahun 2018, dan pada kisaran 5,1%-5,5% di tahun 2019.

Industri Perbankan Nasional

Aset perbankan nasional pada akhir tahun 2017 tercatat Rp7.387 triliun atau tumbuh 9,77% (*yoy*) dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp6.730. Aset perbankan konvensional menguasai 94,70% pada 2016 berkurang menjadi 96,11% pada 2017.

Sampai akhir tahun 2017, perbankan nasional telah menghimpun DPK sebesar Rp5.289 triliun yang sebelumnya Rp4.837 triliun (Des 2016) atau tumbuh 9,34% (*yoy*). Secara *market share*, DPK perbankan konvensional menguasai 94,22% terhadap DPK perbankan nasional. Sedangkan untuk periode yang sama, total kredit perbankan nasional tercatat Rp4.782 triliun, atau tumbuh 8,36% (*yoy*). Secara *market share*, kredit perbankan konvensional menguasai 94,33% terhadap total kredit perbankan nasional. Secara umum, rasio kinerja perbankan nasional pada akhir tahun 2017 terhadap 2016 terlihat dari Rasio LDR/ FDR menjadi 90,41% dari 91,23%. Rasio pertumbuhan kredit mencapai 8,36% dari 9,34%, dengan Rasio NPL mencapai 2,57% dari 2,93%.

Industri Perbankan Syariah

Hingga akhir 2017, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mencapai 201 bank yang terdiri dari 13 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah serta 166 BPR syariah. Sampai Desember 2017, *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 3,89% atau dengan total aset Rp. 226 Triliun. Secara aset, perbankan syariah mengalami *growth* sebesar 18,03% (*yoy*).

Pada periode yang sama, DPK perbankan syariah sudah mencapai Rp238 triliun atau tumbuh 15,50% (*yoy*). Secara *market share*, DPK perbankan syariah menguasai 4,51% terhadap total DPK perbankan nasional.

Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah per Desember 2017 sebesar 6,99%. Secara *market share*, posisi pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp. 189 Triliun atau menguasai 3,97% terhadap total pembiayaan perbankan nasional.

Analisis Kinerja

Performance Analysis



ANALISIS KINERJA USAHA TAHUN 2017

Analisis keuangan yang diuraikan berikut ini mengacu pada laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang disajikan dalam laporan tahunan ini.

Laporan keuangan 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Stephens*) dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material.

ASET BANK

Dengan berbagai kendala yang ada antara lain masih tingginya NPF, permodalan, Sumber Daya Insani dan proses bisnis serta jaringan yang masih belum banyak, Bank Victoria Syariah mampu melewati tahun 2017 dengan baik dan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif.

Total Aset Bank ditahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 23.25% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 1.625.183. juta pada akhir tahun 2016, menjadi Rp 2.003.114 juta pada akhir tahun 2017.

Kontributor utama pertumbuhan aset ditahun 2017 terutama meningkatnya penyaluran pembiayaan yang naik sebesar Rp 50.236 juta atau naik 4,14% yaitu dari sebesar Rp 1.212.689 juta di tahun 2016 menjadi Rp 1.262.926 juta di tahun 2017. Kenaikan aset juga karena meningkatnya penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia sebesar Rp 34.809 juta atau 68,65% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 50.703 juta menjadi Rp 85.512 juta di tahun 2017.

EFEK-EFEK (SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Bank Victoria Syariah berupaya meminimumkan "idle Money" dengan menempatkannya ke dalam instrumen keuangan yang menghasilkan *return* yang menguntungkan dan aman, seperti penempatan pada surat-surat berharga berupa Obligasi yang dikeluarkan Pemerintah, Obligasi Koorporasi maupun Surat Berharga Syariah Negara.

Untuk mengefektifkan peningkatan sumber dana dari pihak ketiga yang belum sepenuhnya dapat disalurkan di pembiayaan, Bank meningkatkan inventasi penyaluran dana dengan pembelian obligasi ataupun Surat Berharga Syariah Negara. Total Surat berharga yang dimiliki Bank akhir 2017 adalah sebesar Rp 320.282 Juta meningkat 35.12% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 237.448 Juta.

Surat Berharga yang dimiliki 71.79% atau Rp 229.946 Juta adalah dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara, dan sisanya sebesar Rp. 90.336 Juta dalam bentuk Sukuk korporasi.

Tingkat pengembalian rata-rata atas Surat Berharga Syariah Negara adalah sebesar 6% sampai dengan 8.75%. Sementara tingkat pengembalian rata-rata untuk Sukuk Korporasi adalah sebesar 8.25% sampai dengan 11.50%.

Seluruh surat berharga yang dimiliki bank mempunyai kualitas lancar.

PEMBIAYAAN

Total pembiayaan yang disalurkan Bank Victoria Syariah sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.262.926 Juta, naik 4.14% atau Rp. 50.236 juta dibandingkan dengan posisi tahun 2016 yang sebesar Rp. 1.212.689 juta.

Pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang moderat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Penyaluran pembiayaan lebih selektif terutama pada sektor-sektor yang dinilai potensial dan mempunyai prospek yang baik.

Pembiayaan berdasarkan Akad

Kontributor utama kenaikan pembiayaan ini dikarenakan naiknya pembiayaan berakad Murabahah sebesar Rp 65.864 juta atau naik 25,36% dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 259.768 juta di tahun 2016 menjadi Rp 325.631 juta di tahun 2017. Di sisi lain pada pembiayaan berakad Musyarakah mengalami penurunan sebesar (Rp. 61.520) juta atau -6,62% dari tahun 2016 yang sebesar Rp 929.535 juta menjadi Rp 868.014 juta di tahun 2017. Komposisi pembiayaan Bank Victoria Syariah pada tahun 2017 dan 2016 berturut-turut sebagai berikut : Musyarakah 68,73% dan 76,65%, Murabahah 25,78% dan 21,42%, Mudharabah 5,08% dan 1,66% serta Ijarah 0,40% dan 0,27%.

Pembiayaan berdasarkan Penggunaan

Struktur komposisi pembiayaan yang disalurkan Bank di tahun 2016 berdasarkan jenis penggunaannya meliputi 80.35% Pembiayaan Modal Kerja, 17.17% dan sisanya 2.48% merupakan pembiayaan untuk konsumsi.

Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing – NPF*)

Kualitas pembiayaan tahun 2017 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2016. *Rasio Non Performing Financing (NPF-Gross)* tahun 2017 adalah 4.59% atau turun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 7,21%. Berbagai upaya telah ditempuh bank untuk menekan pertumbuhan pembiayaan bermasalah tersebut, antara dengan meningkatkan *account management*, pola restrukturisasi, pembentukan team Divisi Aset Manajemen, tindakan persuasif dan melalui upaya litigasi khususnya melalui lelang maupun aset *sales*.

Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk Bank

Mengantisipasi penurunan kualitas pembiayaan di tahun 2017, Bank membentuk tambahan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang mencukupi, sehingga rasio NPF net dapat dijaga pada kisaran dibawah 5 %.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan yang telah dibentuk Bank adalah memadai untuk menutup kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang.

Mutasi Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) untuk masing-masing pembiayaan adalah sebagai berikut :

Mutasi CKPN Pembiayaan Murabahah	2017	2016
Saldo Awal Tahun	21.769	56.441
Pencadangan (Pemulihan) selama tahun berjalan	(7.235)	12.629
Penerimaan kembali pembiayaan hapus buku	8.068	692
Penghapusan	(19.337)	(47.993)
Saldo Akhir Tahun	3.265	21.769

Mutasi CKPN Pembiayaan Musyarakah	2017	2016
Saldo Awal Tahun	20.598	4.066
Pencadangan (Pemulihan) selama tahun berjalan	5.580	18.050
Penerimaan kembali pembiayaan hapus buku	4	-
Penghapusan	(13.974)	(1.518)
Saldo Akhir Tahun	12.208	20.598

Mutasi CKPN Pembiayaan Mudharabah	2017	2016
Saldo Awal Tahun	64	64
Pencadangan (Pemulihan) selama tahun berjalan	648	-
Penerimaan kembali pembiayaan hapus buku	-	-
Penghapusan	-	-
Saldo Akhir Tahun	712	64

PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank tahun 2017 mencapai Rp. 1.511.158 juta, mengalami pertumbuhan 25,44% bila dibandingkan dengan posisi tahun 2016. Kenaikan Dana Pihak Ketiga tahun 2017 terutama disumbangkan dari deposito berjangka seiring membaiknya produktivitas dari pendanaan jaringan kantor.

Kontributor dari kenaikan DPK pada tahun 2017 bersumber dari Deposito Berjangka yang tercatat sebesar Rp. 1.429.921 juta, naik 26,85% dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun untuk deposito adalah sebesar 7%-8%, mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 8%-9%.

Sementara itu untuk jenis dana CASA masih perlu dioptimalkan kembali agar memenuhi target diatas 10% dari DPK.

EKUITAS

Ekuitas Bank akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 299.393 Juta, tumbuh sebesar Rp. 105.063 Juta dibandingkan dengan tahun 2016. Kenaikan ekuitas tahun 2017 terutama disebabkan penambahan modal disetor sebesar Rp. 60.000 juta dana setoran modal Rp 40.000 juta. Di sisi lain bank juga membukukan laba tahun berjalan positif sebesar Rp 4.593 juta.

PENDAPATAN

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank sebagai Mudharib.

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib Bank Victoria Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 153.695 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 31.432 juta atau 25,71% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 122.263 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh Kenaikan Pendapatan dari Bagi hasil yang terdiri dari pendapatan *Multifinance* sebesar Rp 16.148 juta atau 94,96% yaitu dari sebesar Rp 17.022 juta di tahun 2016 menjadi Rp 33.170

juta di tahun 2017, Musyarakah sebesar Rp 8.919 juta atau 17,27% yaitu dari sebesar Rp 51.658 juta di tahun 2016 menjadi Rp 60.577 juta di tahun 2017. Di samping itu kenaikan lainnya juga dikontribusikan oleh kenaikan dari pendapatan usaha utama lainnya yaitu sebesar Rp. 8.164 juta atau sebesar 34,72% dari Rp. 23.514 juta di tahun 2016 menjadi Rp. 31.679 juta di tahun 2017.

POS PENDAPATAN	2016	2015
Pendapatan dari penjualan murabahah	25.332	29.043
Pendapatan dari Bagi Hasil	96.028	69.403
Pendapatan dari Ijarah bersih	655	302
Pendapatan usaha utama lainnya	31.680	23.515
Jumlah Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	153.695	122.263

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer ditahun 2017 mengalami kenaikan Rp. 16.963 Juta atau 20,17% dibanding dengan tahun 2016, dari sebesar Rp. 84.096 juta ditahun 2016 naik menjadi Rp. 101.060 Juta pada tahun 2017. Faktor utama kenaikan ini dikarenakan kenaikan pada saldo Deposito hal ini sejalan dengan kebijakan manajemen untuk menyesuaikan likuiditas untuk menjaga rasio FDR 83,57%, meskipun manajemen sudah berusaha untuk melakukan penurunan nisbah bagi hasil.

Pos Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	2017	2016
Deposito Mudharabah	98.528	76.719
Tabungan Mudharabah	792	2.486
Giro	473	1.493
SIMA	1.267	3.398
TOTAL	101.060	84.096

Beban Operasional Lainnya

Jumlah Beban Operasional Lainnya tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 49.712 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 28.042 juta atau 36,06% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 77.754 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Penurunan Beban CKPN sebesar Rp 32.213 juta atau 101,89% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp 31.614 juta di tahun 2016 menjadi Rp -599 juta di tahun 2017.

Pos Beban Operasional Lainnya	2017	2016
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(599)	31.614
Beban Personalia	29.903	27.162
Beban Umum dan Administrasi	18.886	18.396
Beban Lainnya	1.522	582
Total Beban Operasional Lainnya	49.712	77.754

Laba/Rugi Neto

Jumlah laba *Netto* Bank Victoria Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4.593 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 23.067 juta atau 124,86% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar (Rp 18.473) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kontribusi kenaikan Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebesar Rp 31.432 juta, Penurunan Beban Operasional Rp 28.041 juta.

RENCANA STRATEGIS KE DEPAN

Bank Victoria Syariah ditahun-tahun mendatang akan melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan hasil yang dicapai ditahun 2017 serta prospek pertumbuhan makro ekonomi serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Bank Victoria Syariah mempunyai keyakinan positif untuk melangkah kedepan dengan memanfaatkan potensi dan peluang bisnis perbankan yang ada guna pencapaian kinerja yang terbaik.

Berdasarkan optimisme diatas, Perumusan rencana strategis Bank Victoria Syariah kedepan senantiasa berprinsip dan berpedoman pada aspek-aspek sebagai berikut :

- Fokus pada *core competence* yang dimiliki.
- Menyesuaikan terhadap perubahan bisnis dengan memberikan layanan sesuai kebutuhan nasabah.
- Memberikan pelayanan yang prima (*service excellence*) kepada para nasabah.

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Bank Victoria Syariah kedepan diarahkan menjadi bank Syariah yang berkinerja baik, mampu bertumbuh secara sehat, aman dan *profitable*.

Dalam 3 tahun kedepan Bank Victoria Syariah diarahkan telah mempunyai landasan yang kokoh untuk menjadi Bank syariah berskala menengah serta mempunyai *brand image* yang baik ditengah masyarakat.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendukung rencana kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Struktur permodalan Bank berkomitmen memperkuat struktur permodalan dengan tambahan modal disetor sebesar Rp. 50 Milyar di tahun 2018, Rp. 50 Milyar di tahun 2019, dan di tahun 2020 direncanakan penambahan modal Rp. 50 Milyar, sehingga Modal akan mencapai Rp. 500 Milyar.
2. Meningkatkan penetrasi secara optimal di *value chain Victoria Group (Leverage Group Sinergy)*
3. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan IT agar lebih handal mendukung rencana bisnis Bank.
4. Membangun *brand image* dan produk secara berkesinambungan.
5. Meningkatkan kualitas SDI (*improvement People Capabilities*)
6. Memperkuat pelaksanaan GCG, *Risk Management* dan *Compliance Cultures*

3 BAB 3

Chapter 3





Tata Kelola Perusahaan

1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
2. Komitmen Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan
3. Kerangka Kerja Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan
4. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) atau Prinsip Mengenal Nasabah
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
6. Dewan Komisaris
7. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris
8. Direksi
9. Komite Eksekutif Direksi
10. Dewan Pengawas Syariah
11. Rencana Strategis Bank Tahun 2017
12. Penerapan Fungsi Kepatuhan
13. Fungsi Audit Intern
14. Penyimpangan Internal
15. Audit Eksternal
16. Penerapan Manajemen Risiko
17. Pengendalian Internal
18. Permasalahan Hukum
19. Transaksi dengan Benturan Kepentingan
20. Kode Etik
21. Budaya Perusahaan
22. Perlindungan Nasabah
23. Sekretaris Perusahaan
24. Keterbukaan Informasi
25. Penilaian GCG
26. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2017

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* perseroan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPBs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Secara umum, Bank Victoria Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, professional & fairness*, dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan syariah.

2. Komitmen Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas Bank Victoria Syariah dan keragaman produk dan jasa yang ditawarkan, menjadikan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* sangat penting untuk diterapkan guna membangun kepercayaan yang lebih baik dan memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bank Victoria Syariah memiliki Parameter Keberhasilan Bank dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi dapat maju apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif, yang bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari Sumber Daya Insani Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan kinerja organisasi.

Bank Victoria Syariah terus mendorong Sumber Daya Insani untuk selalu berkarya dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan yaitu *honest, energetic, brilliant, accurate & trust* atau HEBAT.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang diiringi dengan penerapan nilai-nilai perusahaan secara konsisten dapat memacu kinerja Bank Victoria Syariah yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta melindungi kepentingan *stakeholder*.

Bank Victoria Syariah menyadari bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan mendorong peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Kinerja Perseroan yang dicapai pada periode 2017 sebagai berikut.

1. Laba Bersih mencapai Rp 4,6 Miliar
2. Pertumbuhan Aset 23,25% menjadi Rp. 2.003 Miliar
3. Pertumbuhan Pembiayaan 4,14% menjadi Rp 1,263 Miliar
4. Peningkatan Dana Pihak Ketiga 25,44% menjadi Rp 1.511 Miliar
5. Peningkatan total Ekuitas menjadi Rp 299 Milyar naik 54,06%
6. Non Performing Financing (NPF) Netto 4,08%.

3. Kerangka Kerja Bank Victoria Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan

Bank Victoria Syariah senantiasa melakukan penguatan proses penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten dari waktu ke waktu. Penguatan Penerapan GCG mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK). Dan langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan nilai-nilai Bank Victoria Syariah.

Deklarasi Anti Fraud

Bank Victoria Syariah menyatakan komitmennya untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi dan tidak melakukan tindakan fraud dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

Bank Victoria Syariah dalam melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen Bank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank Victoria Syariah serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Bank Victoria Syariah yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan *Anti Fraud*.

Customer Awareness

Bank Victoria Syariah melaksanakan edukasi untuk meningkatkan *customer awareness* dengan melalui pemasangan *banner* di Cabang dengan maksud mengingatkan nasabah atas penggunaan layanan yang benar dan tepat, termasuk tanggung jawab ke dua belah pihak baik bank maupun nasabah.

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Victoria Syariah dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 (UU TPPU) serta Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

4. Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka menerapkan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah, secara konsisten dan berkelanjutan Unit Kerja APU-PPT Bank Victoria Syariah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Menyusun program-program dalam rangka penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah untuk seluruh karyawan.
- Melakukan pengawasan/audit terhadap penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyiapkan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan APU-PPT dan Prinsip

Mengenal Nasabah.

Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan di atas, Bank Victoria Syariah berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ di dalam Bank sebagai Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan Direksi ataupun Pemegang Saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda RUPS Luar Biasa juga bermacam-macam tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan Komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan lain-lain.

Sesuai Anggaran Dasar Bank Victoria Syariah, dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan antara lain:

- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan perseroan.
- Usulan penggunaan laba jika Bank mempunyai saldo laba yang positif.
- Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan meng-audit buku-buku Bank untuk tahun yang akan datang; dan
- Hal-hal lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, Bank Victoria Syariah senantiasa berpedoman pada peraturan OJK dan Anggaran Dasar Bank, antara lain:

- Kepada para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan OJK dan Anggaran Dasar.
- Pengumuman RUPS telah mencakup informasi mengenai ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS
- Pemanggilan RUPS telah mencakup informasi mengenai tanggal penyelenggaraan, waktu dan tempat penyelenggaraan, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara RUPS dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- Pemegang Saham juga dapat melihat Pengumuman, Pemanggilan beserta materi RUPS lainnya melalui media masa terkait.

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sepanjang tahun 2017 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, yaitu pada tanggal 5 Mei 2017. Mata Acara dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 5 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPS Tahunan

- Persetujuan Laporan Tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan Perseroan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2016.
- Pengesahan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Keputusan RUPS Tahunan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Mulyamin Sensi Suryanto – Moore Stephens” dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 9 Februari 2017 No. 01081217SA,
- Pengesahan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk tahun buku 2017.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 04 tanggal 05 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Surjadi, SH., MKn., MM. Notaris di Jakarta.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sepanjang tahun 2017 Bank telah menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS-LB, yaitu pada tanggal 6 Februari 2017, 17 Maret 2017, 5 Mei 2017 dan 10 November 2017.

Mata acara dan keputusan RUPS-LB tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Mata acara RUPS Luar Biasa

- Tanggal 6 Februari 2017 yaitu Perubahan penyebutan susunan Direksi Perseroan
- Tanggal 17 Maret 2017 yaitu Penambahan Modal Disetor sebesar Rp. 60 Milyar
- Tanggal 5 Mei 2017 yaitu:
 - Perubahan pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal panggilan RUPS
 - Perubahan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi
- Tanggal 10 November 2017 yaitu:
 - Penambahan Modal Disetor Perseroan sebesar Rp. 40 Milyar.
 - Peningkatan Modal Dasar Perseroan, semula Rp. 320 Milyar menjadi Rp. 1 Triliun.

Keputusan RUPS Luar Biasa

- Menyetujui perubahan penyebutan susunan pengurus perseroan, menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Firman Ananda Moeis
 - Direktur : Andy Sundoro
 - Direktur : Deddy Effendi Ridwan
 - Direktur Kepatuhan : Nurani Raswindriati

- ii. Menyetujui penambahan Modal Perseroan sebesar Rp.60 Milyar
- iii. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
 - Perubahan pasal 11 ayat 1 perihal panggilan RUPS
 - Perubahan pasal 14 perihal Tugas dan wewenang Direksi.
- iv. Menyetujui ke 2 (dua) mata acara RUPS LB, yaitu:
 - Penambahan Modal Disetor Perseroan sebesar Rp. 40 Milyar
 - Peningkatan Modal Dasar Perseroan, semula Rp. 320 Milyar menjadi Rp. 1 Triliun.

Penyelenggaraan RUPS-LB tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS-LB, yang dituangkan dalam akta yaitu sebagai berikut:

- i. Akta Notaris No. 07 tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Setiawan,SH. Notaris di Jakarta.
- ii. Akta Notaris No. 27 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Hartanti Kuntoro, SH Notaris di Jakarta.
- iii. Akta Notaris No. 04 dan 05 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Surjadi,SH.,MKn.,MM. Notaris di Jakarta.
- iv. Akta Notaris No. 46 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dihadapan Surjadi,SH.,MKn.,MM. Notaris di Jakarta.

6. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaannya Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama sebagaimana dalam SK Dewan Komisaris No.047/DEKOM/JKT/ VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- i. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- ii. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- iii. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- iv. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 3 tanggal 8 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Agustus 2016 tentang rekomendasi

perubahan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan
1	Sugiharto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Djoko Nugroho	Komisaris Independen
3	Sari Idayanti	Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Dengan demikian anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

b. Independensi Dewan Komisaris

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan keuangan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali,

Terkait dengan pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris, sampai dengan akhir Desember 2017 Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- i. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- ii. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi.
- iii. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- iv. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
- v. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

d. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan
- Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi
- Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
- Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

e. Board Manual

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan Nomor 035/DIR-SK/JKT/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

f. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawan S.H. di Jakarta, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berakhir sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2018.

g. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

- i. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen, laporan-laporan rutin, informasi lainnya, dan hasil pemantauan/ review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Dan Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun secara langsung dalam kesempatan rapat dengan Direksi
- ii. Dalam tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain:
 - Mengenai penyusunan rencana bisnis bank,

evaluasi pencapaian target bisnis bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, calon anggota Direksi dan Komisaris, pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi, *improvement* GCG, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator, KAP dan SKAI.

- iii. Membuat revisi Keputusan Dewan Komisaris tentang Wewenang dan Prosedur Komite Pembiayaan Tingkat Direksi, Pedoman Komite-Komite Dewan Komisaris, mengesahkan revisi dan beberapa pedoman/kebijakan bank.
- iv. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator.
- v. Menyetujui pemberian/perpanjangan pembiayaan dalam rangka pengawasan di atas jumlah tertentu.
- vi. Menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh kegiatan Bank Victoria Syariah dan melanjutkan penyelarasan (harmonisasi) dengan standar OJK sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai Bank Victoria Syariah.

h. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama tahun 2017, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris sebagai tabel berikut:

NAMA PEJABAT	Nama Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sugiharto	7	100%	10	100%
Djoko Nugroho	7	100%	8	80%
Sari Idayanti	7	100%	10	100%
Total Rapat	7		10	

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

i. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Bank.

7. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut:

a. Komite Audit

i. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan

tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan /atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan pengawas syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

ii. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

- Struktur

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 22 September 2016 No. 197b/DIR-SK/JKT/IX/2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua komite : Sugiharto

Anggota : Sari Idayanti

Anggota : Retno Dwiyantri Widaningsih

- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

iii. Rapat Komite

Selama tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda, yaitu :

- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Divisi Pembiayaan Komersial dan terhadap Kantor Cabang Cirebon dilaksanakan tanggal 13 Februari 2017.
- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Divisi Pembiayaan Komersial Linkage dan

Kantor Cabang Solo dilaksanakan tanggal 16 Maret 2017.

- Pembahasan atas hasil Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dilaksanakan tanggal 4 Mei 2017.
- Pembahasan atas sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan LKPBU dilaksanakan tanggal 4 Mei 2017.
- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan PBPC, TSI, dan SDI Umum dilaksanakan tanggal 8 Mei 2017.
- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Operasional dan Keuangan & Umum dilaksanakan tanggal 11 September 2017.
- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu Tebet dilaksanakan tanggal 4 September 2017.
- Review Extern Hasil Kinerja SKAI dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2017.
- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pembiayaan *Multifinance* dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2017.
- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Teknologi Sistem Informasi dan kantor Cabang Pembantu Kramat Jati dilaksanakan tanggal 9 November 2017.
- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Control (Pengendalian Internal) dilaksanakan tanggal 13 November 2017.
- Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Cabang Cirebon, Bandung Gatsu dan Kantor Cabang Pembantu Bandung Braga dilaksanakan tanggal 21 Desember 2017.

b. Komite Pemantau Risiko

i. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

ii. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

- Struktur

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi

pada tanggal 22 September 2016 No. 197c/DIR-SK/JKT/IX/2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite : Djoko Nugroho
Anggota : Pangulu O. Simorangkir
Anggota : Supriyono
- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

iii. Rapat Komite

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 12 (dua belas) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- Membahas profil risiko per 30 November 2016
- Membahas profil risiko per 31 Desember 2016
- Penelaahan profil risiko per 28 Februari 2017
- Penelaahan pelaksanaan fungsi kepatuhan bulan Februari 2017
- Penelaahan profil risiko per 31 Maret 2017
- Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Triwulan I Tahun 2017
- Membahas kelengkapan Struktur Organisasi PT. Bank Victoria Syariah
- Membahas tindak lanjut Opini DPS atas pemberian pembiayaan kepada Koperasi.
- Membahas dokumen To be Obtained (TBO)
- Membahas profil risiko per 30 Juni 2017
- Membahas profil risiko per 30 September 2017
- Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Triwulan III Tahun 2017

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

i. Tugas dan Tanggung Jawab

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Melakukan evaluasi Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).

ii. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

- Struktur
Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.

022/DIR-SK/JKT/V/2017 pada tanggal 09 Mei 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite : Sugiharto
Anggota : Sari Idayanti
Anggota : M.Rinaldi Taufik.S

- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

iii. Rapat Komite

Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 9 (sembilan) kali.

Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap kinerja Kepala Cabang dan Kepala Cabang Pembantu.
- Pembenahan administratif Sumber Daya Insani terkait panduan penerimaan karyawan baru, formulir standar untuk mutasi dan promosi karyawan.
- Pemberian tunjangan transportasi untuk kepala divisi.
- Pelaksanaan pelatihan Prinsip Dasar Perbankan Syariah (PDPS).
- Pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko dan treasury.
- Evaluasi pencapaian kinerja karyawan.
- Mutasi dan Promosi karyawan
- Hasil *Assesment* Direksi terhadap calon *account officer* Kantor Cabang Tegal.
- Pelaksanaan kontrak kerjasama dengan konsultan syariah eksternal.

8. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar serta mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pelaksanaannya Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diatur dalam Surat Keputusan Bersama sebagaimana dalam SK Dewan Komisaris No.047/DEKOM/JKT/ VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/ VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual).

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2017, susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 08 September 2016 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013.

Anggota Direksi Bank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal

yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya.

Anggaran Dasar menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 2 (dua) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 3 tanggal 8 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, yang efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

No.	Nama Direksi	Jabatan
1	Firman A. Moeis	Direktur Utama
2	Andy Sundoro	Direktur
3	Deddy Effendi Ridwan	Direktur
4	Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain:

- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk

kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Tugas Direksi antara lain sebagai berikut :

- i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
- ii. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- iii. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya
- iv. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- v. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- vi. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

d. Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- i. Mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.
- ii. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- iii. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.
- iv. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
- v. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- vi. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai

pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

e. Board Manual

Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan Nomor 035/DIR-SK/JKT/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

f. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2017, telah diselenggarakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi dan 10 (sepuluh) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Firman A. Moes	35	97%	10	100%
Andy Sundoro	34	94%	10	100%
Deddy Effendi Ridwan	34	94%	9	90%
Nurani Raswindriati	33	92%	10	100%
Total Rapat	36		10	

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan.

g. Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga.

9. Komite Eksekutif Direksi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

a. Komite Aset, *Liabilities Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)*

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO
- Direktur Bisnis Support, sebagai anggota
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
- Direktur Operasi, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Tresuri, sebagai Sekretaris
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - Kepala Divisi Pendanaan dan Produk, sebagai Anggota
 - Kepala Divisi Komersial, sebagai Anggota
 - Kepala Divisi Jaringan Cabang, sebagai Anggota
 - Kepala Divisi Keuangan & Umum, sebagai Anggota

ii. Rapat Komite ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2017 ALSyCO telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 16 (enam belas) kali.

iii. Wewenang dan Tanggung jawab Komite ALSyCO

adalah sebagai berikut :

- Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
- Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- Memberikan arahan dalam manajemen risiko terkait alokasi sumber dan penggunaan dana
- Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)

Komite PTI-PP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal

11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

- Direktur Operasi, sebagai Ketua PTI-PP
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua PTI
- Direktur Bisnis Support, sebagai Anggota
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Divisi Pendanaan & Produk, sebagai sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Divisi Keuangan & Umum

ii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu: Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi; Pengelolaan operasional teknologi informasi; Pengembangan jaringan komunikasi; Pengelolaan *business continuity plan* dan *disaster recovery plan*; Pengelolaan terhadap *end user computing*; Pengembangan *electronic banking*; Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi
- Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/ penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu: Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru; Pengelolaan operasional produk dan aktivitas baru; Pengembangan jaringan komunikasi yang dibutuhkan; Pengelolaan terhadap produk dan *activity life* yang diharapkan; Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan; Pengaruh terhadap keuangan Bank
- Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/*activity* baru secara berkala.

iii. Rapat diadakan 2 (dua) kali selama setahun dan apabila dipandang perlu.

Selama tahun 2017 rapat komite telah terlaksana sebanyak 2 (dua) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

c. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pemberian Pembiayaan baru, penambahan, dan perpanjangan dalam batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Bisnis Support

- Direktur Operasi *)

- Kepala Divisi Rivi Pembiayaan merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite *).

*) Direktur Operasi dan Kadiv. Rivi Pembiayaan dapat ditunjuk sebagai anggota komite pembiayaan sementara (*alternate*), apabila salah satu anggota komite pembiayaan berhalangan hadir dan tidak dapat melaksanakan fungsinya

ii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:
 - Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
 - Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
 - Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek 5C-Constrain)
 - Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
 - Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.
- Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

iii. Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

d. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Direktur Kepatuhan, sebagai Ketua KMR
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- Direktur Bisnis Support, sebagai Anggota
- Direktur Operasi, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Manajemen Risiko, sebagai Sekretaris
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - Kepala Divisi SKAI
 - Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
 - Kepala Divisi Komersial
 - Kepala Divisi SDI
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Divisi Keuangan & Umum
 - Kepala Divisi Tresuri

- Kepala Divisi TSI
 - Kepala Divisi Pengembangan Cabang dan Pendanaan
- ii. Wewenang dan Tanggung Jawab
- Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
 - Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
 - Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
 - Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.
- iii. Rapat komite dilaksanakan setiap bulan
- Selama tahun 2017, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas) kali.

e. Komite Sanksi dan Personalia

Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). Susunan struktur Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

i. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- Direktur Operasi.
- Direktur Bisnis Support.
- Direktur Kepatuhan.
- Kepala Divisi SKAI.

ii. Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- Direktur Operasi.
- Direktur Bisnis Support.
- Direktur Kepatuhan.
- Kepala Divisi SDI

iii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
- Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
- Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan punishment terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

iv. Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

10. Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada Bank Victoria Syariah, maka diangkat dan ditempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN) serta anggaran dasar Bank Victoria Syariah.

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

a. Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (comply) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan tahun 2017 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkapkan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/ bukan bank adalah:

Prof. DR. H. Hasanuddin .AF	Prof. DR. H. Huzaemah Tahido, MA
1. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) Syariah	1. Asuransi AXA Syariah
2. PT. Jamkrindo Syariah	2. Asuransi Jasa Raharja
	3. Auto Finance CIMB Niaga Syariah

c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

- i. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
- ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai SK Direksi Nomer 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi

antara lain:

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
- Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

d. Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah, yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

e. Rapat Dewan Pengawasan Syariah

- i. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun demikian diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Prof. DR. H. Hasanuddin .AF	Prof.DR.Hj.Huzaemah Tahido, MA	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	23	100%
Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo	23	100%
Total Rapat	23	

- ii. Pengambilan keputusan Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- iii. Seluruh keputusan Rapat DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
- iv. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Bank dengan baik.

f. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2017 dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank Victoria Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah termasuk penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, antara lain adalah:

- i. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
- ii. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
- iii. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- iv. Telah disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Semester II tahun 2017 disampaikan pada tanggal 15 Februari 2018.
- v. Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Deklarasi hasil pengawasan dan pemeriksaan DPS selama tahun 2017 terhadap kegiatan operasional Bank.	001/Bank Victoria Syariah/DPS/JKT/II/2017 tanggal 1 Februari 2017
2	Pemberian Pembiayaan kepada koperasi karyawan Primkokas/Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 003/DPS/Bank Victoria Syariah/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
3	Pemberian Pembiayaan kepada koperasi karyawan Kocipta/Koperasi Civitas Akademika Untirta yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 004/DPS/Bank Victoria Syariah/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
4	Pemberian Pembiayaan kepada koperasi Simpan Pinjam Karyawan Lotte Meruya yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 005/DPS/Bank Victoria Syariah/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
5	Pemberian Perpanjangan Pembiayaan kepada PT. Pacific Multi Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 006/DPS/Bank Victoria Syariah/IV/2017 tanggal 3 April 2017
6	Pemberian Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam Nasari yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 008/DPS/Bank Victoria Syariah/V/2017 tanggal 9 Juni 2017
7	Pemberian Pembiayaan kepada PT. TEZ Capital and Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 009/DPS/Bank Victoria Syariah/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017
8	Pemberian Pembiayaan kepada Robert Matitawer dengan tujuan Refinancing Renovasi Rumah yang diperuntukan untuk kos-kosan	No. 010/DPS/Bank Victoria Syariah/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
9	Pemberian Pembiayaan Investasi kepada PT. Pro Car International Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 011/DPS/Bank Victoria Syariah/IX/2017 tanggal 13 September 2017
10	Pemberian Pembiayaan Investasi kepada PT. Pro Car International Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 012/DPS/Bank Victoria Syariah/IX/2017 tanggal 28 September 2017
11	Efisiensi Aplikasi Pembukaan Deposito Mudharabah Bank Victoria Syariah	No. 013/DPS/Bank Victoria Syariah/XI/2017 tanggal 15 November 2017
12	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Delta Dunia Properti dengan tujuan pembangunan Fasum dan Fases Hotel Mercure Batavia Jakarta.	No. 014/DPS/Bank Victoria Syariah/XI/2017 tanggal 30 November 2017
13	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Mahaka Gemilang Mandiri Tujuan Pembiayaan Refinancing Aset Kantor.	No. 015/DPS/Bank Victoria Syariah/XI/2017 tanggal 30 November 2017
14	Pemberian Fasilitas Joint Financing Bank Victoria Syariah dengan PT. Trihamas Finance untuk Pembiayaan Ibadah Haji kepada End User	No. 016/DPS/Bank Victoria Syariah/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017
15	Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. National Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 017/DPS/Bank Victoria Syariah/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017
16	Permohonan Persetujuan Program Tabungan dan Kegiatan CSR di Pondok Pesantren	No. 018/DPS/Bank Victoria Syariah/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017
17	Pengisian Persentase Imbalan pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)	No. 019/DPS/Bank Victoria Syariah/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017
18	Pemberian Pembiayaan kepada PT. BPR Intidana Sukses Makmur dengan tujuan pembiayaan Modal Kerja	No. 020/DPS/Bank Victoria Syariah/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
19	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Pool Advista Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 021/DPS/Bank Victoria Syariah/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
20	Pembebanan Margin tertunggak (sebelum di restrukturisasi) kepada nasabah yang melakukan Pelunasan dipercepat atas fasilitas Murabahah.	No. 022/DPS/Bank Victoria Syariah/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017

g. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Victoria Syariah telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah dan objek haram.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Semester II tahun 2017 disampaikan pada tanggal 15 Februari 2018.

11. Rencana Strategis Bank Tahun 2017

Target Jangka Pendek dan Menengah

Bank menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang dengan memperhitungkan visi-misi, strategi, kebijakan umum, kondisi dan kapasitas aktual Bank, profil risiko termasuk *risk appetite* dan *risk tolerance* serta perkiraan perkembangan kondisi lingkungan eksternal pada tahun yang akan datang.

- a. Menjaga rasio kecukupan modal (CAR) di level yang kuat dan di akhir tahun 2017 CAR diproyeksikan menjadi sekitar 21.46%. Rasio kecukupan modal tetap terjaga di level yang kuat dengan realisasi di akhir tahun 2017 sebesar 19.29%.
- b. Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar 20.25% (yoy) dan pertumbuhan pembiayaan 3.96% (yoy), menyesuaikan kondisi ekonomi yang masih melambat. Dan secara umum telah menyebabkan kenaikan Pembiayaan lebih lambat/rendah dari target dan pertumbuhan pendanaan.
- c. Peningkatan marjin menjadi 2,85%
- d. Mengurangi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehingga berkurang dari Rp. 26.5 Milyar menjadi Rp. 26.1 Milyar. Bank Victoria Syariah telah melakukan upaya penjualan AYDA selama tahun 2017, namun upaya tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan.
- e. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi (TI) untuk isu-isu kepatuhan dan keamanan serta peningkatan layanan. Pengembangan IT pada 2017 masih dijalankan baik untuk aspek keamanan sistem, kepatuhan regulasi, pendukung operasional serta bisnis dan lainnya.
- f. Mengimplementasi konsep peningkatan GCG dan manajemen risiko yang dikembangkan secara internal antara lain dalam bidang pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi Pusat dan Cabang, serta pengendalian internal. Bank Victoria Syariah senantiasa melaksanakan penerapan Tata kelola Perusahaan dan Proses

Manajemen Risiko dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dengan harapan terciptanya kondisi yang semakin baik.

Target Jangka Panjang

- a. Melanjutkan komitmen penguatan GCG sehingga berjalan maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator.
- b. Penguatan GCG terus dijalankan baik dari sisi *structure*, *process* dan *outcome*.
- c. Melanjutkan strategi pengembangan bisnis secara organik, dengan mengembangkan segmen ritel dan komersial.
- d. Melanjutkan pengembangan investasi strategis dalam teknologi informasi dan masih terus dilanjutkan hingga saat ini.

12. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat *ex-ante* dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.3/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan dan Divisi Manajemen Risiko.

Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

a. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.

- i. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.
- ii. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- iii. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- iv. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
- v. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan dan penempatan dana oleh Unit Kerja Tresuri diatas jumlah tertentu.
 - vi. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - vii. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - viii. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ix. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- b. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko
- i. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (*Risk Management*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
 - ii. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
 - iii. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi, strategi dan *risk appetite*.
 - iv. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
 - v. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
 - vi. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
 - vii. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan
- i. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - ii. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - iii. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang disampaikan setiap semester.
- d. Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya
- Program Kerja
- Sesuai rapat kerja Tanggal 3 dan 4 Februari 2017 di Bogor, rencana kerja Direktorat Kepatuhan ditetapkan 5 (lima) prioritas atau program unggulan yaitu sebagai berikut:
- i. Peningkatan budaya kepatuhan dan laporan yang akurat
 - ii. Menyempurnakan proses pembiayaan sehingga mempercepat SLA
 - iii. Manajemen risiko yang kuat dan mendorong risk awareness
 - iv. Mendayagunakan dan mengoptimalkan fungsi sekretaris perusahaan
 - v. Meningkatkan kompetensi analisis risiko & produktifitas karyawan
- Dan untuk melaksanakan prioritas atau program unggulan tersebut di atas, telah dijabarkan dalam *Key Performance Indicator* dengan mengacu pada Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kinerja sesuai SK No. 282/DIR-SK/JKT/XII/2016, antara lain adalah sebagai berikut
- i. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional.
 - ii. Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja terkait (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko.
 - iii. Membuat dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - iv. Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - v. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/ komposisi Risiko secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 - vi. Uji kepatuhan terhadap proposal pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.
 - vii. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - viii. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
 - ix. Melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
 - x. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan SKAI.
 - xi. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
 - xii. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah.
- Realisasi
- Selama tahun 2017, Bank dapat menjaga kepatuhan

terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

- i. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 21,46%
- ii. Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 5% sedangkan realisasi GWM posisi Desember 2017 sebesar 6,48%.
- iii. Rasio NPF gross sebesar 3,88% dan NPF net sebesar 3,25%
- iv. Laporan keuangan Bank tahun 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto."
- v. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

13. Fungsi Audit Internal atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Fungsi Audit Intern pada Bank Victoria Syariah sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank Victoria Syariah yang melibatkan dana masyarakat. Di samping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, Audit Intern Bank Victoria Syariah diharapkan juga mampu menjaga perkembangan Bank Victoria Syariah ke arah yang dapat menunjang program pembangunan Pemerintah.

- a Struktur dan Kedudukan SKAI
Guna mendukung kinerja SKAI agar senantiasa dalam tingkat optimal, Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.
- b Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Utama Bank Victoria Syariah dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK.
- c Independensi
Kepala Divisi SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala Divisi SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- d Wewenang dan Tanggung Jawab SKAI
Visi dan Misi, wewenang dan tanggung jawab SKAI telah dirumuskan dalam Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini Bank Victoria Syariah memberikan

SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

SKAI mempunyai wewenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana, serta aset Bank Victoria Syariah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. SKAI bertugas dan bertanggung jawab dalam membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit.

e. Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2017

Aktivitas yang telah dilakukan SKAI selama tahun 2017, antara lain:

- i. Melakukan *post audit monitoring* untuk memastikan bahwa semua komitmen Bank Victoria Syariah atas temuan hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dipenuhi sesuai komitmen.
- ii. Melakukan *post audit monitoring* atas temuan SKAI serta menyampaikannya ke *Auditee* (Divisi maupun Cabang) untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.
- iii. Audit Umum dan Audit Khusus
 - Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja, baik Divisi di Kantor Pusat maupun cabang-cabang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja audit intern tahunan.
 - Melaksanakan audit khusus sesuai instruksi dari Direksi dan Komite Audit.
- iv. Audit dan *Independent Review* Bidang Teknologi Informasi.
- v. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada karyawan tentang penguatan sistem pengendalian *intern* dan *anti-fraud awareness* melalui forum *training*, sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit (*exit meeting audit*). Dalam ini SKAI mengembangkan peran *consultative* kepada *auditee* melalui komunikasi yang efektif dalam membahas temuan audit, sehingga *auditee* dapat memahami risiko-risiko dari defisiensi/penyimpangan yang terjadi.
- vi. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian *intern* Bank Victoria Syariah dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain:
- vii. Bersinergi dengan *Internal Control* yang ditempatkan di cabang-cabang sebagai bagian dari pilar *early warning system*.
- viii. Menjadi fasilitator (*liaison officer*) pelaksanaan audit ektern oleh OJK, dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- ix. Menyelenggarakan Rapat Komite Audit rutin tiap bulan untuk melaporkan realisasi pelaksanaan audit dan pokok-pokok hasil audit.
- x. Membantu Dewan Pengawas Syariah (DPS)

dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional Bank Victoria Syariah dengan cara melaporkan temuan-temuan audit yang berkaitan dengan syariah.

f. Tim Anti-Fraud

Dalam rangka menunjang penerapan pengendalian intern di Bank Victoria Syariah, manajemen membentuk Tim *Anti-Fraud* (TAF) dimana SKAI turut mengambil peranan strategis, yaitu sebagai ketua TAF dan beranggotakan Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Unit Kerja Pengendalian Internal dan Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI).

Adapun yang melatar belakangi dibentuknya Tim Anti-fraud adalah sebagai berikut:

- i. Penguatan sistem pengendalian intern Bank Victoria Syariah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- ii. Terungkapnya berbagai kasus *fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi *anti-fraud*.
- iii. Mengarahkan Bank Victoria Syariah dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

Strategi *anti-fraud* yang diterapkan di Bank Victoria Syariah didasarkan pada 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

- i. Pencegahan
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup *anti-fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- ii. Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
- iii. Investigasi, pelaporan, dan sanksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan peneraan sanksi.
- iv. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

g Kaji Ulang Pelaksanaan Audit SKAI

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), SKAI Bank Victoria Syariah diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (*review*) pihak independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB. SKAI Bank Victoria Syariah telah melakukan kaji ulang 3 (tiga) tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Sudin dan Rekan periode 2014 s/d 2016.

14. Penyimpangan Internal

Selama tahun 2017, terdapat 1 (satu) kejadian *internal fraud* yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai Bank Victoria Syariah terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank Victoria Syariah namun tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank Victoria Syariah.

Atas kejadian *Fraud* tersebut, Bank Victoria telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum, termasuk telah melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

15. Audit Eksternal

Bank Victoria Syariah memerlukan auditor eksternal yang independen untuk memastikan penyusunan laporan keuangan secara pencatatan akuntansi telah memenuhi ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK), kaidah-kaidah dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan wewenang dan kuasa yang diberikan kepada Direksi berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 05 Mei 2017 dan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit berdasarkan Memorandum No 031/DEKOM/JKT/IV/2017 tanggal 18 Mei 2017 maka Direksi telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Indris (Moore Stephens) sebagai auditor independen Bank Victoria Syariah untuk tahun buku 2017.

Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal oleh KAP Mirawati Sensi Idris untuk Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah tahun buku 2017 telah memenuhi standar profesional akuntan publik, legalitas perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit yang ditetapkan serta KAP tersebut dapat bekerja secara independen dan mempunyai reputasi yang baik.

Hasil audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku 2017, KAP Mirawati Sensi Idris menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan Bank Victoria

Syariah dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adapun biaya yang dibayarkan oleh Bank Victoria Syariah kepada KAP tersebut untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2017 adalah sebesar Rp 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

16. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank Victoria Syariah memahami bahwa bisnis perbankan memiliki beragam risiko yang harus diidentifikasi, dikelola, dipantau secara konsisten dan ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi sehingga dampak kejadian risiko dapat diminimalisasi.

Penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang disusun berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah.

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Peran Dewan Komisaris antara lain: mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui rapat dengan Direksi dan memutus permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada anggaran dasar yang berlaku.

Peran Direksi antara lain: melakukan evaluasi strategi manajemen risiko yang disesuaikan dengan bisnis Bank, mengkaji penilaian risiko, seperti pelaksanaan penetapan limit risiko dalam aktivitas pembiayaan, aktivitas treasury, limit transaksi operasional dan memastikan penyediaan sumber daya insani yang memadai dalam pengelolaan risiko sesuai kompleksitas usaha Bank yang fokus dalam pembiayaan kepada Ritel dan Komersil, termasuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya insani pengelola risiko melalui *sharing session*, *coaching*, dan pelatihan.

- b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Bank Victoria Syariah telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain Unit Kerja Pengendalian Internal, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
Bank Victoria Syariah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan telah disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDI dan *risk appetite*. Kebijakan tersebut dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal.

Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko telah didokumentasikan secara tertulis dan lengkap serta di review secara berkala.

Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, Bank Victoria Syariah telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang membahas strategi Bank Victoria Syariah secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis dan penetapan strategi tersebut telah memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan Bank

- c. Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank.

Pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Victoria Syariah. Metode pengukuran risiko yang digunakan mengikuti metode yang ditetapkan oleh Regulator dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal yang digunakan menggunakan metode standar untuk menghitung kecukupan modal terhadap risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Pemantauan risiko dilakukan baik oleh unit pelaksana terkait pembiayaan, pendanaan, operasional, treasury maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pengendalian risiko telah dilakukan dengan peningkatan limit pada aktivitas bisnis baik pada unit bisnis pembiayaan, treasury, operasional maupun pada unit kerja pendukung.

Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah menggunakan menggunakan parameter untuk pengukuran risiko yang meliputi 10 jenis risiko dengan parameter yang ditetapkan oleh Regulator. Penyampaian Profil Risiko Bank Victoria Syariah setiap Triwulan kepada Regulator telah dilakukan tepat waktu.

- d. Sistem Pengendalian Internal
Seluruh manajemen dan karyawan memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.
Bank Victoria Syariah menerapkan pengendalian internal dalam pengelolaan risiko mencakup:
 - i. Melakukan penetapan struktur organisasi, dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional, unit kerja bisnis dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk mangament unit*).

- ii. Penetapan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yaitu unit kerja independen yang membuat kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, dan penetapan limit risiko.
- iii. Setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko, akan dikaji dan dipantau sesuai kebutuhan, oleh masing-masing unit bisnis.

Selain itu, Bank Victoria Syariah senantiasa memastikan dipenuhinya berbagai hal pokok dalam proses pengendalian, mencakup: adanya kesesuaian sistem pengendalian internal dan risiko bank, penetapan wewenang pemantauan kebijakan, prosedur dan limit, struktur organisasi yang jelas dan prinsip *four eyes* yang memadai; dan kecukupan prosedur untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan.

Bank mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko termasuk kecukupan kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen secara berkala. Termasuk melakukan Audit internal atas proses manajemen risiko dan pemantauan perbaikan atas hasil temuan audit.

17. Pengendalian Internal

Bisnis Bank yang dinamis membutuhkan tingkat kehati-hatian yang semakin tinggi, oleh karena itu Bank sangat mengandalkan sistem pengendalian internal.

Pengendalian Internal berfungsi sebagai "*second line of defense*" yang independen dalam melaksanakan kontrol secara harian yang sudah "*built in*" dalam setiap proses operasional Bank dalam rangka mendukung pencapaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai Visi dan Misi Bank.

Aktivitas pengendalian internal (Internal Control) Bank telah sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.5/22/DPNP, Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum, yang mana tugas dan tanggung jawab utama Unit Kerja Pengendalian Internal antara lain mencakup:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional Bank secara independen untuk memastikan transaksi telah sesuai Peraturan Otoritas, Kebijakan dan Prosedur Internal Bank serta Prinsip Syariah.
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas dan administrasi pembiayaan.
- c. Melakukan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko di cabang-cabang.

Bank mendorong kesadaran dari setiap lini dalam organisasi untuk peduli pada pengendalian internal (*awareness*) yang mana hal ini bisa menciptakan *zero defect* dan menghilangkan potensi *fraud*.

Dan selama tahun 2017 Unit Kerja Pengendalian Internal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaporkan hasil pemeriksaan setiap bulan

terhadap :

- i. Bidang Operasional, yang meliputi:
 - Aktivitas cash count, stock opname, review dan monitoring pembukaan rekening dan transaksi harian.
 - Pemeriksaan operasional unit kerja Kantor Pusat.
 - Monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, antara lain pelaksanaan dual control, pengelolaan user ID, pemenuhan prosedur terkait APU-PPT, kelengkapan dan maintenance infrastruktur pendukung, pengarsipan dan pengembangan karyawan.
- ii. Bidang Pembiayaan, yang meliputi:
 - Melakukan monitoring terhadap pemenuhan dokumen.
 - Mempertimbangkan posisi NPF menjadi "*Boom Factor*" dalam penilaian cabang.

- b. Melaporkan hasil tindak lanjut komitmen unit kerja Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik dan Satuan Kerja Audit Internal.

18. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Victoria Syariah mencakup masalah hukum perdata sedangkan untuk perkara pidana tidak ada.

Dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 terdapat 7 (tujuh) perkara perdata dimana 1 (satu) perkara telah diputus di tingkat Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sementara itu, 6 (enam) perkara sedang dalam proses penyelesaian hukum baik tingkat Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Tingkat Banding. Permasalahan hukum perdata ini tidak berpengaruh terhadap bisnis Bank Victoria Syariah secara keseluruhan.

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	6	-
Total	7	-

19. Transaksi dengan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan ekonomis Bank berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan pada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Bank Victoria Syariah.

20. Kode Etik

Bank telah memiliki Pedoman dan Kode Etik bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

21. Budaya Perusahaan

Untuk lebih mendukung pencapaian Visi dan penerapan Misi dalam aktivitas operasional Perusahaan, maka Bank Victoria Syariah telah menetapkan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan (*Core Values*) sebagai dasar budaya Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali.

Adapun Nilai-Nilai Budaya Perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh Karyawan Bank Victoria Syariah dapat disingkat H-E-B-A-T.

Penjabaran dari HEBAT tersebut adalah sebagai berikut :

Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Bank Victoria Syariah. Seluruh Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasional-nya.

Brilliant

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun team harus memiliki kemampuan yang *brilliant* untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*).

Accurate

Sebagai lembaga keuangan yang merupakan kepercayaan masyarakat, keakuratan data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban dari Bank untuk dipenuhi.

Trust

Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

22. Perlindungan Nasabah

Bank Victoria Syariah senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*)

Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

- *Call Center* : (021) 5672771

- *Website* : www.bankvictoriasyariah.co.id

- *Customer service* di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.

4. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank Victoria Syariah menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.

2. Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

Dan selama Tahun 2017, seluruh pengaduan nasabah telah diselesaikan dengan baik.

23. Sekretaris Perusahaan

a. Fungsi dan Tugas-Tugas Sekretaris Perusahaan

i. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Bank Victoria Syariah.
- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Bank Victoria Syariah dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku

- kepentingan lain.
- ii. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Bank maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank
 - iii. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih
- b. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2017
- Beberapa tugas yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2017, antara lain:
- i. Mengelola dan menyimpan Daftar Khusus (yaitu daftar berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Bank maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank Victoria Syariah)
 - ii. Menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih serta Daftar Pemegang Waran secara bulanan.
 - iii. Menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali serta membuat minuta hasil Rapat Direksi dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.
 - iv. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 05 Mei 2017 serta RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 6 Februari 2017, 17 Maret 2017, 5 Mei 2017 dan 10 November 2017.

c. Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya ditunjuk sesuai dengan Surat Penunjukan Direksi Bank Victoria Syariah No 238/DIR-SK/JKT/XI/2016.

d. Struktur Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan Bank bertanggung jawab langsung kepada kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.

24. Keterbukaan Informasi

Di dalam era keterbukaan dan transparansi Bank Victoria Syariah memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank Victoria Syariah, diantaranya melalui:

- a. Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- b. Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank Victoria Syariah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank Victoria Syariah dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- c. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan

(Annual Report) Bank Victoria Syariah kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam *website* Bank Victoria Syariah.

- d. Laporan Publikasi Triwulan
- e. Penyampaian Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam *website* Bank Victoria Syariah.
- f. Menerapkan mekanisme pengaduan nasabah baik secara langsung di kantor Bank Victoria Syariah maupun melalui *Call Center* Bank Victoria Syariah, sedangkan terkait dengan penerapan strategi *Anti-Fraud* telah diimplementasikan kebijakan *whistle blowing* melalui pelaporan *email* ke fungsi penanganan *Anti-Fraud*.

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (masih dikonfirmasi dengan SDI)
- Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama setahun adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2017	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.011
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-
JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS	
Diatas Rp. 2 miliar	-	
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-	
Dibawah Rp. 500 juta	3	
Total	3	

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN DIREKSI (KOTOR) Tahun 2017	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	3.740
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	-
JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017*)	JUMLAH DIREKSI	
Diatas Rp. 2 miliar	-	
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	4	
Dibawah Rp. 500 juta	-	
Total	4	

b. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

- Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 12 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
- Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

25. Penilaian GCG secara Self Assessment

Untuk memastikan peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada manajemen maupun kepada pemangku kepentingan lainnya, Bank Victoria Syariah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG dua kali setahun.

Meskipun belum menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, pelaksanaan *self assessment* memiliki akurasi dan objektivitas yang baik karena dilakukan sesuai dengan metodologi yang diberikan oleh Regulator dan dengan melibatkan seluruh elemen Bank. Adapun hasilnya dilaporkan Ke Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Bank Victoria International Tbk (PT Bank Victoria International Tbk) sebagai pemegang saham. Pelaksanaan *self assessment* secara semesteran ini juga digunakan sebagai alat yang penting bagi PT Bank Victoria International Tbk untuk mengukur Tata Kelola Secara Terintegrasi dan tingkat kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka

Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Hasil Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG melalui penetapan peringkat faktor-faktor GCG yang dilakukan secara factual terhadap tata kelola (*governance*) terdiri dari 3 (tiga) aspek utama, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia dan Hasil *self assessment* GCG tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1.86	Baik
Semester II	1.62	Baik

Dan parameter penilaian *self assessment* adalah:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hasil penilaian tersebut penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek *governance structure*

- Bank telah memiliki Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan telah dilakukan revisi terkait adanya perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Organisasi.
- Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- Bank telah melakukan pengkinian Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
- Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi.
- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*

- Pada posisi semester I-2017 masih terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan RUPSLB tanggal 8 September 2016 yang belum mendapat persetujuan atas *Fit & Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank mempunyai 4 (empat) anggota Direksi, namun tidak memiliki Direktur Bisnis/dirangkap oleh Direktur Utama.
- Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya, saat ini masih dirangkap oleh staf Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.

- Terhadap struktur organisasi SKAI, Bank masih terdapat kekurangan 1 (satu) staf audit IT.

b. Governance Process

Faktor-faktor positif aspek governance process

- Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan memperoleh persetujuan RUPSLB.
- Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
- Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan Kebijakan Strategi dan kerangka Manajemen Risiko dan berlaku efektif Januari 2017.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui tahapan proses yang memadai untuk memastikan bahwa penyediaan dana tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak melanggar BMPD
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan.

Faktor-faktor negatif aspek governance process

- Atas rencana pemeriksaan SKAI belum berjalan sebagaimana jadwal yang ada.
- Pelatihan/training dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDI belum terlaksana secara berkala dan berkesinambungan

c. Governance Outcome

Faktor-faktor Positif Governance Outcome

- Direksi telah mengkomunikasikan arah bisnis Bank kepada setiap jenjang organisasi
- Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, APU-PPT dan Peraturan Perundangan lainnya.
- Seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank telah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI dan dilengkapi dengan pendapat/opini DPS.
- Bank telah melaksanakan *assessment* dan audit secara objektif.
- Kinerja Bank menunjukan hal yang positif dibandingkan dengan posisi semester II 2016, sebagai berikut :
 - Total ekuitas meningkat dari Rp. 194 Milyar menjadi Rp.257 Milyar, seiring adanya penambahan modal disetor sebesar Rp. 60 Milyar pada bulan Maret 2017.
 - Membukukan laba berjalan sebesar Rp. 2.156 Juta, sedangkan di semester II 2016 masih membukukan kerugian sebesar Rp. 27.884 Juta.
 - Rasio NPF Gross membaik, dari 7,31% di semester II 2016 menjadi 4,92% di semester I 2017.
 - Rasio KPMM meningkat signifikan dari 15,98% menjadi 22,36%, rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam POJK No.21/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah pasal 2 bahwa rasio KPMM sesuai profil risiko Bank dengan peringkat 2 (dua) adalah 9% s/d dibawah 10%.
 - Penurunan BOPO dari 131,34% semester II 2016 menjadi 98,01% di semester I 2017.
 - Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku

tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome*

- Masih terdapat denda pelanggaran ketentuan GWM, pelaporan LKPBU dan LSMK.
- Masih terdapat temuan OJK yang belum terselesaikan sesuai batas waktu.

26. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2017

Gambaran Umum Manajemen Risiko

Manajemen risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka Bank Victoria Syariah menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko diseluruh lini organisasi. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank Victoria Syariah membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Bank Victoria Syariah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Manajemen Risiko di Bank Victoria Syariah, didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.

Unit manajemen risiko di Bank Victoria Syariah merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap unit bisnis maupun terhadap unit satuan audit internal. Namun ketiga unit tersebut saling berkaitan dan berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai *first line, second line, & third line of defense*. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu atau mengabaikan unit operasional kerja lainnya.

Meningkatkan Peran Manajemen Risiko

Kegiatan usaha perbankan syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan dan eksternal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Dalam hal ini perbankan syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah serta sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi dan inovasi produk serta aktivitas perbankan syariah telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Victoria Syariah memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Melalui penerapan

manajemen risiko yang menyeluruh, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko secara lebih baik dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Bank.

Penerapan kerangka manajemen risiko dilakukan antara lain melalui organisasi yang tersrtuktur, serangkaian prosedur dan metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risiko-risiko yang sudah ada maupun yang mungkin akan timbul.

Struktur manajemen risiko menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi unit-unit organisasi serta elemen penting dalam memastikan kecukupan dan kualitas SDI untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern dan unit kerja manajemen risiko, independen terhadap unit kerja operasional maupun bisnis. Kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat risiko yang akan timbul serta pengalaman dan keahlian personel yang menangani.

Bank Victoria Syariah mengembangkan kebijakan manajemen risiko sebagai arahan tertulis dalam penerapan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis dimana penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait. Kebijakan dan prosedurnya didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, *risk appetite*, *risk tolerance*, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas dan/ atau praktek perbankan yang sehat.

Secara konsisten Bank Victoria Syariah memperbaiki kebijakan, menyempurnakan prosedur dan menyesuaikan batas toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dan profitabilitas usaha, serta menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Victoria Syariah dan induk perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko bank mengacu pada POJK No 65/POJK.03/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan ketentuan terkait risiko lainnya serta *best practice* penerapan manajemen risiko di perbankan. Bank mengelola 10 risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis maka Bank harus meningkatkan pula *monitoring* atas risiko-risiko yang ada dan selalu dijaga serta disempurnakan agar lebih baik dan dapat memberikan mitigasi Risiko-risiko yang mungkin timbul.

Penerapan atas Manajemen Risiko yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) rutin secara berkala.
- Melakukan pemantauan/*monitoring* terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas dan kegiatan bisnis Bank.
- Membuat kajian Manajemen Risiko terkait dengan

produk dan aktifitas baru Bank.

- Melakukan evaluasi tentang hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan apakah sudah dilakukan dengan efektif.
- Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/ RBBR*), dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*Risk Profile*), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), aspek Rentabilitas (*Earnings*) dan Pemenuhan Permodalan (*Capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dan menyempurnakan identifikasi Risiko dalam laporan profil Risiko maupun laporan Tingkat Kesehatan Bank agar lebih akurat sehingga dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi yang lebih cepat dan lebih baik.
- Meningkatkan Budaya Risiko pada seluruh jajaran organisasi (*risk taking unit*) dan setiap aspek kegiatan operasional Bank antara lain melalui rapat-rapat di masing-masing unit kerja dan dalam pengambilan keputusan bisnis.
- Mengikutsertakan jajaran Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif Bank dan Karyawan untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Program Sertifikasi Manajemen Risiko termasuk Refreshment Program.
- Meningkatkan peran Unit Kerja Independen (Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Pengendalian Internal) dalam rangka memperbaiki fungsi pengendalian intern.
- Mempertimbangkan hasil penilaian oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam kajian dan atau Opini Kepatuhan dalam proses usulan penyediaan dana Tresuri dan pembiayaan untuk jumlah tertentu oleh unit terkait.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Manajemen risiko pada aktivitas fungsional Bank Victoria Syariah meliputi atas 10 (sepuluh) jenis risiko sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit dilakukan secara terintegrasi oleh unit bisnis, unit operasional, dan unit risiko kredit yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sistem yang terintegrasi dan dilakukan secara *end to end*.

Key Risk Indicator yang digunakan dalam risiko kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan *Non Performing Financing* (NPF)
- b. Kualitas penyediaan dana dan besarnya *coverage* yang dibentuk, pembiayaan yang direstrukturisasi
- c. Tingkat konsentrasi pembiayaan
- d. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana
- e. Faktor eksternal

2. Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. *Key Risk Indicator* untuk risiko pasar yaitu sebagai berikut:

- Perubahan nilai tukar
- Cover risiko atas transaksi valuta asing dengan menggunakan metode pengukuran *Value at Risk* (VaR).
- Penilaian volume dan komposisi portofolio
- Potensial kerugian (*potensial loss*) dari risiko *Benchmark Suku Bunga* dalam *Banking Book* (RBBR)
- Strategi dan kebijakan bisnis

3. Risiko Likuiditas

Adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Key Risk Indicator untuk risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

- Kecukupan rasio *Secondary Reserve*
- Tingkat *Financing to Deposit Ratio*
- Komposisi dari Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif
- Konsentrasi dari aset dan kewajiban
- Kerentanan pada kebutuhan pendanaan
- Akses pada sumber-sumber pendanaan

4. Risiko Operasional

Adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Bank melakukan manajemen risiko operasional yang efektif agar dapat menekan kerugian akibat risiko operasional.

Key Risk Indicator risiko operasional adalah sebagai berikut:

- Self assesment* terhadap potensi risiko perusahaan
- Kerugian aktual akibat risiko operasional
- Karakteristik dan kompleksitas bisnis
- Sumber daya insani
- Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung
- Kejadian *fraud*
- Kejadian eksternal

5. Risiko Hukum

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat terjadi di seluruh aspek transaksi dan operasional yang ada di Bank Victoria Syariah, termasuk pula perjanjian yang dilakukan nasabah maupun pihak lain yang dapat berdampak terhadap risiko-risiko lain antara lain risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko reputasi maupun risiko likuiditas.

Key Risk Indicator risiko hukum adalah sebagai berikut:

- Besarnya gugatan pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan kerugian bank
- Faktor litigasi
- Faktor kelemahan perikatan
- Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan

6. Risiko Strategik

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Risiko Strategik dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan strategis (*planning and budgeting*) yang mencakup penyesuaian strategi perusahaan.

Key Risk Indicator untuk risiko strategik adalah sebagai berikut:

- Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis
- Strategi berisiko tinggi dan Strategi berisiko rendah
- Posisi Bisnis Bank
- Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)

7. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Pada praktiknya, aktivitas bisnis Bank terkait dengan banyak peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Syariah, Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).

Key Risk Indicator untuk risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
- Frekuensi pelanggaran yang dilakukan
- Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu

8. Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Cakupan risiko reputasi cukup luas dan tidak terbatas hanya pada reputasi dari sebuah bank saja, namun dapat memicu risiko lainnya bahkan risiko reputasi dapat berdampak pada munculnya risiko lainnya. Risiko reputasi pun dapat mempengaruhi kinerja sektor industri perbankan secara menyeluruh. Kejadian risiko mungkin terjadi hanya pada satu bank yang pengendalian

risikonya tidak memadai, selanjutnya reputasi dari masing-masing produk atau sektor dapat mempengaruhi keseluruhan industri perbankan.

Key Risk Indicator yaitu sebagai berikut:

- Pemberitaan negatif di media massa
- Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- Pelanggaran etika bisnis
- Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis bank
- Frekuensi materialitas dan eksposur pemberitaan negatif
- Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Key Risk Indicator yaitu sebagai berikut:

- Tingkat bagi hasil kepada nasabah Bank Victoria Syariah dibandingkan dengan industri
- Komposisi dana pihak ketiga
- Strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan
- Perilaku nasabah dana pihak ketiga

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Key Risk Indicator adalah sebagai berikut:

- Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil
- Kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil
- Faktor eksternal

Proses pengidentifikasian Risiko-Risiko yang melekat (Risiko Inheren) dilakukan oleh unit kerja terkait/*risk taking unit* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko-risiko tersebut terus dilakukan dan disempurnakan bersama-sama dengan penentuan limit/*risk appetite* dan penghitungan bobot untuk masing-masing Risiko dan dibicarakan dalam rapat Komite Manajemen Risiko sehingga dapat lebih menggambarkan profil Risiko Bank yang sebenarnya.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko diterapkan dengan gambaran sebagai berikut:

1. Tata kelola risiko

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah di Bank Victoria Syariah telah melaksanakan pengawasan aktif, antara lain:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui komite yang berada di bawahnya, yaitu Komite Audit (*Audit Committee*) yang membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal, pengawasan yang berkaitan dengan pelaporan auditor internal dan eksternal; Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*), yang membantu dalam mengawasi efektivitas pengelolaan risiko Bank dan Komite Remunerasi

dan Nominasi (*Remuneration and Nomination Committee*), yang membantu dalam mengawasi kebijakan remunerasi dan nominasi.

- Pengawasan aktif Direksi melalui rapat Direksi yang dilakukan secara rutin, melalui rapat-rapat Direksi dan rapat Komite yang berada di bawah Dewan Direksi, yaitu Komite Aset, Liabilitas dan Dana Syariah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syariah Fund Management/ALSYCO*), Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk serta Komite Sanksi dan Personalia.
- Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memastikan bahwa transaksi dan operasional Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk di dalam tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain memberikan arahan dan masukan dari sisi kesesuaian terhadap syariah untuk produk dan aktivitas baru serta melakukan pengawasan dan *check on the spot* secara *sampling* atas penerapan prinsip syariah pada unit-unit bisnis maupun cabang. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga bertugas meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum memiliki fatwa.

2. Kerangka manajemen risiko dalam bentuk kebijakan, prosedur, maupun limit

Bank telah menyusun ketentuan internal mengenai manajemen risiko, pembiayaan operasional, pasar, likuiditas serta prosedur terkait dengan prosedur dan produk pembiayaan per segmen bisnis dan kegiatan operasional Bank lainnya. Ketentuan internal Bank Victoria Syariah disusun berdasarkan hierarki yang terdiri dari level kebijakan dan prosedur, dimana kebijakan mengatur hal-hal yang bersifat high level sementara prosedur mengatur hal-hal yang lebih bersifat teknis.

Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait, termasuk di dalamnya unit manajemen risiko, kepatuhan, legal dan internal audit.

Dalam pembiayaan, Bank memperhatikan bahwa pembiayaan kepada satu group usaha nasabah tidak melebihi Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga memastikan bahwa transaksi dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan, maka Bank mengimplementasikan limit terkait dengan keputusan pembiayaan, operasional secara berjenjang untuk mencegah terjadinya konsentrasi keputusan pada satu level tertentu saja.

3. Proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kecukupan sistem informasi manajemen

risiko.

Hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan aktivitas ini antara lain:

- Melakukan analisis risiko inheren atas setiap produk dan aktivitas Bank yang dilakukan oleh masing-masing pemilik produk, dan selanjutnya dikaji antara lain oleh unit manajemen risiko, kepatuhan dan legal;
- Melakukan penilaian profil risiko secara berkala atas 10 (sepuluh) jenis risiko dan melaporkannya kepada manajemen dan Otoritas Jasa Keuangan. Metodologi atas penilaian profil risiko dikaji dan dikembangkan secara berkala;
- Proses rekrutmen pegawai secara selektif;
- Peningkatan kualitas SDI secara berkelanjutan melalui pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan rencana pelatihan dan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai
- Secara aktif melakukan sosialisasi dan *sharing session*, baik karyawan *front-end*, *back office* dan karyawan Kantor Pusat Non Operasional, yang mendukung peningkatan kompetensi pegawai serta peningkatan pengetahuan pegawai mengenai proses operasional Bank;
- Melakukan penilaian kinerja portofolio pembiayaan secara berkala oleh unit bisnis dan unit *support* bisnis (*reviewer*) untuk seluruh segmen pembiayaan;
- Melakukan *assesment* atas kegiatan terkait dengan IT dan *Business Continuity Management (BCM)*.

4. Kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit *Internal Audit* dan *Anti Fraud Team* serta *independent review* yang dilakukan oleh auditor eksternal dan juga pihak konsultan.

Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan audit secara berkala dan atau melakukan audit khusus atas permasalahan yang muncul di Bank. Laporan audit tersebut disampaikan kepada manajemen untuk dapat ditindaklanjuti segera dan disampaikan kepada unit manajemen risiko dan kepatuhan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kualitas manajemen risiko. Untuk beberapa kasus tertentu, audit dapat dilakukan oleh auditor eksternal berdasarkan persetujuan manajemen, sehingga diperoleh penilaian yang independen dari pihak lain di luar Bank.

Bank telah memiliki Bagian *Anti Fraud* yang berkoordinasi erat dengan unit *internal audit* atas permasalahan dan kasus yang muncul. Bersama dengan team dari Divisi SDI, telah dibentuk Komite Sanksi yang memberikan pandangan yang komprehensif atas permasalahan atau kasus yang perlu diselesaikan. Divisi *Anti Fraud* melaporkan tindak lanjutnya secara berkala kepada manajemen dan/atau Direktur Utama.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan efektifitas kualitas

penerapan manajemen risiko.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selama 2017 Bank telah melakukan *self assessment* terhadap penilaian profil Risiko Bank. Peringkat komposit profil risiko Bank Victoria Syariah adalah 2 atau *low to moderate* dengan penilaian Risiko Inheren adalah Komposit 2 atau *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank adalah Komposit 2 atau *Satisfactory*.

Hasil penilaian masing-masing jenis risiko pada bulan Desember 2017 yang dilakukan secara *self assessment* adalah:

No	Nilai	Penilaian Individu per 31 Desember 2017		
		Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko Komposit
1.	Kredit	3 (Moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
2.	Pasar	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
3.	Likuiditas	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
4.	Operasional	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
5.	Hukum	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
6.	Strategik	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
7.	Kepatuhan	2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
8.	Reputasi	1 (Low)	Satisfactory	1 (Low)
9.	Imbal Hasil	3 (Moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
10.	Investasi	3 (Moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)
Peringkat Komposit		2 (Low to moderate)	Satisfactory	2 (Low to moderate)

Konsolidasi dan Integrasi Manajemen Risiko dengan Perusahaan Induk

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi keuangan, serta dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk, Bank Victoria Syariah selaku perusahaan anak selalu mendukung konsolidasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh entitas utama yaitu Bank Victoria International, Tbk.

4 BAB 4

Chapter 4





Profil Dewan Komisaris

Profil Direksi

Profil Dewan Komisaris Syariah

Profil Pejabat Eksekutif

Profil Pimpinan Cabang

Profil Komite

Produk & Layanan

Pembiayaan

Jaringan Kantor

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners





Sugiharto SE, MBA

Komisaris Utama

- WNI, lahir di Solo 13 Januari 1955
 - Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1979
 - Master Of Business Administration (MBA), The University of Texas - Austin, USA tahun 1996
-
- 1981-1999 : Bank Exim, dengan berbagai jabatan yaitu Credit Analyst, Treasury Manager (New York), Head of Money Market and Foreign Exchange Trading, Head of Assets and Liabilities Management Group, Head of Trade and Financial Services Division (Singapore), Head of Treasury & Capital Market, Bank Exim – (Head Office, Jakarta).
 - 1999-2009 : Bank Mandiri, dengan berbagai jabatan yaitu Vice President Treasury and Capital Market, Vice President Of Financial Institution and Overseas Network, Executive Vice President/Head Of Treasury Group.
 - 2009-2010 : President Director Dana Pensiun Bank Mandiri
 - 2010-2014 : Bank Mega dengan berbagai jabatan yaitu Managing Director Treasury and International Banking, Treasury and International Banking Advisor.
 - 2007-2011 : President of Indonesia Foreign Exchange Dealer Association ACII/Forexindo) dua periode tahun 2007-2011.
 - Sejak Juni 2015 sebagai Komisaris Utama Bank Victoria Syariah



Sari Idayanti

Komisaris

- WNI, lahir di Jakarta 21 Desember 1966
 - Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 1990
-
- 1989-1995 : PT. Bank Bira dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Akunting & Administrasi Keuangan
 - 1995-2007 : PT. Bank Victoria International Tbk, sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan
 - September 2007 - Mei 2008 : PT. Bank Swaguna dengan berbagai jabatan yaitu Direktur Operasional dan Direktur Utama
 - April 2010 - September 2016 : PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional
 - Sejak 8 September 2016 sebagai Komisaris PT. Bank Victoria Syariah

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Djoko Nugroho

Komisaris - Independen

- WNI, lahir di Klaten 7 Maret 1962
 - Sarjana Matematika di Institut Teknologi Bandung, tahun 1986
-
- 1987-1989 : PT Bank Panin sebagai Account Officer
 - 1990-1993 : PT Bank Summa dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang
 - 1997- 2003 : PT Bank IFI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Unit Usaha Syariah
 - 2007 : PT Bank Victoria International, Tbk
 - 2008-2010 : PT. Bank Swaguna dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan
 - 2010-2016 : PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional
 - Sejak 8 September 2016 sebagai Komisaris Independen PT. Bank Victoria Syariah

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors





Firman Ananda Moeis

Direktur Utama

- WNI, lahir di Jakarta 29 Mei 1961
- Business Administration (Bachelor Degree), University of Southern California (USA)
- 1985-1989 : Bank Swaguna sebagai Branch Manager
- 1989-2016 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Branch Operation Head Cabang Gambir, Marketing Division Head Cabang Gambir, Branch Manager Cabang Lampung, Bussiness Manager Area Fatmawati & Gambir, Banking Head Commercial Cabang Utama Gajah Mada, Area Manager UKM untuk Area Lampung-Bandung-Semarang-Jogyakarta-Surabaya-Bali, Area Manager Jkt-I Sales and Services, Head of Commercial Linkage dan Head of Syariah Banking yang membawahi 29 Cabang Syariah di wilayah Sumatera, Jawa , Bali dan Indonesia Timur
- Sejak Mei 2016 sebagai Direktur Utama Bank Victoria Syariah



Andy Sundoro

Direktur

- WNI, lahir di Yogyakarta 11 Maret 1968
- Sarjana Teknik Elektro, Universitas Trisakti Jakarta, tahun 1990
- Master of Business Administration, Colorado State University - USA, tahun 1994
- 1989 : PT Suwantara Indonesia sebagai Engineering Sales
- 1994-1997 : PT Bank LTCB Central Asia sebagai Account Officer
- 1997-2005 : PT Bank Panin Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Corporate Banking
- 2005-2006 : PT Bank DBS Indonesia sebagai Relationship Manager Enterprise Banking
- Juli 2006 - 2015 : PT Bank Victoria International, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Divisi Commercial Banking, Kepala Divisi Corporate Banking, dan Kepala Divisi Credit Analyst
- Sejak Juni 2015 sebagai Direktur PT Bank Victoria Syariah

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Deddy Effendi Ridwan

Direktur

- WNI, lahir di Pekanbaru 19 November 1958.
- Sarjana Ekonomi - Akuntansi, Universitas Indonesia, tahun 1986
- Magister Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti, tahun 2015
- 1986-2015 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Internal Audit (Credit, Operation, IT, Human Resourcess dan pengembangan metode/kebijakan Audit), Area Operation Head - Wilayah Jakarta, Control Unit Head Area Jakarta, Group Head of System and Operation, yang merangkap Information Security, Group Head of Finance and Accounting, Group Head of Budgeting & Cost Management dan Corporate Banking Advisor
- Proyek khusus, 1998 : PT. Bank Niaga, Tbk yaitu Project Perubahan Core Banking System; Business Process Reengineering dan pengembangan/pemeliharaan System Parameter pada Group Teknologi Sistem Informasi
- Proyek khusus, 2008-2009 : PT. Bank CIMB Niaga, proyek integrasi proses di Finance & Accounting Bank hasil merger
- 2008-2010 : Niaga Management Citra (afiliasi perusahaan Bank CIMB Niaga) sebagai Komisaris
- 2010-2013 : PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Head of Finance
- 2015-2016 : PT. Bank BTN, Tbk sebagai Anggota Komite Audit
- Sejak 8 September 2016 sebagai Direktur Bank Victoria Syariah



Nurani Raswindriati

Direktur Kepatuhan

- WNI, lahir di Malang 1 Juni 1962
- Sarjana Ekonomi-Akuntansi, Universitas Padjadjaran-Bandung, tahun 1986
- Magister Manajemen Universitas Gajah Mada-Yogyakarta, tahun 2005
- 1986-2007 : PT. Bank Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Credit Auditor, Credit Audit policy, Credit and Support Head untuk Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Agency Unit Head di Corporate Banking Group, Credit Compliance and Support Head, Commercial Banking Audit Head dan Special Asset and Recovery Head untuk Wilayah Timur.
- 2002-2005 : PT Niaga International Factors (anak perusahaan dari Bank Niaga) Director Finance and Operation
- 2007-2012 : PT. Bank Permata sebagai Credit Risk Control Head, Risk Management Group
- 2012-2015 : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan berbagai jabatan yaitu Senior Bank Examiner, Director Banking Risk Analysis Group dan Senior Advisor untuk Policy and Standard Operating Procedure Development
- 2015-2016 : PT. Bank BTN, Tbk dan PT. Bank Resona Perdania sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
- Sejak 8 September 2016 sebagai Direktur Kepatuhan Bank Victoria Syariah

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of the Board Sharia Supervisory





Prof. Dr. H. Hasanuddin A.F. MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

- WNI, lahir di Majalengka, tahun 1945
 - Sarjana Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, tahun 1974
 - S2 (MA), IAIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, tahun 1989
 - S3 (Doktor), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1994
-
- Sejak 26 Maret 2010 Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah



Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah

- WNI, lahir di Donggala-Sulawesi Tenggara, tahun 1945.
 - Sarjana Syariah (S1), Universitas Al-Khiraat Palu, tahun 1975.
 - S2 (MA), Universitas Al-Azhar (Cairo-Mesir), tahun 1981
 - S3 (Doktor), Universitas Al-Azhar (Cairo-Mesir), tahun 1984
-
- Sejak 10 November 2011 sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah

Profil Pejabat Eksekutif

Profile of the Executive Officers



M. Fajar Hermawan

Kepala Skai

- Lahir di Jakarta 22 Januari 1970
- D3 Marketing Manajemen, Akademi Pimpinan Perusahaan, tahun 1993
- 1993-1995 : PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Staf Operasional Cabang Cipulir
- 1995-1996 : PT. Bank Sinergi dan PT. Bank Ratu sebagai Staff Operasional
- 1998-2005 : PT. Bank Mega dengan posisi terakhir sebagai Auditor SKAI
- 2011-2013 : PT. Bank Capital sebagai Staf Sistem dan Prosedur
- 2013-2015 : PT. Bank Victoria International, Tbk. sebagai Kepala Bagian Sistem dan Prosedur
- Sejak 2015 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala SKAI



Adriansyah

Kepala Divisi Keuangan Dan Umum

- Lahir di Jakarta 14 September 1969
- Sarjana Ekonomi, Universitas Pancasila Jakarta, tahun 1992
- 1992-1996 : PT. Bank Pelita sebagai junior officer, Divisi Financial Management and Accounting
- 1996-2012 : PT Bank Mayora dengan berbagai jabatan yaitu Dept. Head Loan Admin, Dept. Head Accounting & Reporting dan Dept. Head Corporate Plan
- 2012 : Fast Offshore Pte Ltd, Singapore sebagai Accounting, Finance and Tax Manager (Area Indonesia)
- 2012 - 2014 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Dept. Head Regulatory Reporting
- Sejak Februari 2014 : PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Akunting, Perencanaan Keuangan dan Umum



Bambang Hariyanto

Kepala Divisi Pengembangan Cabang Dan Pendanaan

- Lahir di Semarang 20 April 1984
- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, tahun 2006
- 2007-2014 : PT. Bank Victoria International, Tbk dengan berbagai jabatan antara lain lulus Officer Development Program (ODP) pada tahun 2007 dan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Kredit Komersial pada tahun 2014
- Sejak November 2014 di PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Divisi Pembiayaan, Kepala Divisi Jaringan Cabang dan Pendanaan dan Kepala Divisi Rivi Pembiayaan



Bambang Febri

Kepala Divisi Pembiayaan Komersial & Jaringan Cabang

- Lahir di Palembang, 04 Februari 1976.
- Sarjana Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2000.
- 2001 : Majalah Gatra sebagai Jurnalis
- 2002-2003 : PT Surveyor Indonesia
- 2003-2013 : Bank Mega dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager
- 2013 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Team Leader Divisi Kredit Korporasi Kantor Pusat
- 2017 : PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Komersial & Jaringan Cabang

Profil Pejabat Eksekutif

Profile of the Executive Officers



Endro Purwoko

Kepala Divisi TSI

- Lahir di Jakarta 23 Juni 1969
- Sarjana Management Informatika, STMIK Gunadarma Depok, tahun 1994
- 1995-1999 : PT. Bank Dagang dan Industri, Tbk sebagai IT and Operation Staff
- 2000-2011 : PT. Bank ICB Bumiputera Tbk dengan berbagai jabatan antara lain IT & Support Unit, ATM, E-Banking, Core Banking System
- 2011-2017 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian Teknologi Sistem Informasi
- Sejak 1 Oktober 2017 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi



Gumanda Haposan Tambunan

Kepala Divisi Pengelolaan Aset Khusus

- Lahir di Jakarta 20 September 1961.
- Sarjana Ekonomi Akuntansi, STIE Perbanas, tahun 1984
- 1985-2016 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Senior Checker Accounting Dept., Account Officer Jakarta, Senior Manager Special Asset Management, dan terakhir sebagai Vice President - Asset Quality Management
- Sejak 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Aset Khusus



Medi Sejati

Kepala Divisi Kepatuhan

- Lahir di Jakarta 29 September 1965.
- D3 Manajemen Perbankan, AKPI, tahun 1989
- 1984 - 1986 : PT Jasa Marga sebagai Kolektor/ Pengumpul Tol
- 1990-1991 : PT. Bank Swadesi sebagai Teller
- 1991-1999 : PT. Bank Intan sebagai Kepala Seksi Kredit Support
- 1999 - 2002 : Kantor Akuntan Publik Edi Kaslim dan Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Djuwono (GPJ) sebagai Auditor
- 2002-2007 : PT. Bank Harmoni sebagai Kepala Bagian Akunting
- 2007-2008 : PT. Bank Index Selindo sebagai Kepala Bagian Akunting
- 2008-2010 : PT. Bank Swaguna sebagai Kepala Divisi Akunting
- Sejak 2010 di PT Bank Victoria Syariah dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan



Rinaldi Taufik

Kepala Divisi Sdi

- Lahir di Bandung 06 November 1967
- Sarjana Informatika, ST Inten Bandung, tahun 1993
- 1996-2011 : PT. Bank International Indonesia dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Bagian EDP, Dept. Head Development Analyst, E-Learning & Library Management dan Dept. Head Hubungan Industrial & Outsourcing
- 2011-2012 : Smart Multi Finance (SMF) dengan jabatan sebagai Kepala Bagian HR Policy & System
- 2012-2016 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian pada Human Capital Management
- Sejak 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Insani

Profil Pejabat Eksekutif

Profile of the Executive Officers



Sasongko Mulyo

Kepala Divisi Manajemen Risiko

- Lahir di Jakarta 29 November 1961
 - Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial (SSos), Universitas Indonesia, tahun 1987
 - Magister Manajemen (MM), Finance, Universitas Gajah Mada, tahun 2005
-
- 1990-2016 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu lulus Program Pendidikan Executive, Commercial Marketing Lending dan Commercial Credit Reviewer
 - Sejak 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko



Soni Sonjaya

Kepala Divisi Komersial

- Lahir di Jakarta 20 Mei 1971
 - Sarjana Ekonomi - Manajemen Keuangan dan Perbankan, STIE Perbanas, tahun 1995
-
- 1995 : Asuransi Sewu New York Life sebagai Agency Supervisor
 - 1995-2003 : PT. Bank Universal sebagai Account Officer
 - 2003-2016 : PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu UKM Center Head, Automotive Indirect Business Div. Head, Automotive Indirect Business & Product Development, Automotive Direct Business Group Head, Group Head Financial Distribution & Commercial Linkage Syariah, Group Head Small Medium Micro Enterprise dan Special Project Manager pada Special Asset Management - Asset Restructuring & Recovery
 - Sejak 2016 di PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Komersial Linkage



Suyat

Kepala Divisi Operasional

- Lahir di Yogyakarta 21 Juni 1978
- Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 2002-2008 : PT. Bank Kesawan (QNB) dengan jabatan terakhir Kepala Seksi Operasional KC Tanah Abang
- 2008-2011 : PT. Bank Mega Syariah dengan jabatan terakhir Regional Internal Control Manager
- Sejak 2011 di PT. Bank Victoria Syariah dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Operasional

Profil Pimpinan Cabang

Profile of Branch Managers



Ikawati

Kepala Kantor Cabang Utama

- Lahir di Jakarta 07 April 1967
- Sarjana Ekonomi, Dharma Persada University
- 1991 : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai Teller
- 2008-2010 : PT. Bank Danamon Syariah sebagai Team Leader
- 2010-2013 : PT. Bank Sinarmas Syariah sebagai Relationship Manager
- Sejak Agustus 2013 di PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Pimpinan Capem Depok, Pimpinan Capem Tebet dan Pimpinan Cabang Utama



Rr Mini Sumandari

Kepala Kantor Cabang Bekasi

- Lahir di Yogyakarta 26 Mei 1975
- Sarjana Ekonomi Akuntansi Keuangan dan Perbankan, STIE Perbanas Jakarta, tahun 1998
- 1998-2007 : PT. Bank Bali dan PT. Bank Permata dengan berbagai jabatan yaitu Teller Cabang Iskandarsyah Jakarta, Customer Service Cabang Iskandarsyah Jakarta, Customer Service Cabang Wolter Monginsidi Jakarta, Personal Financial Consultant Cabang Wolter Monginsidi Jakarta
- 2007-2014 : PT. Bank Mega Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Funding Officer pada Capem Panglima Polim Jakarta, Senior Funding Officer di KCU Tendean Jakarta, Funding Manager KCU Tendean Jakarta, dan Kepala Capem Enggano Jakarta
- Sejak 2014 di Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Cabang Bekasi



Yunus Syahrizar Bahar

Kepala Kantor Cabang Serang

- Lahir di Jakarta 17 Juni 1971
 - Sarjana Komputer-Management Informatika, STMIK Gunadarma, tahun 1995
 - Master Of Commerce In Information Systems and Technology, Macquarie University of Sydney Australia, tahun 2001
-
- 1996-2008 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. CIMB Niaga Tbk dengan berbagai jabatan yaitu lulus Management Trainee, Sales Head di Unit Syariah Surabaya
 - 2011 : PT. Bank BJB Syariah sebagai Kepala Cabang
 - Sejak 1 Juni 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Cabang Serang



Wb. Wisnubrata .Dp, Ir.

Kepala Kantor Cabang Bandung

- Lahir di Jakarta 11 Oktober 1971
 - Sarjana Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma Jakarta
-
- 1994-2007 : PT. Bank Niaga, Tbk dengan posisi terakhir sebagai AO Lending Commercial
 - 2007-2013 : PT. Bank Mega dengan jabatan antara lain sebagai Branch Manager Cinere dan Branch Retail Banking Manager
 - Sejak 2013 di Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan antara lain Kepala Sie. Pembiayaan Commercial, Branch Manager Serang, Senior Special Asset Management, dan terakhir sebagai Branch Manager Bandung

Profil Pimpinan Cabang

Profile of Branch Managers



Edi Sasmita

Kepala Kantor Cabang Cirebon

- Lahir di Cirebon 14 Februari 1974
 - Sarjana Ahli Madya, IKOPIN Bandung, tahun 1997
-
- 2003-2010 : PT. Bank Swaguna sebagai Account Officer
 - 2010-sekarang : PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Senior Account Officer, Kepala Operasional Capem Arjawinangun, Kepala Capem Arjawinangun & Kuningan dan terakhir sebagai Pimpinan Cabang Cirebon



Djaenudin Djuhri

Pjs Kepala Kantor Cabang Tegal

- Lahir di Tegal 27 September 1963
 - Sarjana Akuntansi, STEI Rawamangun, tahun 1987
-
- 1990-2010 : PT Bank Swaguna sebagai Kepala Operasional Tegal
 - Sejak 2010 di PT Bank Victoria Syariah sebagai Pjs. Kepala Kantor Cabang Tegal



Rusmiati

Kepala Kantor Cabang Solo

- Lahir di Magetan, 02 Februari 1972
- Sarjana Sastra Inggris, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 1994
- Mulai berkarier di Bank sejak tahun 1995 dengan start karier sebagai Customer Service
- 2009-2013 : PT. Bank Mega Syariah sebagai Branch Manager
- Sejak 2013 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Branch Manager Solo



I Gusti Ayu Ngurah Tri Meiniyanti

Kepala Kantor Cabang Denpasar

- Lahir di Malang 31 Mei 1971
- Lulus Pendidikan Sekretaris, STIMI Handayani, tahun 1995
- 1993-1994 : PT. Rasenta sebagai Administrasi
- 1994-2016 : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan antara lain Teller dan jabatan terakhir sebagai Sales Manager KPR
- Sejak September 2016 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Kantor Cabang Denpasar

Profil Komite

Profile of Committees



Retno Dwijanti Widaningsih

Anggota Komite Audit

- WNI, lahir di Jakarta tahun 1959
- Sarjana Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Institut Bankir Indonesia, tahun 1998
- 1982-2006 : Deutsche Bank AG sebagai Head of Group Audit
- Sejak 2013 di PT. Bank Victoria Syariah sebagai anggota Komite Audit di Bank Victoria Syariah



Supriyono

Komite Pemantau Risiko

- WNI, lahir di Yogyakarta 10 Juni 1952
- Sarjana Ekonomi, Universitas Dr Soetomo, Surabaya
- 1977-1999 : PT. Bank Dagang Negara dengan berbagai jabatan yaitu di Cabang Palu, Analis Kredit Korporasi Dua, di Cabang Korporasi Surabaya Genteng Kali
- 1999-2008 : PT. Bank Mandiri, Tbk dengan berbagai jabatan di Credit Risk Management, Regional 8 Commercial-Surabaya, Bali dan Credit Risk & Policy Group, Jakarta
- 2011-2012 : Kantor Akuntan Publik Labib Y. Wardiman, Jakarta
- Sejak 2012 di Bank Victoria Syariah sebagai anggota Komite Pemantau Risiko

**Pangulu Oloan Simorangkir****Anggota Komite Pemantau Risiko**

- WNI, lahir di Jambi 29 Juni 1951.
- Sarjana Sosial Politik/Administrasi Niaga, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1976
- Magister Manajemen, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2001
- 1976-2007 : PT. Bank Ekspor Import Indonesia dan PT. Bank Mandiri, Tbk dengan berbagai jabatan antara lain Kepala Cabang Semarang, Profesional Manager dan Penyusunan Evaluasi Pencapaian Target Cabang
- 2007-2010 : PT. Bank Swaguna sebagai Komisaris Utama
- 2010-2016 : PT. Bank Victoria Syariah dengan berbagai jabatan yaitu Komisaris Utama dan Komisaris
- Sejak September 2016 di PT Bank Victoria Syariah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Produk dan Layanan

Product and Services

bank victoria
Syariah



Tabungan V-PLAN iB

Wujudkan impian Anda mulai dari sekarang

Tabungan Visya iB

Simpanan dalam bentuk investasi Syariah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan.

bank victoria
Syariah



Tabungan VISYA iB

GRATIS tarik tunai di seluruh ATM berlogo PRIMA

Tabungan V-Plan iB

Simpanan dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) yang penarikannya memiliki jangka waktu sesuai kesepakatan dengan nasabah.

bank victoria
Syariah



DEPOSITO iB

Tumbuh bersama investasi yang aman dan terpercaya

Tabungan Bisnis iB

Merupakan Jenis Tabungan dengan prinsip mudharabah (BagiHasil), diperuntukkan bagi nasabah Perorangan dan Perusahaan yang mendapatkan Bagi Hasil Setara Deposito. Tabungan Xtra Berhadiah SMP)

bank victoria
Syariah



Tabungan VIS BERHADIAH X-TRA iB

Tentukan hadiahmu diawal

Giro Prima

Merupakan Giro yang diperuntukkan untuk segment perusahaan dengan akad mudharabah yang mendapat bagi hasil tearing sesuai dengan saldo harian nasabah.

bank victoria
Syariah



Tabungan BISNIS iB

Dapatkan bagi hasil yang maksimal

Giro iB - Wadiah (Titipan)

Merupakan Rekening Giro untuk nasabah perorangan maupun badan hukum, yang memiliki fasilitas cek dan Bilyet Giro. Giro Vis Prima Giro dengan prinsip bagi hasil.

bank victoria
Syariah



Tabungan PAYROLL iB

Bagi hasil yang menguntungkan

Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank dengan Akad yang digunakan adalah akad mudharabah

bank victoria
Syariah



Tabungan GIRO iB
Kemudahan anda bertransaksi

Tabungan Visya Payroll iB

Simpanan dalam bentuk investigasi syariah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan

bank victoria
Syariah



Tabungan GIRO PRIMA iB
Bisnis dengan bagi hasil prima

Tabungan Vis Hadiah X-tra

Merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan dan perusahaan yang mendapat hadiah dimuka sesuai keinginan nasabah dengan penempatan nominal tertentu (diblokir) dan jangka waktu tertentu

bank victoria
Syariah



Tabungan SIMPEL iB
Tabungan untuk pelajar Indonesia

Tabungan Simpel iB

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar Indonesia

Pembiayaan

Financing

bank  victoria
Syariah



UKM ViS iB

Sukses bersama wirausaha cerdas

UKM ViS iB

Adalah pembiayaan untuk investasi usaha / pembiayaan modal kerja (pembiayaan kas, piutang usaha maupun persediaan) dengan pengembalian sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati antara Bank dan pelaku usaha UKM.

bank  victoria
Syariah



KMG ViS iB

Wujudkan segera harapan Anda

KMG ViS iB

Adalah merupakan produk pembiayaan kepemilikan barang multiguna untuk kebutuhan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah menjual barang/ benda kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

bank  victoria
Syariah



PPM ViS iB

Segera bawa pulang mobil idaman Anda dan Keluarga

PPM ViS iB

Adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil untuk keperluan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah menjual mobil kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah margin yang disepakati.

bank  victoria
Syariah



PPR ViS iB

Wujudkan rumah impian Anda dan Keluarga

PPR ViS iB

Adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah untuk keperluan konsumtif yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah membiayai pembelian rumah kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah margin yang disepakati.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jaringan Kantor

Office Network



KANTOR PUSAT & KANTOR CABANG TOMANG

GEDUNG THE VICTORIA

Jalan Tomang Raya Kav. 35-37 Lantai 1-3
Jakarta Barat
Telp : (021) 5600467 (hunting)
Fax : (021) 5664247
Website : www.bankvictoriasyariah.com

KANTOR CABANG

Cabang	Alamat	Telp	Fax
Bekasi	Ruko Bekasi Square No.63 Jl. Jend. Ahmad Yani , Pekayon Bekasi	021-82434874-75	021-82434876
Serang	Jl. Jend Ahmad Yani No. 152 A Serang – Banten	0254-227621	0254-227622
Bandung	Jl. Gatot Subroto No. 3 Bandung – Jawa Barat	022-87340303	022-87340311
Cirebon	Cirebon Super Block, Blok GS/5, Jl Dr Cipto Mangunkusumo No. 26 Cirebon, Jawa Barat	0231-8291051-52	0231-8291053
Tegal	Ruko Nirwana Square Blok A/12B Tegal – Jawa Tengah	0283-351024	0283-351027
Denpasar	Ruko Tuban Plaza No. 44-45 Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai, Tuban. Kuta – Badung- Bali	0361-753531-32	0361-768081
Solo	Ruko Honggowongso Square Blok A/7 Solo – Jawa Tengah	0271-660832	0271-660932

KANTOR CABANG PEMBANTU

Cabang Pembantu	Alamat	Telp	Fax
Tebet	Grand Soepomo Jl, Prof Dr. Soepomo SH Blok A lt. 2 No.73 Tebet – Jakarta Selatan	021-83785567	021-83785569
Pasar Induk Kramat Jati	Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D2/33 Jl. Raya bogor Km. 17 Kramat Jati – Jakarta Timur	021-87797573	021-87797574
Depok	Jl. Kemakmuran Raya No. 25A Kelurahan Mekarjaya Kec. Sukmajaya, Depok Tengah II - Depok	021- 7702882	021- 7703340
Tangerang	Ruko Modern Land Blok AR/23 Jl. Jendral Sudirman Cikokol Tangerang – Banten	021-55747698	021-55747699
Bandung-Braga	Braga Plaza Jl. Braga No. 5-11 Bandung Jawa Barat	022-4204941	022-4260676

PT Bank Victoria Syariah

Laporan Keuangan/

Financial Statements

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016/

For the Years Ended December 31, 2017 and 2016

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016/
The Directors' Statement on the Responsibility for Financial Statements of PT Bank Victoria Syariah for the Years Ended December 31, 2017 and 2016

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016/
FINANCIAL STATEMENTS – For the Years Ended December 31, 2017 and 2016**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas/ <i>Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	5
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil/ <i>Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing</i>	6
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	7
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	8
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	9

Laporan Auditor Independen**No. 03041218SA****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi****PT Bank Victoria Syariah**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report**No. 03041218SA****The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors****PT Bank Victoria Syariah**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Victoria Syariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2017, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakah funds, and statement of sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Victoria Syariah tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Victoria Syariah as of December 31, 2017, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Izin Akuntan Publik No. AP.0148/Certified Public Accountant License No. AP.0148

5 Maret 2018/March 5, 2018

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

PT BANK VICTORIA SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card

Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card

Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016**

PT BANK VICTORIA SYARIAH

We, the undersigned:

- : **FIRMAN ANANDA MOEIS**
: Gedung The VICTORIA Lt.3
: Jl. Tomang Raya Kav 35-37
: JAKARTA BARAT 11440

- : Jl. H.SAIDI 3/17
: RT 010/002, Cipete Selatan
: Cilandak – JAKARTA SELATAN

- : (021) 5600467
: Direktur Utama / President Director

- : **DEDDY EFFENDI RIDWAN**
: Gedung The VICTORIA Lt.3
: Jl. Tomang Raya Kav 35-37
: JAKARTA BARAT 11440

- : Taman Sari Persada Blok 16 No.7
: RT 003/001, Jatibening Baru
: Pondok Gede – BEKASI

- : (021) 5600467
: Direktur / Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.




3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
- b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and

- b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

05 Maret 2018/ March 05, 2018

Materai Rp 6.000



Firman Ananda Moeis
Direktur Utama / President Director

Deddy Effendi Ridwan
Direktur / Director

	2017	Catatan/ Notes	2016	
ASET				ASSETS
Kas	5.410.839.600		3.584.265.600	Cash
Giro pada Bank Indonesia	85.512.539.440	4	50.703.532.464	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	2.710.051.260	5	6.359.796.829	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	274.000.000.000	6	87.000.000.000	Placement with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek	320.281.945.394	7	237.032.133.568	Marketable securities
Piutang murabahah	325.631.988.276	8	259.767.694.726	Murabahah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.264.568.617)		(21.769.356.487)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah piutang murabahah - bersih	322.367.419.659		237.998.338.239	Total murabahah receivables - net
Pembiayaan musyarakah	868.014.110.047	9	929.535.048.991	Musyarakah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.208.263.314)		(20.598.190.723)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pembiayaan musyarakah - bersih	855.805.846.733		908.936.858.268	Total musyarakah financing - net
Pembiayaan mudharabah	64.197.635.203	10	20.070.624.069	Mudharabah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(711.865.985)		(63.759.618)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pembiayaan mudharabah - bersih	63.485.769.218		20.006.864.451	Total mudharabah financing - net
Piutang Ijarah	181.738.611		176.874.497	Ijarah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.937.500)		(5.937.500)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pendapatan ijarah - bersih	175.801.111		170.936.997	Ijarah receivables - net
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	8.311.142.412	11	7.561.804.873	Revenue sharing receivable
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	5.082.670.332		3.316.608.154	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham	60.468.550		60.468.550	Investments in shares
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.686)		(604.686)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah penyertaan saham - bersih	59.863.864		59.863.864	Total investments in shares - net
Aset tetap	10.592.740.180	12	10.463.149.981	Property and equipment
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(9.165.435.733)		(8.797.082.936)	Less: Accumulated depreciation
Jumlah aset tetap - bersih	1.427.304.447		1.666.067.045	Total property and equipment - net
Aset tak berwujud	5.319.382.677	13	5.299.702.675	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(3.247.975.923)		(2.261.780.388)	Less: Accumulated amortisation
Jumlah aset tak berwujud - bersih	2.071.406.754		3.037.922.287	Total intangible assets - net
Biaya dibayar di muka	7.331.357.227	14	6.291.125.577	Prepaid expenses
Aset lain-lain	29.857.259.254	15	30.180.787.928	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.906.782.129)		(3.498.651.564)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah aset lain-lain - bersih	25.950.477.125		26.682.136.364	Total other assets - net
Aset pajak tangguhan	23.129.287.079	34	24.774.994.774	Deferred tax assets
JUMLAH ASET	2.003.113.721.655		1.625.183.249.354	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2017	Catatan/ Notes	2016	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	4.494.773.026	16	3.372.927.636	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	37.470.907.665	17	37.132.349.505	Wadiah demand deposits
Simpanan dari bank lain	150.000.000.000	18	178.000.000.000	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.752.842.657	19	3.998.183.434	Undistributed revenue sharing
Pendapatan ditangguhkan	1.423.934.903		1.297.023.747	Deferred income
Utang pajak	2.161.557.370	20	1.322.287.986	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	676.933.643		494.586.049	Other liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	7.452.301.217	33	6.437.357.670	Long term employment benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS	208.433.250.481		232.054.716.027	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER		21		TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Tabungan mudharabah	43.765.684.409		40.157.242.708	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	1.451.521.737.764		1.158.523.106.555	Mudharabah deposits
Giro mudharabah	150.000		118.652.689	Mudharabah demand deposits
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	1.495.287.572.173		1.198.799.001.952	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS				SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham				Share capital
Nilai nominal Rp1.000 per saham, Modal dasar - 1.000.000.000 saham dan 320.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016				Nominal value Rp 1,000 per share, Authorized - 1,000,000,000 shares and 320,000,000 shares as of December 31, 2017 and 2016, respectively, issued and paid-up capital - 270,000,000 shares and 210,000,000 shares as of December 31, 2017 and 2016, respectively.
Modal ditempatkan dan disetor 270.000.000 saham dan 210.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	270.000.000.000	22	210.000.000.000	
Uang muka setoran modal	40.000.000.000	23	-	Capital paid-up in advance
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	29.032.674		(178.327.458)	Unrealised gain (loss) from changes in fair value of available-for-sale marketable securities
Saldo laba (Defisit)				Retained Earnings (Deficit)
Telah ditentukan penggunaannya	9.156.165.256	24	9.156.165.256	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(19.792.298.929)		(24.648.306.423)	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	299.392.899.001		194.329.531.375	TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	2.003.113.721.655		1.625.183.249.354	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDER'S EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2017	Catatan/ Notes	2016	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		25		Income from fund management by Bank as mudharib
Pendapatan dari penjualan - murabahah	25.332.378.995		29.043.474.457	Income from sales - murabahah
Pendapatan dari bagi hasil	96.027.779.677		69.402.653.449	Income from profit sharing
Pendapatan dari ijarah - bersih	655.391.320		301.580.861	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	31.679.872.730		23.514.924.645	Other main operating income
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	153.695.422.722		122.262.633.412	Total income from fund management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(101.060.090.114)	26	(84.096.368.699)	Third parties' share on returns of temporary syirkah funds
Hak bagi hasil milik Bank	52.635.332.608		38.166.264.713	Bank's share in profit sharing
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan operasional lainnya	3.332.227.019	27	968.554.521	Other operating income
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Pemulihan (beban) cadangan kerugian penurunan nilai	598.911.929	30	(31.614.177.200)	Recovery (allowances) for impairment losses expenses
Beban personalia	(29.903.114.028)	29	(27.161.821.136)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(18.886.443.554)	28	(18.396.017.749)	General and administrative expenses
Beban lainnya	(1.521.646.342)		(582.214.169)	Other expenses
Jumlah beban operasional lainnya	(49.712.291.995)		(77.754.230.254)	Total other operating expenses
LABA (RUGI) OPERASIONAL	6.255.267.632		(38.619.411.020)	PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH	(156.315.645)	31	10.735.235.193	NON OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	6.098.951.987		(27.884.175.827)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	1.505.463.924	34	(9.410.288.521)	TAX EXPENSE (BENEFIT)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	4.593.488.063		(18.473.887.306)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified subsequently to profit and loss
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	207.360.132		(178.327.458)	Unrealised gain (loss) on changes in fair value of available for sales marketable securities
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - setelah dampak pajak tangguhan	262.519.431	33	329.477.525	Remeasurement of defined benefit liability - net of tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	5.063.367.626		(18.322.737.239)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Uang Muka Setoran Modal/ Capital Paid-up in Advance	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Surat - surat Berharga yang Tersedia untuk Dijual/ Unrealized Gain (Loss) from Changes in Fair Value of Available-for-sale Marketable Securities	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Jumlah Ekuitas/ Shareholders' Equity
				Penggunaan Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaan Unappropriated	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2016	160.000.000.000	-	-	9.156.165.256	(6.503.896.642)	162.652.268.614
Rugi Komprehensif	-	-	-	-	-	-
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(18.473.887.306)	(18.473.887.306)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	(178.327.458)	-	-	(178.327.458)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	329.477.525	329.477.525
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	-	(18.144.409.781)	(18.322.737.239)
Setoran modal	50.000.000.000	-	-	-	-	50.000.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	210.000.000.000	-	(178.327.458)	9.156.165.256	(24.648.306.423)	194.329.531.375
Rugi Komprehensif	-	-	-	-	-	-
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	4.593.488.063	4.593.488.063
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	207.360.132	-	-	207.360.132
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	262.519.431	262.519.431
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	207.360.132	-	4.856.007.494	5.063.367.626
Uang muka setoran modal	-	40.000.000.000	-	-	-	40.000.000.000
Setoran modal	60.000.000.000	-	-	-	-	60.000.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	270.000.000.000	40.000.000.000	29.032.674	9.156.165.256	(19.792.298.929)	299.392.899.001

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2017	Catatan/ Notes	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib:				Receipt of income from fund management by Bank as mudharib:
Penerimaan dari penjualan murabahah	25.850.940.159	11,25	29.647.744.223	Receipt from sales murabahah
Penerimaan dari pendapatan bagi hasil	96.782.438.900	11,25	69.208.435.056	Receipt from profit sharing income
Penerimaan dari pendapatan ijarah	655.600.095	11,25	292.455.998	Receipt from income ijarah
Penerimaan dari usaha lainnya	30.538.676.409	11,25	22.728.839.780	Receipt from other main operating income
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(101.060.090.114)	19,26	(84.096.368.699)	Payment of profit sharing of temporary syirkah funds
Penerimaan operasional lainnya	825.362.362	27	968.554.521	Receipt from other operating income
Pembayaran beban operasional lainnya	(18.843.327.111)	30	(16.201.155.808)	Payment for other operating expenses
Pembayaran beban kepegawaian	(28.538.144.573)	29	(26.250.750.360)	Payment for personnel expenses
Pembayaran pendapatan non-operasional	(232.471.609)	31	(5.155.841)	Payment of non-operating income
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	5.978.984.518		(3.707.401.130)	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Piutang murabahah	(77.133.752.476)	8	51.084.984.975	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	47.550.831.451	9	(221.570.671.156)	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	(44.127.011.134)	10	(15.493.153.148)	Mudharabah financing
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	(1.760.547.575)		(632.037.911)	Assets acquired for ijarah - net
Aset lainnya	(748.156.185)	15	(14.753.746.114)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	1.121.845.390	16	1.061.342.743	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	338.558.160	17	(8.519.217.545)	Wadiah demand deposit
Simpanan dari bank lain	(28.000.000.000)	18	128.000.000.000	Deposit from other Banks
Liabilitas lain-lain	182.347.594		123.783.333	Other liabilities
Utang pajak lainnya	839.269.384	20	(371.368.308)	Other tax payable
Dana syirkah temporer	296.488.570.221	21	93.393.422.346	Temporary syirkah fund
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	200.730.939.348		8.615.938.085	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan (pembelian) surat-surat berharga diukur pada biaya perolehan	(34.334.167.425)	7	3.116.809.297	Sales (purchase) of marketable securities at cost
Pembelian surat-surat berharga tersedia untuk dijual	(46.148.682.316)		(9.878.327.458)	Purchase of marketable securities available for sale
Hasil penjualan aset tetap	88.183.119	12	19.702.656.447	Sale of property and equipment
Perolehan aset tetap	(330.757.317)	12	(177.508.009)	Acquisition of property and equipment
Perolehan aset tak berwujud	(19.680.002)	13	(1.359.042.800)	Purchase of intangible assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(80.745.103.941)		11.404.587.477	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM A FINANCING ACTIVITIES
Penambahan modal disetor	60.000.000.000	22	50.000.000.000	Proceeds from additional issuance of share capital
Uang muka setoran modal	40.000.000.000	23	-	Capital paid-up in advance
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	100.000.000.000		50.000.000.000	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	219.985.835.407		70.020.525.562	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	147.647.594.893		77.627.069.331	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	367.633.430.300		147.647.594.893	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	5.410.839.600		3.584.265.600	Cash
Giro pada Bank Indonesia	85.512.539.440	4	50.703.532.464	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.710.051.260	5	6.359.796.829	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan	274.000.000.000	6	87.000.000.000	Placement with Bank Indonesia and other Bank with maturity three months or less from acquisition date
JUMLAH	367.633.430.300		147.647.594.893	TOTAL

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2017	Catatan/ Notes	2016	
Pendapatan usaha utama (akrual)		25		Main operating income (accrual)
Pendapatan dari jual beli	25.332.378.995		29.043.474.457	Income from sales and purchases
Pendapatan bagi hasil	96.027.779.677		69.402.653.449	Income from profit sharing
Pendapatan dari ijarah - bersih	655.391.320		301.580.861	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	31.679.872.730		23.514.924.645	Other main operating income
	<u>153.695.422.722</u>		<u>122.262.633.412</u>	
Pengurang				Deductions
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:		11		Current year income in which the cash and cash equivalents were not received:
Pendapatan keuntungan murabahah	2.495.257.247		2.886.907.254	Murabahah margin income
Pendapatan ijarah	11.704.614		11.913.389	Ijarah income
Pendapatan usaha utama lainnya	5.804.180.551		4.662.984.230	Other main operating income
	<u>8.311.142.412</u>		<u>7.561.804.873</u>	
Penambah				Additions
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:		11		Prior year income in which the cash were received during the current year:
Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan murabahah	2.886.907.254		3.216.330.857	Receipt of settlement from murabahah margin income
Penerimaan pendapatan ijarah	11.913.389		2.788.526	Receipt of ijarah income
Pendapatan usaha utama lainnya	4.662.984.230		3.876.899.365	Other main operating income
	<u>7.561.804.873</u>		<u>7.096.018.748</u>	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	<u>152.946.085.183</u>		<u>121.796.847.287</u>	Available income for revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	<u>51.885.995.069</u>		<u>37.700.478.588</u>	Bank's share from revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	<u>101.060.090.114</u>	26	<u>84.096.368.699</u>	Fund owners' share from revenue sharing
Dirinci atas:				Details of:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	96.307.247.457		80.098.185.265	Fund owners' share on distributed revenue sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	4.752.842.657	19	3.998.183.434	Fund owners' share on undistributed revenue sharing
Jumlah	<u>101.060.090.114</u>		<u>84.096.368.699</u>	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2017	2016	
Sumber Dana Zakat			Sources of Zakah Funds
Zakat dari pihak luar bank	215.960	46.777.076	Zakah from external banks
Lain- lain	32.361.524	82.383	Others
Jumlah	32.577.484	46.859.459	Subtotal
Penyaluran Dana Zakat			Distribution of Zakah Funds
BAZNAS	(55.257.440)	(33.593.262)	BAZNAS
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	(22.679.957)	13.266.197	Increase (decrease) in Zakah Funds
Dana Zakat pada Awal Tahun	25.181.959	11.915.762	Zakah Funds at Beginning of The Year
Dana Zakat pada Akhir Tahun	2.502.002	25.181.959	Zakah Funds at End of The Year

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2017	2016	
Sumber Dana Kebajikan			Sources of Benevolence Funds
Pendapatan non-halal	394.719.119	799.362	Non-halal income
Infak dan shadaqah	36.778.368	10.805.000	Infak and shadaqah
Lainnya	2.384.028	-	Others
Jumlah	433.881.515	11.604.362	Subtotal
Penggunaan Dana Kebajikan			Use of Benevolence Funds
Dana kebajikan produktif	-	(10.080.000)	Benevolence funds productive
Sumbangan	(323.700.000)	(200.733.184)	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(40.764.707)	-	Use for other public interest
Jumlah	(364.464.707)	(210.813.184)	Subtotal
Kenaikan (penurunan) Sumber Dana Kebajikan	69.416.808	(199.208.822)	Increase (decrease) in Benevolence Funds
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	238.778.400	437.987.222	Benevolence Funds at Beginning of The Year
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	308.195.208	238.778.400	Benevolence Funds at End of The Year

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna) ("Bank") didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 dari Bebas Daeng Lalo, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian Bank telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan No. 62 tanggal 24 Mei 1968.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta No. 46 tanggal 14 November 2017 dari Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal dasar dari Rp 320.000.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH 02731.AH.01.03-0191022 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017.

Perubahan kegiatan usaha bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank beroperasi dengan prinsip Syariah mulai tanggal 1 April 2010.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan kegiatan usaha Bank adalah menjalankan usaha bank dengan prinsip syariah. Bank merupakan bank non devisa.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Gedung The Victoria, Jalan Tomang Raya Kav. 33-37 Jakarta Barat 11440 yang juga merupakan Kantor Pusat Operasional dan Kantor Pusat Non Operasional. Bank memiliki kantor cabang di Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Denpasar dan Solo dan kantor cabang pembantu di Tebet, Kramat Jati, Depok, Tangerang, dan Braga.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Bank Victoria Syariah (formerly PT Bank Swaguna) ("Bank") was established based on Notarial Deed No. 9 dated April 15, 1966 of Bebas Daeng Lalo, SH, a public notary in Jakarta. The Article of Association was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. JA.5/79/5 dated November 7, 1967 and published in State of Gazette of Republic of Indonesia No. 42, Addendum No. 62 dated May 24, 1968.

The Bank's Articles of Association have been ammended several times, with the latest amendment based on Deed No. 46 dated November 14, 2017 of Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., a public notary in Jakarta, concerning the increase in authorized share capital from Rp 320,000,000,000 to Rp 1,000,000,000,000. Amendments to the Articles of Association was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-AH 02731.AH.01.03-0191022 Year 2017 dated November 15, 2017.

The change of Bank's operation from conventional Bank to Sharia bank was approved by Bank Indonesia based on the Decision Letter of Governor of Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 dated February 10, 2010. The Bank starts to operate based on sharia principle from April 1, 2010.

In line with article 3 of the Bank's Articles of Association, the aim and objective of the Bank is to provide banking services based on sharia principle. The Bank is non foreign exchange bank.

The Bank's Head Office is located in The Victoria Building, Jalan Tomang Raya Kav 33-37 West Jakarta 11440 which is also the Operating Head Office and Non Operating Head Office. The Bank has branches in Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Denpasar, and Solo, and sub-branches in Tebet, Kramat Jati, Depok, Tangerang, and Braga.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan pengurus Bank adalah sebagai berikut:

	2017
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Sugiharto
Komisaris Independen	Djoko Nugroho
Komisaris	Sari Idayanti
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	Firman Ananda Moeis
Direktur	Deddy Effendi Ridwan
Direktur	Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	Nurani Raswindriati

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Pengawas Syariah</u>	
Ketua	: Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA
Anggota	: Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017
<u>Komite Audit</u>	
Ketua	Sugiharto
Anggota	Retno Dwiyantri Widaningsih Sari Idayanti

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017
<u>Komite Pemantau Risiko</u>	
Ketua	Djoko Nugroho
Anggota	Pangulu Oloan Simorangkir Supriyono

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

As of December 31, 2017 and 2016, the Bank's management consists of the following:

	2016
<u>Board of Commissioners</u>	
	President Commissioner
	Independent Commissioner
	Commissioner
<u>Board of Directors</u>	
	President Director
	Director
	Director
	Compliance Director

The composition of the Sharia Supervisory Boards as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

<u>Board of Sharia Supervisory</u>	
Chairman	: Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA
Member	: Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

The composition of Audit Committee as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2016
<u>Audit Committee</u>	
Chairman	Sugiharto
Member	Retno Dwiyantri Widaningsih Sari Idayanti

The composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2016
<u>Risk Monitoring Committee</u>	
Chairman	Djoko Nugroho
Member	Pangulu Oloan Simorangkir Supriyono

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016	
<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>			<u>Remuneration and Nomination Committee</u>
Ketua	Sugiharto	Sugiharto	Chairman
Anggota	Sari Idayanti M.Rinaldi Taufik S	Sari Idayanti Erik Pradityo	Member

Personel manajemen kunci Bank terdiri dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah.

Key management personnel of the Bank consists of Commissioners, Directors, Executive Officer, and Board of Sharia Supervisory.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan Bank masing-masing adalah sejumlah 221 orang dan 224 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2017 and 2016, the total employees of the Bank are 221 and 224 people respectively (unaudited).

Laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Bank pada tanggal 5 Maret 2018. Direksi Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Bank Victoria Syariah for the year ended December 31, 2017 was completed and authorized for issuance on March 5, 2018 by the Bank's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI), Otoritas Jasa Keuangan Regulations and other PSAK as long as does not contradict with sharia principle.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang disusun menggunakan dasar kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada bank lain, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber penggunaan dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal pelaporan.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal pelaporan.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting except for statement of cash flows and statement of reconciliation of income and revenue sharing which are prepared under cash basis.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with other banks, current accounts and placements with Bank Indonesia with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Statements of sources and distribution of zakah funds and statements of sources and uses of benevolence funds represents the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed. Statements of sources and distribution of zakah funds shows the sources and distribution of zakah funds for a certain period, and the undistributed zakah funds at the reporting date.

Statements of sources and uses of benevolence funds shows the sources and uses of benevolence funds for a certain period, and benevolence funds balance at the reporting date.

Zakah is a portion of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakah payer) to be given to mustahiq (the zakah receiver). The sources of zakah funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

The Bank is not directly involved in the management of zakah and benevolence funds. All funds collected by the Bank have been transferred to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2017 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2016.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah disajikan dalam Rupiah penuh.

The currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are presented in full amount of Rupiah.

b. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Bank apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

b. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Bank if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan.

e. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank's income but are used as part of the benevolence funds.

f. Penempatan Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka *mudharabah* dan/ atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Investasi *wakalah* merupakan perjanjian investasi berbasis *wakalah* dimana Bank akan mendapatkan tingkat keuntungan berupa laba diantisipasi. Dana yang diberikan Bank kemudian diinvestasikan pada produk yang halal. Hasilnya diberikan kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil investasi berupa laba aktual lebih kecil dari laba diantisipasi. Jika hasil investasi berupa laba aktual lebih besar dari laba diantisipasi maka yang diterima Bank penerima adalah sebesar laba diantisipasi dan selisihnya akan menjadi pendapatan Bank.

g. Efek-efek

Efek-efek Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan sertifikat reksadana syariah.

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, biaya perolehan termasuk biaya transaksi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi.

f. Placement with Other Banks

Placement with other banks represent placements in the form of *Mudharabah* time deposits and/or other forms of placement based on sharia principles.

Placement with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

Wakalah investment is placed fund based on *wakalah* that the Bank will receive return in form of anticipated profit. Funds given by the Bank will be invested in sharia products. Return distributed to customer were based on actual profit if the return from investment was lower than the anticipated profit. If return from investment were higher than the anticipated profit, the investee will receive an amount based on anticipated profit whilst the difference will be recognized as income of the Bank.

g. Marketable Securities

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and sharia mutual funds certificates.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk as measured at cost, at fair value through other comprehensive income or at fair value through profit and loss.

Sukuk classified as measured at cost and at fair value through other comprehensive income, is measured at acquisition cost including transaction costs.

Sukuk classified as at fair value through profit and loss, is measured at acquisition cost excluding transaction costs.

Investasi pada sukuk Ijarah dan sukuk Mudharabah setelah pengukuran awal diukur sebagai berikut:

1. Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai dalam laba rugi.
2. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan mengacu kepada kuotasi harga di pasar aktif atau harga yang terjadi pada transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif atau nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
3. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual (pokok dan bagi hasil/ujrah) dan melakukan penjualan sukuk. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laba rugi.

h. Piutang Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Investment at sukuk Ijarah and Mudharabah after the initial measurement are measured as follows:

1. Measured at acquisition cost if the investment is held within a business model whose primary goal is to obtain the contractual cash flows and there is a contractual requirements that specify a specific date of payment of principal and/or the results. Difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line basis for a period of the sukuk. Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and are presented as an impairment in the statement of profit or loss and other comprehensive income.
2. Measured at fair value through profit or loss with reference to the price quotations in an active market or the price that occurs in the current transaction if there is no price quotations in an active market or the fair value of similar instrument if no price quotation in active market and no available price from the current transaction.
3. Investments are classified as fair value through other comprehensive income if it belongs in a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows (principal and profit/ujrah) and selling sukuk. Contractual terms determine the specific date of payment of principal and/or results. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in the statement of profit or loss.

h. Murabahah Receivables

Murabahah is an agreement of sales transaction for goods in which the selling price is determined based on acquisition cost added with mutually agreed margin and the seller shall disclose the acquisition cost to buyer.

Piutang murabahah diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK No. 55.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan PSAK No. 102 (Revisi 2013), penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK No. 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan untuk aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik dan istilah transaksi syariah.

i. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik.

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk penyertaan jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

Bank memiliki penyertaan saham pada PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia dan Yayasan Perbanas dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%.

Murabahah receivables are classified as financial assets under category loans and receivables in accordance with PSAK No. 55.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and subsequent recognition are measured at amortised cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

Based on PSAK No. 102 (Revised 2013), the sellers who do not have significant risks associated with the ownership of the inventory for a murabahah transaction are sellers who implement murabahah financing transactions. The accounting treatment of these transactions refer to PSAK No. 50: Financial Instruments: Presentation, PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, and PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, related to financial assets in the category of loans and receivables, which in the implementation is adapted to the principle, characteristics and the term of sharia transaction.

i. Investment in shares

Investments in shares are long-term investment in non-public companies.

Investments in shares with ownership of less than 20% which the fair value is not available and intended for long-term investments are stated at cost (cost method). If there is a permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognise the decline that specified for every investment individually and the loss which is charged to the profit or loss.

The Bank has investment in shares at PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia and Yayasan Perbanas with each percentage of ownership less than 5%.

j. **Pembiayaan**

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi hasil (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode margin laba kotor.

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

j. **Financing**

Mudharabah Financing

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error by the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of mudharabah financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error by the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the balance of mudharabah financing.

Musyarakah financing

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia. Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

k. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan objek sewa (ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

l. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan, dan metode saldo menurun ganda untuk penyusutan mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years

Bangunan	20
Mesin dan peralatan	4 - 8
Kendaraan bermotor	4 - 8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

k. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent assets that are objects of lease transactions (ijarah) and are recognised at the acquisition cost. The assets in an ijarah transaction are depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while in an ijarah muntahiyah bittamlik transactions, the asset for lease is depreciated over the lease period. Assets acquired for ijarah are presented at the acquisition cost less accumulated depreciation and amortisation.

l. Property and Equipment

Property and equipment, except land, and buildings, are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Depreciation are computed on a straight-line method for building and double declining balance method for machine and equipment and motor vehicle over the useful lives as follows:

Building
Machine and equipments
Motor vehicle

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

m. Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Bank berupa aplikasi, perangkat lunak dan lisensi ATM.

Aplikasi, perangkat lunak, dan lisensi ATM dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Aplikasi, perangkat lunak dan lisensi ATM diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 5 (lima) tahun.

n. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari setoran jaminan, uang muka, agunan yang diambil alih ("AYDA"), properti terbengkalai dan tagihan lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke pos-pos sebelumnya.

AYDA diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya, maksimum sebesar kewajiban nasabah pembiayaan. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. AYDA tidak disusutkan.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from de-recognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

m. Intangible Assets

Intangible assets held by the Bank are application, software and ATM license.

The application, software and ATM license is recorded as an intangible asset and is stated at cost less accumulated amortisation.

The application, software and ATM license are amortised using straight-line method over the estimated useful life of the assets, which is 5 (five) years.

n. Other Assets

Other assets consist of deposit guarantee, advances, foreclosed assets, abandoned properties and other assets that cannot be classified to previous accounts.

At initial recognition, foreclosed assets are measured at carrying amount and its fair value less cost to sell, whichever is lower such that the maximum amount represents the customer's outstanding amount balance. The Bank cannot recognise profit when acquiring the assets. After initial recognition, foreclosed assets are recognised at carrying value and fair value less cost to sell, whichever is lower. Foreclosed assets are not depreciated.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan AYDA (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari AYDA) diperhitungkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Any gain or loss arising from the sale of foreclosed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the foreclosed asset) is included in the profit or loss in the period such asset is derecognized.

o. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada efek-efek, piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor, rekening rupa-rupa, agunan yang diambil alih, dan properti terbengkalai.

Cadangan kerugian penurunan nilai – Aset produktif

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai “Lancar” dan “Dalam Perhatian Khusus”, sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”.

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang “Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

o. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts with Bank Indonesia, placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, marketable securities, mudharabah and musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk.

Non-earning assets are the Bank’s assets other than the earning assets, which have potential loss, and consists of inter-office accounts, suspense accounts, foreclosed assets, and abandoned properties.

Allowance for impairment losses – Earning assets

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets categorised as “Current” and “Special Mention”, while non-performing earning assets are categorized into three categories: “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”. Non-Earning assets are divided into “Current”, “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”.

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia circular letter is regulated by Otoritas Jasa Keuangan Regulations (SEOJK) No. 8/SEOJK.03/2015 dated March 10, 2015 regarding “Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit”.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan musyarakah dan mudharabah

Pedoman pembentukan pencadangan kerugian aset produktif berupa pembiayaan musyarakah dan mudharabah berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang "Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah telah mengalami penurunan nilai. Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
3. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit;
5. melakukan reorganisasi keuangan lainnya; hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

Allowance for impairment losses on musyarakah and mudharabah financing

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets of musyarakah and mudharabah financing under sharia circular letter is regulated by Otoritas Jasa Keuangan Regulations (SEOJK) No. 8/SEOJK.03/2015 dated March 10, 2015 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit".

Allowance for impairment losses on murabahah receivables

At each of the statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that murabahah receivables are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and that the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

1. significant financial difficulty of the issuer or obligor;
2. a breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
3. the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
4. there is a probability that the borrower will enter into bankruptcy;
5. conduct other financial reorganization, the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties; or

6. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang murabahah. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara individual, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang murabahah yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang murabahah yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika piutang murabahah tersebut memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk piutang murabahah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet

6. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:
 - a. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - b. national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether the objective evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed murabahah receivables, it includes the asset in a group of murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

Individual impairment calculation

The Bank determines that murabahah receivables should be evaluated for impairment individually if murabahah receivable which have an objective evidence of impairment.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for murabahah receivables with substandard, doubtful and loss collectability.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang murabahah tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang murabahah dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika piutang murabahah tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang murabahah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu metode analisis migrasi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan data historis 3 tahun.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the murabahah receivables' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised murabahah receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if murabahah receivables do not have objective evidence of impairment.

Allowance for impairment loss on murabahah receivables that are collectively evaluated, are calculated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis methods, to assess the allowance for impairment losses which collectively assessed, using 3 years historical data.

Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang murabahah yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang murabahah yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

Cadangan kerugian penurunan nilai – aset non-produktif

Agunan yang diambil alih ("AYDA") disajikan dalam akun aset lain-lain, diakui sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan rekening rupa-rupa.

Kualitas rekening antar kantor dan rekening rupa-rupa ditetapkan sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- b) Macet, tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

p. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank.

Losses are recognised in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognised using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognised is reversed through profit or loss.

Allowance for impairment losses – Non-earning assets

Foreclosed assets presented as other asset, are recognised based on net realisable value. Net realisable value is the fair value less estimated cost of disposal.

The Bank is required to settle its inter-branch account and suspense account.

The quality of inter-branch account and suspense account are determined as:

- a) Current, the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
- b) Loss, the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

p. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

q. Liabilities Immediately Payable

Liabilities immediately payable represents the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority which are stated at the amounts of the Bank's liabilities.

r. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

s. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dari pihak lain dengan akad mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro mudharabah.

Tabungan mudharabah dan giro mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

r. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit and wadiah saving deposit.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of given ('Athaya) that is voluntary on the part of banks.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of wadiah demand deposit and Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

s. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) to manage investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, and mudharabah demand deposits.

Mudharabah savings deposits and mudharabah demand deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana, kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

t. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari sewa (ijarah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pengakuan pendapatan transaksi ijarah

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

Pengakuan pendapatan transaksi musyarakah dan mudharabah

Pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dan proyek hasil usaha.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses incurred due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because it has maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised profit from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (nisbah).

t. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

The Bank determines the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortisation of deferred income when financing is classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Revenue recognition of ijarah transaction

Income from ijarah is recognised proportionally over the period of the contract.

Revenue recognition of musyarakah and mudharabah transaction

Profit sharing income for passive partner in musyarakah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio.

Profit sharing income from mudharabah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio and the recognition based on projection of income is not allowed.

Pengakuan pendapatan transaksi murabahah

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

u. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah kas yang telah diterima dari bagi hasil.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari laba kotor Bank (*gross profit margin*).

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

Revenue recognition of murabahah transaction

The revenue recognition of murabahah receivables are recognised in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of a murabahah receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs, and all other premiums or discounts.

u. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely earned by the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui langsung dalam laporan laba rugi pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang murabahah.

Pendapatan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual. Pendapatan dan beban dicatat antara lain sesuai dengan PSAK 23 - Pendapatan.

w. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

v. Income and Expense Recognition

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is directly recognised into profit or loss at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables.

Revenues and expenses are recognized when incurred using accrual basis. Revenues and expenses are recorded among others according with PSAK 23 - Revenue.

w. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

Termination Benefits

Termination benefits are recognized as a liability and an expense in the financial statements. If the termination benefit falls due in a period in excess of twelve (12) months from the statement of financial position date, the termination benefit liability are presented at its discounted amount.

x. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.

y. Dana Zakat Dan Kebajikan

Dana zakat dan dana kebajikan pengelolaannya diserahkan kepada Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah lalu kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2017 dan 2016.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

x. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities.

y. Zakah Funds and Benevolence Funds

The management of zakah and benevolence funds is delegated to Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah then to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) at 2017 and 2016.

Penalties/sanctions were charged to customers who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/benevolence funds.

z. Provisi

Provisi diakui jika Bank mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Bank harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

aa. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

z. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

aa. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Bank's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Bank's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements:

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari Piutang Murabahah

Kondisi spesifik nasabah yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang murabahah dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan nasabah dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan pencadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan nasabah tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

a. Allowance for Impairment losses on Murabahah Receivables

In the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables, the specific condition of impaired customer is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the customer's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific customer allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Bank. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Bank diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diungkapkan pada Catatan 12.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Bank's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of these assets as of December 31, 2017 and 2016 is disclosed in Note 12.

b. Penurunan Nilai Aset Non-Produktif

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Bank.

Nilai tercatat aset non-produktif berupa agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diungkapkan pada Catatan 15.

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 33 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Bank dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, diungkapkan pada Catatan 33.

b. Impairment of Non-Productive Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Bank's operations.

The carrying values of non-productive assets in the form of foreclosed assets and abandoned properties as of December 31, 2017 and 2016 are set out in Note 15.

c. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 33 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Bank's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are appropriate and reasonable, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

The carrying value of long-term employee benefits liability as of December 31, 2017 and 2016 are set out in Note 33.

d. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 34.

d. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred tax assets are disclosed in Note 34.

4. Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia merupakan saldo giro pada Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah. Saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 85.512.539.440 dan Rp 50.703.532.464.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum dengan perubahan terakhir melalui PBI No. 15/16/PBI/2013, setiap Bank Umum Syariah diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 6% dan 1% pada tahun 2017 serta 5% dan 1% pada tahun 2016 dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Rasio GWM dalam Rupiah Bank sebesar 6,49% dan 5,03% pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

4. Current Accounts with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia is a balance of current accounts with Bank Indonesia in Rupiah. Current accounts with Bank Indonesia as of December 31, 2017 and 2016 is Rp 85,512,539,440 and Rp 50,703,532,464, respectively.

Balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to fulfill the Statutory Minimum Reserves by Bank Indonesia.

Based on Bank Indonesia Regulation regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements with latest amended was based on Bank Indonesia Regulation No. 15/16/PBI/2013, each Sharia Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 6% and 1% in 2017 and 5% and 1% in 2016 of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

The Bank's minimum statutory reserves are 6.49% and 5.03% as of December 31, 2017 and 2016.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as of December 31, 2017 and 2016.

Penempatan pada bank lain berupa Sertifikasi investasi mudharabah antar bank merupakan penempatan pada:

Details of placements with other banks in form Certificate of inter banks mudharabah investment are as follows:

	2017	2016	
PT Bank Sinarmas Tbk	90.000.000.000	-	PT Bank Sinarmas Tbk
PT BPD Kaltimara	50.000.000.000	-	PT BPD Kaltimara
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	40.000.000.000	-	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	25.000.000.000	25.000.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Bukopin	-	20.000.000.000	PT Bank Syariah Bukopin
Jumlah	205.000.000.000	45.000.000.000	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that there is no impaired placement with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen, kolektibilitas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah lancar.

Based on management review, all placement with other banks as of December 31, 2017 and 2016 are classified as current.

7. Efek-efek

7. Marketable Securities

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	2017	2016	
Diukur pada biaya perolehan			At cost
Surat Berharga Syariah Negara	181.330.129.502	162.122.027.522	Sharia Government Bonds
Sukuk Korporasi	40.158.019.183	65.217.603.504	Corporate sukuk
Jumlah diukur pada biaya perolehan	221.488.148.685	227.339.631.026	Total At cost
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Surat Berharga Syariah Negara	48.615.644.400	9.692.502.542	Sharia Government Bonds
Sukuk Korporasi	10.000.000.000	-	Corporate sukuk
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	58.615.644.400	9.692.502.542	Total fair value through other comprehensive income
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			At fair value through profit loss - trading
Sertifikat Reksadana Syariah	40.178.152.309	-	Certificates of Islamic Mutual Funds
Jumlah - bersih	320.281.945.394	237.032.133.568	Total - net

b. Berdasarkan jatuh tempo

b. By maturity

	2017	2016	
Lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan	31.465.274.378	42.983.622.782	More than 3 to 12 months
Lebih dari 12 sampai dengan 60 bulan	122.968.941.100	64.970.508.516	More than 12 to 60 months
Lebih dari 5 tahun	165.847.729.916	129.078.002.270	More than 5 Years
Surat-surat berharga - bersih	320.281.945.394	237.032.133.568	Marketable securities - net

c. Tingkat pengembalian rata-rata per tahun

	2017
Sukuk Korporasi	6,50% - 11,50%
Surat Berharga Syariah Negara	6,00% - 11,90%

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas efek-efek sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, kolektibilitas seluruh efek-efek pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah lancar.

Nilai wajar dari surat berharga (termasuk obligasi Pemerintah) yang diukur pada biaya perolehan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 267.662.195.018 dan Rp 216.677.390.000.

c. Rate of annual average return

	2016
Corporate Sukuk	8,25% - 11,50%
Sharia Government Securities Bonds	6,00% - 8,75%

Management believes that there is no impaired marketable securities, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Based on management review, all marketable securities as of December 31, 2017 and 2016 are classified as current.

The fair values of marketable securities carried at cost (including government bonds) as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp 267,662,195,018 and Rp 216,677,390,000, respectively.

8. Piutang Murabahah

a. Berdasarkan jenis

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 35)		
Konsumsi	1.159.084.646	2.205.570.749
Investasi	-	295.413.541
Jumlah	1.159.084.646	2.500.984.290
Pihak ketiga		
Modal kerja	212.381.833.280	148.529.544.438
Investasi	60.616.702.871	58.832.902.766
Konsumsi	51.474.367.479	49.904.263.232
Jumlah	324.472.903.630	257.266.710.436
Jumlah	325.631.988.276	259.767.694.726
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.264.568.617)	(21.769.356.487)
Jumlah - bersih	322.367.419.659	237.998.338.239

8. Murabahah Receivables

a. By type

Related parties (Note 35)	
Consumer	
Investment	
Subtotal	
Third parties	
Working capital	
Investment	
Consumer	
Subtotal	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Net	

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2017	2016	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Lain-lain	1.159.084.646	295.413.541	Others
Jasa-jasa dunia usaha	-	2.205.570.749	Business services
Jumlah	1.159.084.646	2.500.984.290	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Jasa-jasa dunia usaha	88.662.136.431	21.871.723.880	Business services
Perdagangan besar dan eceran	84.636.014.928	91.635.606.518	Large trading and retail
Industri pengolahan lainnya	46.151.814.098	83.924.663.300	Other processing industry
Konstruksi	40.085.586.206	-	Construction
Perdagangan lain	13.462.984.488	9.930.453.508	Other trading
Lain-lain	51.474.367.479	49.904.263.230	Others
Jumlah	324.472.903.630	257.266.710.436	Subtotal
Jumlah	325.631.988.276	259.767.694.726	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.264.568.617)	(21.769.356.487)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	322.367.419.659	237.998.338.239	Net

b. By economic sector

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2017	2016	
Kurang dari 1 tahun	116.769.766	-	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	45.833.041.970	21.428.224.838	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	176.648.908.623	88.507.256.972	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	103.033.267.917	149.832.212.916	More than 5 years
Jumlah	325.631.988.276	259.767.694.726	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.264.568.617)	(21.769.356.487)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	322.367.419.659	237.998.338.239	Net

c. By period of financing

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2017	2016	
Lancar	258.943.782.330	154.132.796.423	Current
Dalam perhatian khusus	29.371.513.624	60.441.770.730	Special mention
Kurang lancar	3.759.220.923	2.721.413.653	Substandard
Diragukan	16.721.458	2.168.951.130	Doubtful
Macet	33.540.749.941	40.302.762.790	Loss
Jumlah	325.631.988.276	259.767.694.726	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.264.568.617)	(21.769.356.487)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	322.367.419.659	237.998.338.239	Net

d. By collectibility

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2017	2016
Saldo awal tahun	21.769.356.487	56.440.835.189
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 30)	(7.235.328.944)	12.628.981.279
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapus bukukan	8.068.168.480	692.663.894
Penghapusan	(19.337.627.406)	(47.993.123.875)
Saldo akhir tahun	3.264.568.617	21.769.356.487

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang murabahah.

e. Movement of allowance for impairment losses

	2017	2016
Beginning balance	21.769.356.487	56.440.835.189
Allowance (recovery) for impairment losses in current year (Note 30)	(7.235.328.944)	12.628.981.279
Recoveries from write off financing	8.068.168.480	692.663.894
Write Off	(19.337.627.406)	(47.993.123.875)
Ending balance	3.264.568.617	21.769.356.487

Management believes that the allowance for impairment losses as of December 31, 2017 and 2016 is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected murabahah receivables.

f. Mutasi pembiayaan murabahah yang dihapus buku

	2017	2016
Saldo awal tahun	47.300.459.981	-
Mutasi selama tahun berjalan		
Hapus buku	19.337.627.406	47.993.123.875
Penerimaan kembali	(8.068.168.480)	(692.663.894)
Saldo akhir tahun	58.569.918.907	47.300.459.981

f. The movement of murabahah financing written-off

	2017	2016
Beginning balance	47.300.459.981	-
Movement during the year		
Write off	19.337.627.406	47.993.123.875
Recovery	(8.068.168.480)	(692.663.894)
Ending balance	58.569.918.907	47.300.459.981

g. Tingkat marjin rata-rata per tahun

Tingkat marjin rata-rata per tahun adalah sebesar 13,00% dan 17,00% pada tahun 2017 dan 2016.

g. Average annual margin rate

Average annual margin rate is 13.00% and 17.00% in 2017 and 2016, respectively.

h. Pembiayaan bersama

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, piutang murabahah termasuk fasilitas pembiayaan bersama *without recourse* dengan perusahaan pembiayaan sebesar Rp 58.633.347.557 dan Rp 13.262.843.764.

h. Joint financing

As of December 31, 2017 and 2016, murabahah receivables include joint financing without recourse with multifinance companies amounted to Rp 58,633,347,557 and Rp 13,262,843,764, respectively.

i. Piutang murabahah direstrukturisasi

Piutang murabahah yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 57.079.016.370 dan Rp 56.443.665.856 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

i. Restructured murabahah receivables

Restructured murabahah receivables amounted to Rp 57,079,016,370 and Rp 56,443,665,856 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

9. Pembiayaan Musyarakah

Seluruh pembiayaan musyarakah diberikan kepada pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis

	2017	2016	
Modal kerja	798.730.023.769	864.220.583.138	Working capital
Investasi	68.834.086.278	65.167.949.122	Investment
Konsumsi	450.000.000	146.516.731	Consumer
Jumlah	868.014.110.047	929.535.048.991	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.208.263.314)	(20.598.190.723)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	855.805.846.733	908.936.858.268	Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2017	2016	
Jasa-jasa dunia usaha	540.466.736.934	142.066.831.104	Business services
Industri pengolahan lainnya	129.922.857.513	46.500.118.803	Other processing industry
Perdagangan lain	95.346.720.190	313.721.385.886	Other trading
Perdagangan eceran	84.944.834.984	271.759.992.453	Retail
Konstruksi	17.332.960.426	155.486.720.745	Construction
Jumlah	868.014.110.047	929.535.048.991	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.208.263.314)	(20.598.190.723)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	855.805.846.733	908.936.858.268	Net

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2017	2016	
Kurang dari 1 tahun	17.818.000.000	585.802.780	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	410.104.474.427	535.028.442.340	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	430.255.753.245	295.986.735.624	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	9.835.882.375	97.934.068.247	More than 5 years
Jumlah	868.014.110.047	929.535.048.991	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.208.263.314)	(20.598.190.723)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	855.805.846.733	908.936.858.268	Net

9. Musyarakah Financing

All musyarakah financing were given to third parties.

a. By type

	2017	2016	
Modal kerja	798.730.023.769	864.220.583.138	Working capital
Investasi	68.834.086.278	65.167.949.122	Investment
Konsumsi	450.000.000	146.516.731	Consumer
Jumlah	868.014.110.047	929.535.048.991	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.208.263.314)	(20.598.190.723)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	855.805.846.733	908.936.858.268	Net

b. By economic sector

	2017	2016	
Jasa-jasa dunia usaha	540.466.736.934	142.066.831.104	Business services
Industri pengolahan lainnya	129.922.857.513	46.500.118.803	Other processing industry
Perdagangan lain	95.346.720.190	313.721.385.886	Other trading
Perdagangan eceran	84.944.834.984	271.759.992.453	Retail
Konstruksi	17.332.960.426	155.486.720.745	Construction
Jumlah	868.014.110.047	929.535.048.991	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.208.263.314)	(20.598.190.723)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	855.805.846.733	908.936.858.268	Net

c. By period of financing

	2017	2016	
Kurang dari 1 tahun	17.818.000.000	585.802.780	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	410.104.474.427	535.028.442.340	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	430.255.753.245	295.986.735.624	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	9.835.882.375	97.934.068.247	More than 5 years
Jumlah	868.014.110.047	929.535.048.991	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.208.263.314)	(20.598.190.723)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	855.805.846.733	908.936.858.268	Net

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2017	2016
Lancar	756.042.326.004	822.314.213.766
Dalam perhatian khusus	91.593.675.422	64.927.474.466
Kurang lancar	4.999.168.217	-
Diragukan	-	17.283.360.759
Macet	15.378.940.404	25.010.000.000
Jumlah	868.014.110.047	929.535.048.991
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.208.263.314)	(20.598.190.723)
Jumlah - bersih	855.805.846.733	908.936.858.268

d. By collectability

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Net

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2017	2016
Saldo awal tahun	20.598.190.723	4.065.596.766
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 30)	5.580.180.083	18.050.227.544
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapusbukukan	4.000.000	-
Penghapusan	(13.974.107.492)	(1.517.633.587)
Saldo akhir tahun	12.208.263.314	20.598.190.723

e. Movement in allowance for impairment losses

Beginning balance
Allowance for impairment losses in current year (Note 30)
Recoveries from write off financing
Write Off
Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan musyarakah.

Management believes that the allowance for impairment losses of musyarakah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected musyarakah financing.

f. Mutasi pembiayaan musyarakah yang dihapus buku

	2017	2016
Saldo awal tahun	1.517.633.587	-
Mutasi selama tahun berjalan		
Hapus buku	13.974.107.492	1.517.633.587
Penerimaan kembali	(4.000.000)	-
Saldo akhir tahun	15.487.741.079	1.517.633.587

f. The movement of musyarakah financing written-off

Beginning balance
Movement during the year
Write off
Recovery
Ending balance

g. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun adalah sebesar 13,00% dan 15,00% pada tahun 2017 dan 2016.

g. Average annual profit sharing rate

Average annual profit sharing rate per annum in 2017 and 2016 is 13.00% and 15.00%, respectively.

h. Pembiayaan musyarakah direstrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, terdapat pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 67.210.854.564 dan Rp 96.354.207.504.

h. Restructured musyarakah financing

As of December 31, 2017 and 2016, there are restructured musyarakah financing amounted Rp 67,210,854,564 and Rp 96,354,207,504, respectively.

10. Pembiayaan Mudharabah

Seluruh pembiayaan mudharabah diberikan kepada pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis

	2017	2016
Modal kerja	64.197.635.203	20.070.624.069
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(711.865.985)	(63.759.618)
Jumlah - bersih	<u>63.485.769.218</u>	<u>20.006.864.451</u>

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2017	2016
Jenis-jenis dunia usaha	64.197.635.203	20.070.624.069
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(711.865.985)	(63.759.618)
Jumlah - bersih	<u>63.485.769.218</u>	<u>20.006.864.451</u>

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2017	2016
1 sampai dengan 2 tahun	16.523.737.961	1.967.291.756
2 sampai dengan 5 tahun	42.951.467.450	7.556.484.808
Lebih dari 5 tahun	4.722.429.792	10.546.847.505
Jumlah	64.197.635.203	20.070.624.069
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(711.865.985)	(63.759.618)
Jumlah - bersih	<u>63.485.769.218</u>	<u>20.006.864.451</u>

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2017	2016
Lancar	62.413.971.085	20.070.624.069
Dalam perhatian khusus	1.783.664.118	-
Kurang lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	-	-
Jumlah	64.197.635.203	20.070.624.069
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(711.865.985)	(63.759.618)
Jumlah - bersih	<u>63.485.769.218</u>	<u>20.006.864.451</u>

10. Mudharabah Financing

All mudharabah financing were given to third parties.

a. By type

	2017	2016
Working capital	64.197.635.203	20.070.624.069
Less:		
Allowance for impairment losses	(711.865.985)	(63.759.618)
Net	<u>63.485.769.218</u>	<u>20.006.864.451</u>

b. By economic sector

	2017	2016
Business services	64.197.635.203	20.070.624.069
Less:		
Allowance for impairment losses	(711.865.985)	(63.759.618)
Net	<u>63.485.769.218</u>	<u>20.006.864.451</u>

c. By period of financing

	2017	2016
1 year to 2 years	16.523.737.961	1.967.291.756
2 years to 5 years	42.951.467.450	7.556.484.808
More than 5 years	4.722.429.792	10.546.847.505
Total	64.197.635.203	20.070.624.069
Less:		
Allowance for impairment losses	(711.865.985)	(63.759.618)
Net	<u>63.485.769.218</u>	<u>20.006.864.451</u>

d. By collectability

	2017	2016
Current	62.413.971.085	20.070.624.069
Special mention	1.783.664.118	-
Substandard	-	-
Doubtful	-	-
Loss	-	-
Total	64.197.635.203	20.070.624.069
Less:		
Allowance for impairment losses	(711.865.985)	(63.759.618)
Net	<u>63.485.769.218</u>	<u>20.006.864.451</u>

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2017	2016
Saldo awal tahun	63.759.618	63.759.618
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 30)	648.106.367	-
Saldo akhir tahun	711.865.985	63.759.618

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah.

e. Movement in allowance for impairment losses

	2017	2016
Beginning balance	63.759.618	63.759.618
Allowance for impairment losses in current year (Note 30)	648.106.367	-
Ending balance	711.865.985	63.759.618

Management believes that allowance for impairment losses of mudharabah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected mudharabah financing.

f. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun adalah sebesar 13,00% dan 15,00% pada tahun 2017 dan 2016.

f. Average annual profit sharing rate

Annual average profit sharing rate is 13.00% and 15.00% in 2017 and 2016, respectively.

g. Pembiayaan mudharabah direstrukturasasi

Tidak terdapat pembiayaan mudharabah yang direstrukturasasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

g. Restructured mudharabah financing

There is no restructured mudharabah financing as of December 31, 2017 and 2016.

11. Pendapatan Bagi Hasil Yang Akan Diterima

	2017	2016
Bagi hasil efek-efek	5.270.002.774	4.491.567.563
Bagi hasil piutang murabahah	2.495.257.247	2.886.907.254
Bagi hasil penempatan pada bank lain	534.177.777	171.416.667
Pendapatan ijarah	11.704.614	11.913.389
Jumlah	8.311.142.412	7.561.804.873

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, pendapatan bagi hasil yang akan diterima dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 12.696.349 dan Rp 26.092.182 atau masing-masing 0,17% dan 0,35% dari jumlah pendapatan bagi hasil yang akan diterima (Catatan 35).

11. Revenue Sharing Receivables

For the years ended December 31, 2017 and 2016, revenue sharing receivables received from related parties amounted to Rp 12,696,349 and Rp 26,092,182 respectively, or 0.17% and 0.35% of total revenue sharing receivables (Note 35).

12. Aset Tetap

12. Property and Equipment

	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Perubahan Selama Tahun 2017/ Changes during 2017		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Tanah	81.556.965	-	-	81.556.965	Land
Bangunan	245.619.585	-	-	245.619.585	Building
Mesin dan peralatan	6.564.746.090	330.757.317	(83.717.118)	6.811.786.289	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	3.571.227.341	-	(117.450.000)	3.453.777.341	Motor vehicle
Jumlah	10.463.149.981	330.757.317	(201.167.118)	10.592.740.180	Total
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					<u>Accumulated depreciation:</u>
Bangunan	82.067.272	12.280.979	-	94.348.251	Building
Mesin dan peralatan	5.983.331.951	333.780.968	(71.689.964)	6.245.422.955	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	2.731.683.713	211.430.813	(117.449.999)	2.825.664.527	Motor vehicle
Jumlah	8.797.082.936	557.492.760	(189.139.963)	9.165.435.733	Total
Nilai Tercatat	1.666.067.045			1.427.304.447	Net Book Value

	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Perubahan Selama Tahun 2016/ Changes during 2016		31 Desember 2016/ December 31, 2016	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Tanah	3.056.735.548	-	(2.975.178.583)	81.556.965	Land
Bangunan	9.341.546.565	-	(9.095.926.980)	245.619.585	Building
Mesin dan peralatan	6.413.827.146	177.508.009	(26.589.065)	6.564.746.090	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	4.872.116.341	-	(1.300.889.000)	3.571.227.341	Motor vehicle
Jumlah	23.684.225.600	177.508.009	(13.398.583.628)	10.463.149.981	Total
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					<u>Accumulated depreciation:</u>
Bangunan	2.859.190.472	429.177.633	(3.206.300.833)	82.067.272	Building
Mesin dan peralatan	5.609.116.662	398.476.526	(24.261.237)	5.983.331.951	Machine and equipment
Kendaraan bermotor	3.632.782.809	304.657.049	(1.205.756.145)	2.731.683.713	Motor vehicle
Jumlah	12.101.089.943	1.132.311.208	(4.436.318.215)	8.797.082.936	Total
Nilai Tercatat	11.583.135.657			1.666.067.045	Net Book Value

Pada tahun 2017 dan 2016, Bank menjual aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

In 2017 and 2016, the Bank sell its property and equipment as follows:

	2017	2016	
Harga jual	88.183.119	19.702.656.447	Selling value
Nilai tercatat	(12.027.155)	(8.962.265.413)	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 31)	76.155.964	10.740.391.034	Gain on sales of property and equipment (Note 31)

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada pihak ketiga dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Property and equipment are insured against fire and theft to a third party with insurance coverage as follows:

	2017	2016	
PT Asuransi Adira Dinamika	9.397.647.187	-	PT Asuransi Adira Dinamika
PT Asuransi Asei Indonesia	31.000.000	-	PT Asuransi Asei Indonesia
PT Asuransi Takaful Umum	-	4.087.985.000	PT Asuransi Takaful Umum
Jumlah	9.428.647.187	4.087.985.000	Total

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah nilai perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp 3.184.528.220 dan Rp 3.335.153.234.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Management believes that the sum insured is sufficient to cover all possible losses of the insured assets.

As of December 31, 2017 and 2016, total property and equipment that have been fully depreciated, but still used for operation amounted Rp 3,184,528,220 and Rp 3,335,153,234, respectively.

Based on management review, there is no impairment in the property and equipment as of December 31, 2017 and 2016.

13. Aset Tak Berwujud

	2017	2016
Biaya perolehan		
Lisensi ATM	2.784.598.875	2.784.598.875
Aplikasi dan perangkat lunak	2.534.783.802	2.515.103.800
Jumlah	5.319.382.677	5.299.702.675
Akumulasi amortiasi		
Lisensi ATM	(2.227.679.100)	(1.670.759.324)
Aplikasi dan perangkat lunak	(1.020.296.823)	(591.021.064)
Jumlah	(3.247.975.923)	(2.261.780.388)
Jumlah	2.071.406.754	3.037.922.287

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

13. Intangible Assets

Acquisition costs
ATM license
Application and software
Subtotal
Accumulated amortisation
ATM license
Application and software
Subtotal
Total

14. Biaya Dibayar Dimuka

	2017	2016
Uang muka pembiayaan	2.494.587.987	2.394.937.202
Perbaikan gedung	1.282.838.520	1.821.151.158
Pengembangan sistem	1.172.192.390	179.373.424
Sewa rumah/gedung	1.003.343.191	1.212.259.001
Iuran keanggotaan	611.518.373	155.167.387
Promosi	37.015.328	64.164.464
Asuransi	13.894.008	46.747.140
Lain-lain	715.967.430	417.325.801
Jumlah	7.331.357.227	6.291.125.577

Jumlah

14. Prepaid Expenses

Financing advance
Building renovation
System development
Building/house rent
Membership fee
Promotion
Insurance
Others

Total

15. Aset Lain-lain

	2017	2016	
Agunan yang diambil alih	26.126.472.819	26.556.110.120	Foreclosed assets
Setoran jaminan	2.757.702.450	2.674.302.450	Deposit guarantee
Biaya yang ditangguhkan dan tagihan lain	836.855.271	814.147.045	Deferred expenses and other receivables
Properti terbengkalai	128.252.200	128.252.200	Abandoned properties
Tagihan pajak	2.962.500	2.962.500	Claim for tax refund
Lain-lain	5.014.014	5.013.613	Others
Jumlah	29.857.259.254	30.180.787.928	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.906.782.129)	(3.498.651.564)	Allowance for impairment losses
Jumlah	25.950.477.125	26.682.136.364	Total

Berikut adalah rincian agunan yang diambil alih berdasarkan kolektibilitasnya :

The classification of foreclosed assets is as follows:

	2017	2016	
Lancar	-	16.121.065.165	Current
Macet	26.126.472.819	10.435.044.955	Loss
Jumlah	26.126.472.819	26.556.110.120	Total

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Movement in allowance for impairment losses of other assets as of December 31, 2017 and 2016, as follows:

	2017	2016	
Saldo awal tahun	3.498.651.564	2.569.620.687	Beginning balance
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 30)	408.130.565	929.030.877	Allowance for impairment losses in current year (Note 30)
Saldo akhir tahun	3.906.782.129	3.498.651.564	Ending balance

Termasuk di dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp 3.778.529.929 dan Rp 3.370.399.364 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Included in allowance for impairment losses is allowance for impairment losses of foreclosed assets amounted to Rp 3,778,529,929 and Rp 3,370,399,364 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

16. Liabilitas Segera

	2017	2016	
Titipan pembiayaan	3.112.502.283	2.680.125.272	Financing
Asuransi karyawan	31.832.346	264.276.824	Insurance
Titipan dana sosial	91.951.994	205.550.436	Social fund
Administrasi pembiayaan	22.224.940	97.018.407	Financing administration
Lain-lain	1.236.261.463	125.956.697	Others
Jumlah	4.494.773.026	3.372.927.636	Total

16. Liabilities Immediately Payable

Seluruh liabilitas segera merupakan liabilitas kepada pihak ketiga.

All liabilities immediately payable were from third parties.

17. Simpanan Giro Wadiah

Simpanan giro wadiah pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 37.470.907.665 dan Rp 37.132.349.505 merupakan simpanan dari pihak ketiga.

Tingkat bonus rata-rata per tahun untuk giro wadiah selama tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 1,50% dan 3,27%.

17. Wadiah Demand Deposits

As of December 31, 2017 and 2016, wadiah demand deposits amounting to Rp 37,470,907,665 and Rp 37,132,349,505, respectively are from third parties.

Average annual bonus rate for wadiah demand deposits during 2017 and 2016 are 1.50% and 3.27% respectively.

18. Simpanan dari Bank Lain

	2017	2016
Deposito Sertifikat Mudharabah (SIMA)		
Pihak berelasi (Catatan 35)	30.000.000.000	90.000.000.000
Pihak ketiga	120.000.000.000	88.000.000.000
Jumlah	<u>150.000.000.000</u>	<u>178.000.000.000</u>

Mudharabah Certificate Deposits
 Related parties (Note 35)
 Third parties

Total

Tingkat bonus rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain selama tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 4,00% dan 5,00%.

Average annual bonus rate for deposit from other banks during 2017 and 2016 are 4.00% and 5.00%, respectively.

19. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 35)		
Deposito mudharabah	12.166.441	19.653.929
SIMA	3.291.667	75.555.556
Tabungan mudharabah	1.014.822	568.718
Jumlah	<u>16.472.930</u>	<u>95.778.203</u>
Pihak ketiga		
Deposito mudharabah	4.539.380.170	3.633.692.759
SIMA	118.738.889	135.850.000
Tabungan mudharabah	70.360.257	120.922.156
Giro wadiah	7.890.411	7.890.411
Giro mudharabah	-	4.049.905
Jumlah	<u>4.736.369.727</u>	<u>3.902.405.230</u>
Jumlah	<u>4.752.842.657</u>	<u>3.998.183.434</u>

Related parties (Note 35)
 Current taxes payable
 SIMA
 Mudharabah savings
 Subtotal

Third parties
 Current taxes payable
 SIMA
 Mudharabah savings
 Wadiah demand deposits
 Mudharabah demand deposits
 Subtotal

Total

19. Undistributed Revenue Sharing

20. Utang Pajak

	2017	2016	
Pasal 4 ayat 2	1.721.427.993	1.069.969.751	Article 4 paragraph 2
Pasal 21	429.536.077	252.064.016	Article 21
Pasal 23	10.593.300	254.219	Article 23
Jumlah	<u>2.161.557.370</u>	<u>1.322.287.986</u>	Total

20. Taxes Payable

21. Dana Syirkah Temporer

a. Tabungan mudharabah

	2017	2016	
Bukan bank			Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 35)	692.931.765	589.585.572	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	<u>43.072.752.644</u>	<u>39.567.657.136</u>	Third parties
Jumlah	<u>43.765.684.409</u>	<u>40.157.242.708</u>	Total

21. Temporary Syirkah Funds

a. Mudharabah saving deposits

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk tabungan mudharabah selama tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 0,50% - 4,00% dan 2,00% - 5,00%.

Average annual profit sharing for mudharabah saving during 2017 and 2016 are 0.50% - 4.00% and 2.00% - 5.00%, respectively.

b. Deposito mudharabah

i) Berdasarkan pemilik dana

	2017	2016	
Bukan bank			Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 35)	2.015.000.000	28.185.000.000	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	<u>1.430.756.737.764</u>	<u>1.099.088.106.555</u>	Third parties
Jumlah	<u>1.432.771.737.764</u>	<u>1.127.273.106.555</u>	Subtotal
Bank			Bank
Pihak ketiga	<u>18.750.000.000</u>	<u>31.250.000.000</u>	Third parties
Jumlah	<u>1.451.521.737.764</u>	<u>1.158.523.106.555</u>	Total

b. Mudharabah deposits

i) By type of customer

ii) Berdasarkan periode berjangka

	2017	2016	
Kurang dari 1 bulan	109.750.000.000	-	Less than 1 month
1 bulan	517.717.320.746	706.904.875.356	1 month
3 bulan	361.346.696.080	189.940.649.312	3 months
6 bulan	399.982.720.938	88.677.581.886	6 months
12 bulan	<u>62.725.000.000</u>	<u>173.000.000.001</u>	12 months
Jumlah	<u>1.451.521.737.764</u>	<u>1.158.523.106.555</u>	Total

ii) By the contractual maturity

iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

iii) By remaining period until maturity

	2017	2016	
Deposito mudharabah			Mudharabah deposit
Kurang dari 1 bulan	582.018.679.872	791.314.161.841	Less than 1 month
1 sampai dengan 3 bulan	553.409.691.429	154.773.649.312	1 month to 3 months
3 sampai dengan 6 bulan	257.218.366.463	46.275.295.401	3 months to 6 months
6 sampai dengan 12 bulan	58.875.000.000	166.160.000.001	6 months to 12 months
Jumlah	1.451.521.737.764	1.158.523.106.555	Total

iv) Tingkat bagi hasil rata-rata

iv) Average profit sharing rate

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk deposito mudharabah selama tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 7,00% - 8,00% dan 8,00% - 9,00%.

Average annual profit sharing for mudharabah deposits during 2017 and 2016 are 7.00% - 8.00% and 8.00% - 9.00% respectively.

Deposito mudharabah yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar Rp 221.150.000.000 dan Rp 415.503.307.312 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Mudharabah deposits pledged as collateral for receivables and financing amounted to Rp 221,150,000,000 and Rp 415,503,307,312 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

c. Giro mudharabah

c. Mudharabah demand deposits

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 giro mudharabah masing-masing sebesar Rp 150.000 dan Rp 118.652.689 adalah dari pihak ketiga.

As of December 31, 2017 and 2016, mudharabah demand deposits amounted to Rp 150,000 and Rp 118,652,689, respectively are from third parties.

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk giro mudharabah selama tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 0,00% dan 2,00% - 7,00%.

Average annual profit sharing for mudharabah demand deposits during 2017 and 2016 are 0.00% and 2.00% - 7.00%, respectively.

22. Modal Saham

22. Capital Stock

Susunan kepemilikan saham bank pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's stockholder as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Nama Pemegang Saham	2017		Jumlah/ Total	Name of Stockholder
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Stock	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %		
PT Bank Victoria International Tbk	269.982.683	99,99	269.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	270.000.000	100,00	270.000.000.000	Total

Nama Pemegang Saham	2016		Jumlah/ Total	Name of Stockholder
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Stock</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %		
PT Bank Victoria International Tbk	209.982.683	99,99	209.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	210.000.000	100,00	210.000.000.000	Total

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang didokumentasikan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) No. 27 tanggal 27 Maret 2017 dari Hartanti Kuntoro, S.H., notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank dari Rp 210.000.000.000 menjadi Rp 270.000.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya sebesar Rp 60.000.000.000 atau sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham oleh PT Bank Victoria International Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0126193 tanggal 11 April 2017.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang didokumentasikan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) No. 13 tanggal 29 Juni 2016 dari Setiawan, S.H., notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank dari Rp 160.000.000.000 menjadi Rp 210.000.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000 atau sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham oleh PT Bank Victoria International Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0062667 tanggal 30 Juni 2016.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Bank wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Based on the Shareholders' Resolution of the Company which is documented in the Deed Statement General Meeting of Shareholders – Extraordinary (EGM) No.27 dated March 27, 2017 from Hartanti Kuntoro, SH, a public notary in Jakarta, has approved an increase in the Bank's issued and paid up capital from Rp 210,000,000,000 to Rp 270,000,000,000 which is entirely taken and paid amounted to Rp 60,000,000,000 or 60,000,000 (sixty million) shares by PT Bank Victoria International Tbk. The Amendment of the Article of Association has been received and recorded by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Letter No. AHU-AH.01.03-0126193 dated April 11, 2017.

Based on the Shareholders' Resolution of the Company which is documented in the Deed Statement General Meeting of Shareholders – Extraordinary (EGM) No.13 dated June 29, 2016 from Setiawan, SH, a public notary in Jakarta, has approved an increase in the Bank's issued and paid up capital from Rp 160,000,000,000 to Rp 210,000,000,000 which is entirely taken and paid amounted to Rp 50,000,000,000 or 50,000,000 (fifty million) shares by PT Bank Victoria International Tbk. The Amendment of the Article of Association has been received and recorded by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Letter No. AHU-AH.01.03-0062667 dated June 30, 2016.

Capital Management

The primary objective of the Bank's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Bank is required by Bank Indonesia to meet Capital Adequacy Ratio (CAR).

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan dari aset tertimbang menurut risiko terhadap modal yang tersedia.

Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

Perhitungan rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
I. Komponen Modal		
A. Modal Inti	227.348.936.652	157.757.341.655
B. Modal Pelengkap	10.546.846.926	5.180.409.580
C. Penyertaan	(60.468.550)	(60.468.550)
II. Jumlah modal	237.835.315.028	162.877.282.685
III. Aset tertimbang menurut risiko kredit, pasar dan operasional	1.232.796.929.631	1.019.320.255.233
IV. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	19,29%	15,98%
V. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	10% - 11%	10% - 11%

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. Bank Indonesia's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement measured of risk-weighted assets to available capital resources.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

The calculation of CAR as of December 31, 2017 and 2016, is as follows:

I. Capital Stock Component	
A. Core Capital	
B. Supplementary Capital	
C. Placement	
II. Total	
III. Risk weighted assets for credit, market and operational risk	
IV. Capital Adequacy Ratio (CAR)	
V. Minimum Capital Adequacy Ratio	

23. Uang Muka Setoran Modal

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 14 November 2017 dari Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., notaris di Jakarta, Bank menerima dana setoran modal dari PT Bank Victoria International Tbk, pemegang saham, sebesar Rp 40.000.000.000. Dana tersebut mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk dapat diakui sebagai modal disetor pada bulan Januari 2018 (Catatan 39).

23. Capital Paid-up In Advance

Based on Deed No. 46 dated November 14, 2017 of Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., a public notary in Jakarta, the Bank received advance for paid-up capital from PT Bank Victoria International Tbk, a stockholder amounted to Rp 40,000,000,000. The Bank is received an approval from OJK to recognize this fund as share capital in January 2018 (Note 39).

24. Saldo Laba yang Sudah Ditentukan Penggunaannya

Berdasarkan Akta No. 23 tertanggal 26 Maret 2010 dan Akta No. 24 tertanggal 26 Maret 2010 keduanya dari Erni Rohaini, SH, MBA, notaris di Jakarta, saldo laba sebelum proses konversi menjadi bank umum syariah dikapitalisasi menjadi cadangan umum sebesar Rp 10.014.130.827. Setelah ada perubahan pencadangan imbalan pasti karyawan dan pajak penghasilan badan maka saldo cadangan umum menjadi Rp 9.156.165.256. Perubahan ini telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 30 Juni 2014 dari Setiawan, S.H., notaris di Jakarta.

24. Appropriated Retained Earnings

Based on Notarial Deed No. 23 dated March 26, 2010 and Deed No. 24 dated March 26, 2010, both from Erni Rohaini, SH, MBA, a public notary in Jakarta, retained earnings before conversion into sharia bank is capitalised into general reserves amounted to Rp 10,014,130,827. After changes in allowances for post-employment benefit and current income tax, the balance of general reserves becomes Rp 9,156,165,256. These changes have been rectified by General Shareholders Meeting based on Notarial Deed No. 12 dated June 30, 2014 from of Setiawan, S.H., a public notary in Jakarta.

25. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 35)		
Pendapatan dari penjualan murabahah	164.001.466	186.944.502
Pendapatan usaha utama lainnya :		
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain	-	30.062
Jumlah	164.001.466	186.974.564
Pihak ketiga		
Pendapatan dari penjualan murabahah	25.168.377.529	28.856.529.955
Pendapatan bagi hasil		
Musyarakah	91.073.496.425	68.541.781.262
Mudharabah	4.954.283.252	860.872.187
Jumlah	96.027.779.677	69.402.653.449
Pendapatan ijarah - bersih	655.391.320	301.580.861
Pendapatan usaha utama lainnya :		
Pendapatan efek-efek Syariah	20.554.589.518	17.029.333.283
Pendapatan administrasi	5.749.490.704	3.280.697.951
Pendapatan bonus FASBIS	1.593.579.860	1.080.746.528
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain	3.782.212.648	2.124.116.821
Jumlah	31.679.872.730	23.514.894.583
Jumlah	153.695.422.722	122.262.633.412

25. Income From Fund Management by Bank as Mudharib

Related parties (Note 35)	
Income from sales of murabahah	
Other main operating income :	
Current accounts and deposit with other banks income	
Subtotal	
Third parties	
Income from sales of murabahah	
Income from profit sharing	
Musyarakah	
Mudharabah	
Total	
Income from ijarah - net	
Other main operating income :	
Income from sharia marketable securities	
Administration income	
FASBIS bonus income	
Current accounts and deposit with other banks income	
Subtotal	
Total	

26. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 35)		
Deposito mudharabah	11.346.204	18.878.890
Tabungan mudharabah	807.876	660.247
SIMA	-	346.115.278
Jumlah	12.154.080	365.654.415
Pihak ketiga		
Deposito Mudharabah	98.517.036.646	76.699.912.154
SIMA	1.266.633.078	3.051.524.622
Tabungan Mudharabah	790.778.535	2.485.794.979
Giro	473.487.775	1.493.482.529
Jumlah	101.047.936.034	83.730.714.284
Jumlah	101.060.090.114	84.096.368.699

26. Third Parties' Share On Returns of Temporary Syirkah Funds

Related parties (Note 35)	
Mudharabah deposit	
Mudharabah saving deposits	
SIMA	
Subtotal	
Third parties	
Mudharabah Deposit	
SIMA	
Mudharabah Saving Deposits	
Current accounts	
Subtotal	
Total	

27. Pendapatan Operasional Lainnya

	2017	2016
Keuntungan penjualan efek-efek	2.506.864.658	-
Pendapatan pelunasan dipercepat	306.924.210	685.076.500
Keuntungan penjualan AYDA - bersih	234.278.050	-
Keuntungan dari peningkatan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih	178.152.308	-
Administrasi dan lainnya	106.007.793	283.478.021
Jumlah	3.332.227.019	968.554.521

27. Other Operating Income

Gain on sale of marketable securities	
Income from early repayment	
Gain on sale of foreclosed assets - net	
Gain on increase in fair value of trading securities - net	
Administrative and others	
Total	

28. Beban Umum dan Administrasi

	2017	2016
Sewa	4.211.264.123	2.811.452.256
Asuransi	4.055.257.974	3.427.619.910
Pemeliharaan dan perbaikan	1.844.215.995	1.659.720.144
Pengembangan sistem	1.835.908.070	1.761.652.656
Keanggotaan	1.224.481.160	1.041.076.791
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 13)	986.195.535	860.483.680
Biaya fee ATM tahunan	686.449.854	552.425.638
Transportasi	634.196.211	937.426.507
Listrik dan air	571.423.404	486.273.348
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	557.492.760	1.132.311.208
Konsultan	472.723.074	339.500.000
Promosi	444.958.154	781.532.694
Peralatan kantor	443.745.478	321.261.280
Telekomunikasi	391.446.193	450.978.257
Keamanan dan kebersihan	124.963.100	135.146.892
Pajak dan perijinan	120.554.914	1.569.774.797
Lain-lain	281.167.555	127.381.691
Jumlah	18.886.443.554	18.396.017.749

28. General and Administrative Expenses

Rent	2.811.452.256
Insurance	3.427.619.910
Repair and maintenance	1.659.720.144
System development	1.761.652.656
Membership	1.041.076.791
Amortisation of intangible assets (Note 13)	860.483.680
Annual fee ATM expense	552.425.638
Transportation	937.426.507
Electricity and water	486.273.348
Depreciation of property and equipment (Note 12)	1.132.311.208
Consultants	339.500.000
Promotional	781.532.694
Office supplies	321.261.280
Telecommunication	450.978.257
Securities and cleanliness	135.146.892
Tax and permission	1.569.774.797
Others	127.381.691
Total	18.396.017.749

29. Beban Personalia

	2017	2016
Gaji	22.413.929.024	20.650.054.606
Beban imbalan pasti (Catatan 33)	2.069.004.219	1.947.503.996
Tunjangan hari raya	1.869.466.524	1.687.818.589
Honor Dewan Komisaris	1.384.457.585	1.076.824.870
Premi asuransi jiwa	1.088.211.369	941.296.369
Lembur	562.636.592	493.199.831
Pendidikan	442.713.589	365.122.875
Kesehatan	72.695.126	-
Jumlah	29.903.114.028	27.161.821.136

29. Personnel Expenses

Salaries	20.650.054.606
Post-employment benefit (Note 33)	1.947.503.996
Tunjangan hari raya	1.687.818.589
Remuneration of Board of Commissioners	1.076.824.870
Life insurance premium	941.296.369
Overtime	493.199.831
Educational expenses	365.122.875
Health	-
Total	27.161.821.136

30. Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Rincian beban pencadangan (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Piutang murabahah (Catatan 8)	(7.235.328.944)	12.628.981.279
Aset lain-lain (Catatan 15)	408.130.565	929.030.877
Pembiayaan mudharabah (Catatan 10)	648.106.367	-
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	5.580.180.083	18.050.227.544
Pembiayaan ijarah	-	5.937.500
Jumlah	(598.911.929)	31.614.177.200

30. Allowances (Recovery) For Impairment Losses Expenses

Details of allowance (recovery) for impairment losses in earning and non-earning assets are as follows:

Murabahah receivables (Note 8)	12.628.981.279
Other assets (Note 15)	929.030.877
Mudharabah financing (Note 10)	-
Musyarakah financing (Note 9)	18.050.227.544
Ijarah financing	5.937.500
Total	31.614.177.200

31. Pendapatan (Beban) Non Operasional

	2017	2016
Pendapatan non operasional		
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 12)	76.155.964	10.740.391.034
Pendapatan imbalan dari pihak ketiga	116.063.158	65.347.913
Pendapatan non operasional lainnya	4.827.336	3.246
Jumlah	197.046.458	10.805.742.193
Beban non operasional		
Denda dan sanksi	(161.332.569)	(27.752.000)
Lain-lain	(192.029.534)	(42.755.000)
Jumlah	(353.362.103)	(70.507.000)
Jumlah	(156.315.645)	10.735.235.193

31. Non Operating Income (Expense)

Non operating income	
Gain on sale of property and equipment (Note 12)	
Income fee from third parties	
Other non-operating income	
Total	
Non-operating expenses	
Penalties	
Others	
Total	
Net	

32. Komitmen dan Kontinjensi

	2017	2016
Liabilitas komitmen:		
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	(2.040.291.378)	(16.521.952.543)
Tagihan kontinjensi:		
Margin dalam penyelesaian	8.462.700.542	12.139.255.189
Liabilitas kontinjensi:		
Bank Garansi	(2.532.000.000)	(2.532.000.000)
Tagihan kontinjensi – bersih	5.930.700.542	9.607.255.189

32. Commitment and Contingencies

Commitment payables:	
Unused financing facilities	
Contingencies receivables:	
Margin from non-performing receivables	
Contingencies payables:	
Bank guarantees issued	
Contingencies receivables - net	

33. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen, tertanggal 29 Januari 2018.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 210 dan 174 pada tahun 2017 dan 2016.

33. Long-term Employee Benefits

The amount of post-employment benefits is determined based on the outstanding regulation Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding of the benefits has been made to date.

The latest actuarial valuation report, dated January 29, 2018, on the long-term employee benefits liability was from PT Ricky Leonard Jasatama, an independent actuary.

Number of eligible employees is 210 and 174 in 2017 and 2016, respectively.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The amount of employee benefits recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	2017	2016	
Beban jasa kini	1.542.214.451	1.380.868.865	Current service costs
Beban bunga neto	396.946.126	391.831.236	Interest costs
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	129.843.642	174.803.895	Severance cost
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	2.069.004.219	1.947.503.996	Component of employee benefits cost recognized in statements of profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	350.025.908	439.303.367	Remeasurement of defined benefit liability
Jumlah	2.419.030.127	2.386.807.363	Total

Beban imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp 2.069.004.219 dan Rp 1.947.503.996 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan sebagai bagian dari "Beban personalia" (Catatan 29).

Long-term employee benefits expense amounted to Rp 2,069,004,219 and Rp 1,947,503,996 as of December 31, 2017 and 2016, respectively is presented as part of "Personnel expense (Note 29).

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefits liability follows:

	2017	2016	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang awal tahun	6.437.357.670	5.965.590.261	Long-term employee benefits liability at the beginning of the year
Beban imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	2.069.004.219	1.947.503.996	Long-term employee benefits expense during the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(350.025.908)	(439.303.367)	Remeasurement of defined benefit liability
Dampak mutasi karyawan - bersih	(129.843.641)	(174.803.895)	Effect of employees transferred - net
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang	(574.191.123)	(861.629.325)	Benefit payments during the year
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang akhir tahun	7.452.301.217	6.437.357.670	Long-term employee benefits liability at the end of the year

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Principal assumptions used in the valuation of the long-term employee benefits follows:

	2017	2016	
Tingkat diskonto	7,20%	8,40%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	9,00%	10,00%	Future salary increases
Tingkat perputaran karyawan	5% sampai dengan usia 40 tahun kemudian menurun secara linear sampai dengan 0% pada saat usia 55 tahun/ 5% per annum at age up 40 years old, then decrease in linear to 0% per annum at age 55 years old		Level of employee turnover

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Analysis of sensitivity from changes of main assumptions to long-term employee benefits liability as follows:

2017			
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on employee benefits liability			
Perubahan Asumsi/ Changes of assumption	Kenaikan Asumsi/ Increases of assumption	Penurunan Asumsi/ Decreases of assumption	
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	(770.126.045)	906.463.389
Tingkat kenaikan gaji/Future salary increases	1%	881.312.068	(765.120.906)
2016			
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on employee benefits liability			
Perubahan Asumsi/ Changes of assumption	Kenaikan Asumsi/ Increases of assumption	Penurunan Asumsi/ Decreases of assumption	
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	(654.302.445)	769.515.786
Tingkat kenaikan gaji/Future salary increases	1%	749.842.033	(650.988.013)

34. Pajak Penghasilan

34. Income Tax

a. Beban (penghasilan) pajak terdiri dari:

a. The tax expense (benefit) consists of the following:

	2017	2016	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	1.505.463.924	(9.410.288.521)	Deferred tax
Jumlah	1.505.463.924	(9.410.288.521)	Total

b. Pajak Kini

b. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income with accumulated fiscal losses follows:

	2017	2016	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.098.951.987	(27.884.175.827)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan	(10.149.691.171)	(23.607.989.717)	Reversal for impairment losses on financing
Pencadangan penurunan nilai atas aset non-produktif dan lain-lain	408.130.565	929.030.877	Allowances for impairment losses on non-earning assets and others
Imbalan kerja jangka panjang - bersih	1.364.969.455	911.070.776	Long-term employee benefits
Amortisasi aset tak berwujud	918.322.623	215.120.932	Amortization of intangible assets
Jumlah	(7.458.268.528)	(21.552.767.132)	Net

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Keuntungan penjualan aset tetap	(76.155.964)	(10.740.391.034)	Gain on sale of property and equipment
Lain-lain	(940.326)	983.412.773	Others
Rugi fiskal tahun 2017	(1.436.412.831)	-	Fiscal loss Year 2017
Rugi fiskal tahun 2016	(59.193.921.220)	(59.193.921.220)	Fiscal loss Year 2016
Rugi fiskal tahun 2015	(32.966.780.279)	(32.966.780.279)	Fiscal loss Year 2015
Rugi fiskal tahun 2014	(11.272.497.319)	(11.272.497.319)	Fiscal loss Year 2014
Akumulasi rugi fiskal	(104.869.611.649)	(103.433.198.818)	Accumulated fiscal losses

Rugi fiskal dan pajak dibayar dimuka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Fiscal loss and prepaid tax for the year ended December 31, 2016 and 2015 conforms with its Annual Corporate Income Tax Return filed loss and prepaid tax.

c. Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax

	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited in (charged to)		31 Desember 2017/ December 31, 2017	
		Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income		
Aset (kewajiban) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	1.609.339.418	341.242.364	(87.506.477)	1.863.075.305	Employment benefit liabilities
Keuntungan belum direalisasi atas penurunan nilai investasi	-	-	(52.737.294)	(52.737.294)	Unrealized gain on impairment of investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif pembiayaan	(3.712.957.341)	(2.537.422.793)	-	(6.250.380.134)	Allowances for impairment losses on financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pembiayaan	151.172	-	-	151.172	Allowances for impairment losses on non-financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif	874.662.891	102.032.641	-	976.695.532	Allowances for impairment losses non-earning assets
Biaya amortisasi aset tak berwujud	145.498.933	229.580.656	-	375.079.589	Amortization of intangible assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	25.858.299.701	359.103.208	-	26.217.402.909	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak tangguhan - Bersih	24.774.994.774	(1.505.463.924)	(140.243.771)	23.129.287.079	Deferred tax assets - net
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited in (charged to)		31 Desember 2016/ December 31, 2016	
		Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income		
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	1.491.397.566	227.767.694	(109.825.842)	1.609.339.418	Employment benefit liabilities
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif pembiayaan	2.189.040.088	(5.901.997.429)	-	(3.712.957.341)	Allowances for impairment losses on financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pembiayaan	151.172	-	-	151.172	Allowances for impairment losses on non-financing earning assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif	642.405.172	232.257.719	-	874.662.891	Allowances for impairment losses non-earning assets
Biaya amortisasi aset tak berwujud	91.718.700	53.780.233	-	145.498.933	Amortization of intangible assets
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	11.059.819.397	14.798.480.304	-	25.858.299.701	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak tangguhan - Bersih	15.474.532.095	9.410.288.521	(109.825.842)	24.774.994.774	Deferred tax assets - net

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that the future taxable income will likely be sufficient to compensate temporary differences giving rise to the deferred tax assets.

Rekonsiliasi antara manfaat pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba (rugi) akuntansi sebelum pajak penghasilan tidak final dengan manfaat pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

	2017	2016	
Laba (rugi) sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.098.951.987	(27.884.175.827)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban (manfaat) pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	1.524.737.997	(6.971.043.957)	Tax expense (benefit) at prevailing tax rates
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:			Tax effects of permanent differences:
Keuntungan penjualan aset tetap	(19.038.991)	(2.685.097.758)	Gain on sale of property and equipment
Lain-lain	(235.082)	245.853.194	Others
Jumlah - bersih	(19.274.073)	(2.439.244.564)	Net
Jumlah Beban (manfaat) pajak penghasilan	1.505.463.924	(9.410.288.521)	Total tax expense (benefit)

35. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

35. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Sifat Pihak Berelasi

PT Bank Victoria International Tbk merupakan pemegang saham utama Bank.

Nature of Relationship

PT Bank Victoria International Tbk is majority stockholder of the Bank.

Transaksi Hubungan Berelasi

Transactions with Related Parties

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

	2017	2016	
Aset			Assets
Giro pada bank lain (Catatan 5)			Current accounts with other Banks (Note 5)
PT Bank Victoria International Tbk	1.523.684	1.899.684	PT Bank Victoria International Tbk
Piutang murabahah (Catatan 8) - Komisaris, Direktur dan pejabat eksekutif	1.159.084.646	2.500.984.290	Murabahah receivables (Note 8) - Commissioners, Directors and executive officers
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima (Catatan 11)	12.696.349	26.092.182	Revenue sharing receivables (Note 11)
Jumlah	1.173.304.679	2.528.976.156	Total
Persentase terhadap jumlah aset	0,06%	0,16%	Percentage to total assets

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)	30.000.000.000	90.000.000.000	Deposit from other banks (Note 18)
Bagi hasil yang belum dibagikan (Catatan 19)	16.472.930	95.778.203	Undistributed revenue sharing (Note 19)
Jumlah	30.016.472.930	90.095.778.203	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	14,40%	38,83%	Percentage to total liabilities
Dana Syirkah Temporer (Catatan 21)			Temporary Syirkah Funds (Note 21)
Tabungan mudharabah	692.931.765	589.585.572	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	2.015.000.000	28.185.000.000	Mudharabah deposit
Jumlah	2.707.931.765	28.774.585.572	Total
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	0,18%	2,40%	Percentage to temporary syirkah funds
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib (Catatan 25)			Income from funds management by Bank as mudharib (Note 25)
Pendapatan dari penjualan murabahah	164.001.466	186.944.502	Income from sales of murabahah
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain	-	30.062	Current accounts and deposit with other banks income
Jumlah	164.001.466	186.974.564	Total
Persentase terhadap jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	0,11%	0,15%	Percentage to total income from funds management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (Catatan 26)			Third parties' shares on returns of temporary syirkah funds (Note 26)
Deposito mudharabah	11.346.204	18.878.890	Mudharabah deposit
Tabungan mudharabah	807.876	660.247	Mudharabah saving deposits
SIMA	-	346.115.278	SIMA
Jumlah	12.154.080	365.654.415	Total
Persentase terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	0,01%	0,43%	Percentage to third parties' shares on returns of the temporary syirkah funds
Beban Operasional lainnya			Other Operating expense
Beban personalia			Personnel expenses
Gaji, tunjangan, dan THR – Direktur dan pejabat eksekutif	8.527.907.072	10.236.481.000	Salary, allowances, and THR - Directors and executive personnel
Honor Dewan Komisaris	1.095.445.000	1.076.824.870	Remuneration of Board of Commissioners
Gaji, tunjangan, dan THR – Komite, dan Dewan Pengawas Syariah	520.013.000	486.493.000	Salary, allowances, and THR Committee, and Sharia Supervisory Board
Jumlah	10.143.365.072	11.799.798.870	Total
Persentase terhadap jumlah beban personalia	37,17%	43,44%	Percentage of total personnel expenses

36. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko finansial maupun risiko non-finansial. Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank harus mampu menerapkan manajemen risiko yang baik agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan akan sangat mendukung Bank untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati. Prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut pada dasarnya telah menjadi standar bagi dunia perbankan yang penerapannya diarahkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko triwulanan secara *self assessment*.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dapat terjadi pada berbagai kegiatan operasional perbankan seperti pemberian fasilitas pembiayaan, pembelian efek-efek, transaksi antar bank, dan fasilitas lainnya.

Bank harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terkandung dalam setiap produk dan kegiatan perbankannya. Identifikasi ini dihasilkan dari penilaian yang menggunakan prinsip kehati-hatian dari karakteristik risiko pembiayaan dan risiko potensial yang timbul dari produk/kegiatan tertentu.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko pembiayaan, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak berelasi.

36. Financial Risk Management Objectives and Policies

In conducting its function as financial institution intermediaries, the Bank faces various financial and non-financial risk. Rapid business development in banking external and internal environment also causes the Bank business risk getting more complex, so the Bank must implement good risk management to adapt in banking business environment. Hence, risk management principles implemented will support the Bank to be more prudent in its operation. Basically, risk management principles are standard in banking industry which implementation is regulated by Bank Indonesia in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated December 28, 2016 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Unit Business.

As regulated by Bank Indonesia related to the implementation of risk management, Bank prepares quarterly risk profile report based on self assessment.

a. Financing Risk

Financing risk can be occurred in various banking operational activities such as providing financing facilities, purchasing marketable securities, interbank transactions, and other liabilities.

The Bank must identify and analyse risk embedded in each product and banking activity. This identification is derived from an assessment that uses the precautionary principle of characterizing financing risks and potential risks arising from certain product/activity.

In implementing risk management through active supervision of Board of Commissioner, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board for financing risk, the Bank also implements several points in each of the supervising aspect as follows:

1. The Board of Commissioner monitors fund provided, including a review of fund provided in large amount or those given to related parties.

2. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Komite Pembiayaan Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan Bank.

2. The Board of Directors is responsible in ensuring all fund providing activities are conducted according to the financing risk strategy and policies approved by the Board of Commissioner.
3. The Sharia Supervisory Board evaluates financing risk management policies related to compliance with sharia principles.
4. The Head Office Financing Committee is responsible for deciding the approval of financing in certain amount according to the Bank's policy.

Berikut adalah eksposur maksimum instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terkait risiko pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

The maximum exposure of financial instruments related to credit risk as shown in the statements of financial position as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017		2016		
	Jumlah Bruto/ Gross amounts	Jumlah Neto/ Net amounts	Jumlah Bruto/ Gross amounts	Jumlah Neto/ Net amounts	
Laporan Posisi Keuangan					Statements of Financial Position
Giro pada bank lain	2.710.051.260	2.710.051.260	6.359.796.829	6.359.796.829	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	205.000.000.000	205.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	Placements with other banks
Efek-efek	320.281.945.394	320.281.945.394	237.032.133.568	237.032.133.568	Marketable Securities
Piutang murabahah	325.631.988.276	322.367.419.659	259.767.694.726	237.998.338.239	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	868.014.110.047	855.805.846.733	929.535.048.991	908.936.858.268	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	64.197.635.203	63.485.769.218	20.070.624.069	20.006.864.451	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil					
yang akan diterima	8.311.142.412	8.311.142.412	7.561.804.873	7.561.804.873	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	181.738.611	175.801.111	176.874.497	170.936.997	Ijarah receivables
Penyertaan saham	60.468.550	59.863.864	60.468.550	59.863.864	Investments in shares
Aset lain-lain	2.757.702.450	2.757.702.450	2.674.302.450	2.674.302.450	Other assets
Jumlah	1.797.146.782.203	1.780.955.542.101	1.508.238.748.553	1.465.800.899.539	Total
Komitmen dan kontinjensi					Commitment and Contingencies
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah					
yang belum digunakan	2.040.291.378	2.040.291.378	16.521.952.543	16.521.952.543	Unused financing facilities issued
Bank garansi	2.532.000.000	2.532.000.000	2.532.000.000	2.532.000.000	Bank guarantee
Jumlah	4.572.291.378	4.572.291.378	19.053.952.543	19.053.952.543	Total

Eksposur maksimum risiko pembiayaan tercermin dari persentase setiap kategori pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah pembiayaan. Portofolio pembiayaan yang diberikan terdiversifikasi ke dalam 20 jenis sektor ekonomi, dimana untuk posisi 31 Desember 2017 dan 2016, kelompok sektor ekonomi yang memperoleh penyaluran pembiayaan terbesar dari Bank adalah sektor ekonomi perantara keuangan dan perdagangan besar eceran.

The maximum exposure to financing risk is reflected in the percentage of each category of loan to total loan exposure. Loans portfolio diversified into 20 types of economic sectors, as of December 31, 2017 and 2016, wherein financial intermediary and wholesale and retail economic sector obtained the largest loans from the Bank.

Bank mengkategorikan debitur yang menerima pembiayaan berdasarkan segmen pasar, yaitu komersial, konsumsi dan mikro, perusahaan pembiayaan dan "UKM". Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi pembiayaan yang diberikan Bank berdasarkan segmen pasar beserta tingkat NPF pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

The Bank categorizes borrowers based on market segments, namely; commercial, consumer and micro, multifinance and "UKM". The table below shows the composition of financing provided by the Bank based on market segment and its level of NPF as of December 31, 2017 and 2016:

	2017		2016		
	Baki Debet/ Outstanding financing %	Pembiayaan bermasalah/ Non-performing financing %	Baki Debet/ Outstanding financing %	Pembiayaan bermasalah/ Non-performing financing %	
Komersial	62,23	5,62	70,93	5,85	Commercial
Perusahaan pembiayaan	32,42	0,25	18,77	0,06	Multifinance
Konsumsi & Mikro	4,02	19,42	6,32	0,59	Consumer & Micro
"UKM"	1,33	16,99	3,98	0,71	"UKM"
Jumlah	100,00	42,28	100,00	7,21	Total

Kualitas aset keuangan

Tabel dibawah ini menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

Financial assets quality

The tables below shows financial assets quality per class of assets for all financial assets exposed by financing risk (gross of allowances for impairment losses):

	2017				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	85.512.539.440	-	-	85.512.539.440	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.710.051.260	-	-	2.710.051.260	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia	274.000.000.000	-	-	274.000.000.000	Placement with other bank and Bank Indonesia
Efek-efek	320.281.945.394	-	-	320.281.945.394	Marketable Securities
Piutang murabahah	288.315.295.954	-	37.316.692.322	325.631.988.276	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	847.636.001.426	-	20.378.108.621	868.014.110.047	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	64.197.635.203	-	-	64.197.635.203	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	8.311.142.412	-	-	8.311.142.412	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	175.801.111	-	5.937.500	181.738.611	Ijarah receivables
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	5.082.670.332	-	-	5.082.670.332	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham	60.468.550	-	-	60.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.757.702.450	-	-	2.757.702.450	Other assets
Jumlah	1.899.041.253.532	-	57.700.738.443	1.956.741.991.975	Total

	2016				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	50.703.532.464	-	-	50.703.532.464	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6.359.796.829	-	-	6.359.796.829	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia	87.000.000.000	-	-	87.000.000.000	Placement with other bank and Bank Indonesia
Efek-efek	237.032.133.568	-	-	237.032.133.568	Marketable Securities
Piutang murabahah	214.574.567.153	-	45.193.127.573	259.767.694.726	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	887.241.688.232	-	42.293.360.759	929.535.048.991	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	20.070.624.069	-	-	20.070.624.069	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	7.561.804.873	-	-	7.561.804.873	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	149.915.542	-	26.958.955	176.874.497	Ijarah receivables
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	3.316.608.154	-	-	3.316.608.154	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham	60.468.550	-	-	60.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.674.302.450	-	-	2.674.302.450	Other assets
Jumlah	1.516.745.441.884	-	87.513.447.287	1.604.258.889.171	Total

b. Risiko Pasar

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bank terekspos pada risiko pasar yang terdiri atas risiko imbal hasil. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan. Bank senantiasa melakukan pengelolaan terhadap risiko pasar tersebut secara rutin dan/atau berkala.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola risiko pasar adalah:

1. Melaksanakan fungsi *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Melakukan pemantauan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar.
3. Melakukan penyesuaian *pricing* pembiayaan agar senantiasa dapat kompetitif dengan *pricing* pasar dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi shaibul maal (deposan).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melaksanakan fungsi ALCO untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM) dan lain-lain.
3. Menjaga posisi likuiditas Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia.
4. Memiliki cadangan sekunder dan cadangan tersier untuk kebutuhan likuiditas.
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam pengelolaan portofolio secara menyeluruh baik secara sisi aset dan liabilitas.

b. Market Risk

In conducting its activities, the Bank is exposed to market risk consisting of yield risk and foreign exchange risk. Market risk, among others is present in the functional activities of the Bank, such as treasury activities and investments in securities and financial markets and financing activities. The Bank always manages market risk on a regular basis and/or periodically.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Performing *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) function to discuss market condition and implement risk management strategy.
2. Monitoring yield rate in market.
3. Performing price adjustment for financing to compete with the market price and give optimum result to the customer.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk occurred when the the Bank is not able to settle obligations due from funding cash flows and/or used high quality liquid asset without disrupting the Bank's activity and financial condition.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Perform ALCO function to discuss liquidity management and implement its risk management strategy.
2. Complying Bank Indonesia related requirement regarding liquidity such as Minimum Statutory Requirement and others.
3. Maintaining the Bank's liquidity according to Bank Indonesia regulation.
4. Having secondary and tertiary reserve for liquidity needs.
5. Increasing efficiency in using fund in portfolio management, both from assets and liabilities.

6. Memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah secara tepat waktu untuk menjaga kepercayaan nasabah sementara tetap menjaga profitabilitas Bank.

6. Meet all obligations to customer's in a timely manner to maintain customer's trust while maintaining the Bank's profitability.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

Below table shows the maturities of financial liabilities based on contractual payments as of December 31, 2017 and 2016:

2017											
	Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ More than 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ More than 3 months until 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ More than 6 months until 12 months	Jumlah/ Total						
Liabilitas						Liabilities					
Liabilitas segera	4.494.773.026	-	-	-	4.494.773.026	Liabilities immediately payable					
Simpanan giro wadiah	37.470.907.665	-	-	-	37.470.907.665	Wadiah demand deposits					
Simpanan dari bank lain	150.000.000.000	-	-	-	150.000.000.000	Deposits from other banks					
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.752.842.657	-	-	-	4.752.842.657	Undistributed revenue sharing					
Liabilitas lain-lain	633.380.929	-	-	-	633.380.929	Other liabilities					
Jumlah Liabilitas	197.351.904.277	-	-	-	197.351.904.277	Total Liabilities					
Dana Syirkah Temporer						Temporary Syirkah Funds					
Tabungan mudharabah	43.765.684.409	-	-	-	43.765.684.409	Mudharabah saving deposits					
Deposito mudharabah	718.372.680.872	435.505.256.892	238.918.800.000	58.725.000.000	1.451.521.737.764	Mudharabah deposits					
Giro mudharabah	150.000	-	-	-	150.000	Mudharabah demand deposits					
Jumlah Dana Syirkah Temporer	762.138.515.281	435.505.256.892	238.918.800.000	58.725.000.000	1.495.287.572.173	Total Temporary syirkah funds					
2016											
	Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ More than 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ More than 3 months until 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ More than 6 months until 12 months	Jumlah/ Total						
Liabilitas						Liabilities					
Liabilitas segera	3.372.927.636	-	-	-	3.372.927.636	Liabilities immediately payable					
Simpanan giro wadiah	37.132.349.505	-	-	-	37.132.349.505	Wadiah demand deposits					
Simpanan dari bank lain	178.000.000.000	-	-	-	178.000.000.000	Deposits from other banks					
Bagi hasil yang belum dibagikan	3.998.183.434	-	-	-	3.998.183.434	Undistributed revenue sharing					
Liabilitas lain-lain	444.283.333	-	-	-	444.283.333	Other liabilities					
Jumlah Liabilitas	222.947.743.908	-	-	-	222.947.743.908	Total Liabilities					
Dana Syirkah Temporer						Temporary Syirkah Funds					
Tabungan mudharabah	40.157.242.708	-	-	-	40.157.242.708	Mudharabah saving deposits					
Deposito mudharabah	682.928.161.841	227.504.649.312	72.890.295.401	175.200.000.001	1.158.523.106.555	Mudharabah deposits					
Giro mudharabah	118.652.689	-	-	-	118.652.689	Mudharabah demand deposits					
Jumlah Dana Syirkah Temporer	723.204.057.238	227.504.649.312	72.890.295.401	175.200.000.001	1.198.799.001.952	Total Temporary syirkah funds					

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

d. Operational Risk

Operational risk is a risk on loss, directly or indirectly, due to insufficient or failure in internal process, human errors, system failures, and/or external events which affected the Bank's operations.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko operasional, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.
2. Direksi menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Bank menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan Sumber Daya Insani (SDI) yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

In implementing risk management through active supervision from Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board, the Bank also implements several points in each of the supervising aspects as follows:

1. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible to develop an organizational culture that provides awareness on operational risk and can contribute in managing operational risk according to the Bank's business strategy.
2. The Board of Directors creates culture which objectively discloses the operational risk to the whole organizational elements, so the operational risk can be promptly identified and mitigated.
3. The Sharia Supervisory Board evaluates operational risk management policies related to compliance with Sharia Principles.
4. The Bank consistently gives punishment to the officers and employees who are proven conducting irregularities and violation.

e. Legal Risk

Legal risk is a risk when there is a lawsuit and/or weakness in juridical aspect. This risk is also due to absence of supportive laws and regulations or weakness in agreements such as non-compliance of the validity contract terms or insufficient collateral.

f. Strategic Risk

Strategic risk arises from insufficient determination and implementation of the Bank's strategies, incorrect business decision, or irresponsiveness to external changes.

Bank telah menyusun strategi dan rencana bisnis yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh manajemen Bank. Bank juga melakukan kajian dan evaluasi strategi bisnis serta realisasi yang telah dicapai oleh Bank sesuai dengan yang terangkum dalam Rencana Bisnis Bank.

The Bank has formulated the business strategies and plans based on discussions from the Board of Commissioners, Directors and all of the Bank's management. The Bank also reviews, evaluates, business strategy and its realisation achieved by the Bank based on Bank's Business Plan.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, serta prinsip Syariah.

g. Compliance Risk

Compliance risk is a risk when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. In practice, compliance risk is attached to Bank's risk related to laws and other regulations and policies, and sharia principles.

Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik. Secara periodik, audit internal dan staf *compliance* senantiasa bekerja secara terpadu agar aktivitas operasional Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan senantiasa menerapkan *check and balance* sehingga fungsi pengendalian dapat berjalan dengan baik.

The Bank always try to comply with the applicable laws and regulations. Periodically, internal audit and compliance staff works integrately so the Bank's operational activity is conducted based on applicable laws and regulations, and implement check and balance procedures, so the controlling function is properly performed.

Bank telah menyampaikan Laporan Profil Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi 31 Desember 2017, dengan Surat No. 022/DIR-BVIS/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dengan predikat risiko komposit yaitu 2 (*Low to moderate*).

The Bank has submitted its risk profile report to the Financial Service Authority as of December 31, 2017 as set forth in its letter No. 022/DIR-BVIS/I/2018, dated January 19, 2018 with Moderate composite risk.

Tingkat kesehatan bank sesuai Ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.10/SEOJK.03.2014 adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), permodalan dan rentabilitas. Nilai akhir dari penilaian tingkat kesehatan Bank dinyatakan dalam peringkat komposit.

The soundness level of the Bank, in accordance with Financial Service Authority Circular Letter No.10/SEOJK.03.2014 represents the result of evaluation of various aspects that affect the condition and performance of the Bank through quantitative and qualitative evaluation of the factors of risk profile, Good Corporate Governance (GCG), capital and profitability. The final result of the evaluation of the Bank's soundness level is stated as a composite rating.

Berdasarkan penilaian manajemen terkait tingkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2017, Bank memiliki peringkat komposit 2, dengan demikian Bank secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan yang secara umum sangat baik.

Based on the management's assessment of soundness of the Bank as of December 31, 2017, the composite rate of the Bank is 2 which shows that the Bank is sound and able to overcome significant negative effects of changes in business condition and other external factor, such as risk profile, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), profitability and good capital.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

h. Reputation Risk

Reputational risk is a risk when there is decrease in stakeholder trust due to negative perspective to the Bank.

Langkah-langkah pengendalian risiko reputasi yaitu antara lain:

Steps in managing reputational risk are as follows:

1. Segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi.
2. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas yaitu:
 - Melakukan tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Bank untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi/sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
 - Komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
3. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respon Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi Bank.

1. Immediately following up and handling customer complaints and lawsuit which can increase exposure in reputational risk.
2. Taking preventive action to prevent event which may arise general reputational risk through series of action:
 - Corporate social responsibilities, a series of activities done by the Bank for people empowerment in the form of economic/social activities which expected to build positive reputation from the Bank's stakeholders.
 - Routine communication/education to stakeholders in order to build positive reputation from the Bank's stakeholder.
3. Restoring the Bank's reputation after an event has occurred which gives rise to reputational risk, which is any response of the Bank to restore and prevent worsening in the Bank's reputation.

i. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Bank antara lain:

1. Melakukan identifikasi terhadap risiko investasi secara berkala. Proses identifikasi mencakup sumber risiko yang dapat mempengaruhi pendapatan, nilai ekonomis dari posisi keuangan, dan modal Bank.
2. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala, dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelanggaran.

j. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

i. Investment Risk

Investment risk is a risk arising due to the Bank's share in the risk on customer's business which is financed by profit sharing financing, whether using net revenue sharing method or profit and loss method.

Risk management implementation performed by the Bank includes:

1. Performing regular investment risk identification. Identification process includes source of risk affected revenue, economic value of financial position, and the Bank's capital.
2. Performing regular monitoring towards compliance on approval limit and follow up action when it is breached.

j. Rate of Return Risk

Rate of return risk is a risk arising from changes in rate of return obtained by the Bank from financing activity that can influence the behavior of the customer.

37. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) No.003/BVIS/DPS/JKT/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menyatakan bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum, aspek operasional dan produk, Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini-opini Syariah dari DPS.

37. Sharia Supervisory Board Opinion

Based on Sharia Supervisory Board Letter (Bank SSP) No. 003/BVIS/DPS/JKT/II/2018 dated February 12, 2018, for period January 1, 2017 to December 31, 2017, states that based on its general supervision, in operational and product aspect, the Bank has complied with fatwa and sharia regulation issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council and Sharia opinion from DPS.

38. Kontinjensi dan Perkara Hukum

Bank mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, Pemerintah Tingkat I Provinsi Bandung, Ny. Elly Rosanti (Pemilik Lama) dan Wei ke Loppies S.H. (Notaris) atas tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 470/Braga, milik Bank yang berlokasi di Bandung yang telah jatuh tempo pada tahun 2008. Pada saat ini, perkara hukum tersebut telah sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum ada putusan dari Mahkamah Agung RI atas perkara hukum tersebut.

Selain perkara hukum yang disebutkan diatas, Bank menghadapi perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Manajemen Bank bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi tersebut.

39. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan surat dari OJK No. S-23/PB.132/2018 tertanggal 23 Januari 2018, uang muka setoran modal tersebut telah disetujui OJK untuk diakui sebagai modal disetor. Susunan pemegang saham setelah pengakuan uang muka setoran modal menjadi modal disetor adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Stock</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah/ <i>Total</i>	Name of Stockholder
PT Bank Victoria International Tbk	309.982.683	99,99	309.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	310.000.000	100,00	310.000.000.000	Total

38. Contingencies and Lawsuit

The Bank filed a lawsuit to the Bandung District Court, addressed to the National Land Agency (BPN) Bandung, Bandung Provincial Government Level I, Mrs. Elly Rosanti (Previous Land's Owner) and Wei ke Loppies S.H. (Notary) related to objection on the application for the extension of Certificate of Building Rights (HGB) No. 470/Braga, owned by the Bank which is located in Bandung that have matured in 2008. At this time, the legal case has reached the Supreme Court of the Republic of Indonesia. As the date of the issuance of the financial statements, there has been no decision from the Supreme Court on the legal proceedings.

In addition to the above lawsuit mentioned, Bank is a party to certain lawsuits or claims the arising from their ordinary course of business. The Banks management and legal counsels believe that the resulting liabilities under these lawsuits or claims, if any, will not have a material effect on the financial statements, thus, no provision has been made for these contingent liabilities.

39. Subsequent Event After Reporting Date

Based on a letter from OJK No. S-23/PB.132/2018 dated January 23, 2018, the said capital paid-up in advance has been approved by OJK to be recognized as issuance of additional share capital. The composition of shareholders after recognition capital paid-up in advance to issued and paid-up capital, the composition of the Banks's stockholder as follows:

40. Informasi Lainnya

- a. Pada tanggal 7 Desember 2016, Bank menjual sejumlah pembiayaan murabahah dan musyarakah kepada PT Wahana Mutiara Pratama, pihak ketiga dengan nilai pokok pembiayaan dan margin yang ditanggihkan sebesar Rp 16.083.192.840 dengan harga jual Rp 16.083.192.640. Penjualan pembiayaan tersebut didokumentasikan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. 48, 50, 52, dan 54 serta Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (*Cessie*) No. 49, 51, 53, dan 55 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta.
- b. Pada tanggal 22 Desember 2016, Bank menjual sejumlah pembiayaan murabahah kepada PT Wahana Mutiara Pratama, pihak ketiga dengan nilai pokok pembiayaan sebesar Rp 25.779.448.145 dengan harga jual Rp 25.779.448.145. Penjualan pembiayaan tersebut didokumentasikan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. 175 dan 177 serta Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (*Cessie*) No. 176 dan 178, dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta.
- c. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Bank memiliki rasio non-performing (NPF) bruto untuk piutang dan pembiayaan masing-masing sebesar 4,59% dan 7,21% serta rasio NPF neto masing-masing sebesar 4,08% dan 4,35%.
- d. Rasio piutang dan pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar 83,59% dan 100,67%.
- e. Imbal hasil aset atau *Return on Assets (ROA)* untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 0,36% dan negatif 2,19%.
- f. Imbal Hasil Ekuitas atau *Return on Equity* untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 2,01% dan negatif 17,45%.
- g. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat pembiayaan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

40. Other Information

- a. On December 7, 2016, the Bank has sold a number of murabahah and musyarakah receivables to PT Wahana Mutiara Pratama, a third party, with an outstanding and deferred financing margin amounted to Rp 16,083,192,840 with a selling price of Rp 16,083,192,640. The sale of such financing has been documented in Deed Nos. 48, 50, 52, and 54 of the Sale and Purchase Agreement and Transfer of Receivables, as well as Deed Nos. 49, 51, 53, and 55 of the Agreement of Transfer and Delivery Rights (*Cessie*) of Suwarni Sukiman, S.H., notary in Jakarta.
- b. As of December 22, 2016, the Bank has sold a number of murabahah receivables to PT Wahana Mutiara Pratama, a third party with an outstanding and deferred financing margin amounted to Rp 25,779,448,145 with a selling price of Rp 25,779,448,145. The sale of such financing has been documented in Deed Nos. 175 and 177 of the Sale and Purchase Agreement and Transfer of Receivables, as well as Deed Nos. 176 and 178 of the Agreement of Transfer and Delivery Rights (*Cessie*) of Suwarni Sukiman, S.H., notary in Jakarta.
- c. As of December 31, 2017 and 2016 the Bank has gross non-performing financing (NPF) ratio for receivables and financing of 4.59% and 7.21% respectively, and net NPF ratio of 4.08% and 4.35% respectively.
- d. The ratios of receivables and financing to total deposits as of December 31, 2017 and 2016 were 83.59% and 100.67% respectively.
- e. Return on Assets as of December 31, 2017 and 2016 were 0.36% and negative 2.19% respectively.
- f. Return on Equity as of December 31, 2017 and 2016 were 2.01% and negative 17.45%, respectively.
- g. As of December 31, 2017 and 2016, there is no financing granted and related to third parties which has exceeded the Bank's Legal Lending Limit (LLL).

41. Standar Akuntansi Keuangan Baru

a. Diterapkan pada tahun 2017

Bank telah menerapkan amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru berikut, namun tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan:

1. PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan: Prakarsa Pengungkapan
2. PSAK No. 24, Imbalan Kerja
3. PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

b. Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan amandemen PSAK yang berlaku efektif pada periode yang dimulai:

1 Januari 2018

PSAK

1. PSAK No. 2, Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan
2. PSAK No. 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

1 Januari 2020

PSAK

1. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
2. PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
3. PSAK No. 73, Sewa

Bank masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

41. New Financial Accounting Standards

a. Adopted During 2017

The Bank has adopted the following amended Statements of Financial Accounting Standards (PSAKs) and new Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAKs), which did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material effect on the financial statements:

1. PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements: Disclosure Initiative
2. PSAK No. 24, Employee Benefits
3. PSAK No. 60, Financial Instruments: Disclosures

b. Issued but Not Yet Effective

The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued the following new Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and amendments of PSAKs which will be effective for annual period beginning:

January 1, 2018

PSAK

1. PSAK No. 2, Statements of Cash Flows: Disclosure Initiative
2. PSAK No. 46, Incomes Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses

January 1, 2020

PSAK

1. PSAK No. 71, Financial Instruments
2. PSAK No. 72, Revenues from Contracts with Customers
3. PSAK No. 73, Leases

The Bank is still evaluating the effects of these PSAKs and ISAK and has not yet determined the related effects on the financial statements.
